



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perdagangan adalah dokumen perencanaan Kementerian Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun,

yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.

3. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Renstra Kementerian Perdagangan merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi, misi, dan program Presiden.
- (2) Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Perdagangan yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pemutakhiran target serta penyesuaian pendanaan yg telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perdagangan akan disesuaikan dalam perencanaan tahunan (rencana kerja) Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada masing-masing unit kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian rencana kerja Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024 berdasarkan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 477

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian dunia dalam dua tahun terakhir memperlihatkan tren yang negatif. Pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,6%. Melemahnya kinerja perekonomian dunia terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekonomi negara maju dan negara berkembang serta penurunan volume perdagangan dunia. Perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Jepang mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,7%. Perekonomian negara berkembang tahun 2019 juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,7%. Sementara volume perdagangan dunia melemah dengan pertumbuhan hanya 0,9%,.

Bagi negara berkembang, penurunan kinerja ekonomi tahun 2019 terutama disebabkan oleh melemahnya indeks harga komoditas dunia. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor negara-negara tersebut hanya tumbuh sebesar 0,8%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 4,1%. Sementara kinerja impor negara berkembang bahkan mengalami kontraksi sebesar -0,8%.

Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi terus berlanjut di tahun 2020 dan akan semakin parah dengan ancaman resesi global di depan mata akibat merebaknya pandemi Covid-19. Kejadian luar biasa yang melanda banyak negara di dunia sejak Desember 2019 ini membuat Bank Dunia dan Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) terus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia

akan berkontraksi tajam sebesar -3% pada tahun 2020 yang merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Terkontraksinya perekonomian dunia terlihat dari proyeksi negatif pertumbuhan negara maju dan negara berkembang, masing-masing mengalami rata-rata kontraksi pertumbuhan sebesar -6,1% dan -1,0% pada tahun 2020. Perekonomian AS dan Jepang masing-masing diproyeksi akan mengalami kontraksi tajam sebesar -5,9% dan 5,2%. EU bahkan diproyeksikan akan lebih terpukul dengan kontraksi yang mencapai angka -7,1%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami negara berkembang hanya -1,0% karena ditopang pertumbuhan ekonomi China dan India yang diproyeksikan masih positif dengan angka masing-masing sebesar 1,2% dan 1,9%. Sedangkan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) dan Brazil diproyeksikan akan berkontraksi masing-masing sebesar -0,6% dan -5,3%.

Tabel 0-1 Pertumbuhan Ekonomi Global (Produk Domestik Bruto)

	2018	2019	2020	2021
World Output	3.6	2.9	-3.0	5.8
Advanced Economies	2.2	1.7	-6.1	4.5
United States	2.9	2.3	-5.9	4.7
Euro Area	1.9	1.2	-7.5	4.7
Germany	1.5	0.6	-7.0	5.2
France	1.7	1.3	-7.2	4.5
Italy	0.8	0.3	-9.1	4.8
Spain	2.4	2.0	-8.0	4.3
Japan	0.3	0.7	-5.2	3.0
United Kingdom	1.3	1.4	-6.5	4.0
Canada	2.0	1.6	-6.2	4.2
Other Advanced Economies ²	2.6	1.7	-4.6	4.5
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.7	-1.0	6.6
Emerging and Developing Asia	6.3	5.5	1.0	8.5
China	6.7	6.1	1.2	9.2
India ³	6.1	4.2	1.9	7.4
ASEAN-5 ⁴	5.3	4.8	-0.6	7.8
Emerging and Developing Europe	3.2	2.1	-5.2	4.2
Russia	2.5	1.3	-5.5	3.5
Latin America and the Caribbean	1.1	0.1	-5.2	3.4
Brazil	1.3	1.1	-5.3	2.9
Mexico	2.1	-0.1	-6.6	3.0
Memorandum				
European Union ⁵	2.3	1.7	-7.1	4.8
Low-Income Developing Countries	5.1	5.1	0.4	5.6
Middle East and North Africa	1.0	0.3	-3.3	4.2
World Growth Based on Market Exchange Rates	3.1	2.4	-4.2	5.4
World Trade Volume (goods and services)	3.8	0.9	-11.0	8.4

Sumber: World Economic Outlook, IMF, April 2020

Di tengah laju tren negatif pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian nasional sepanjang periode 2015-2019 terbilang cukup stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,0% per-tahun. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang periode 2015-2019 yang hanya sebesar 4,4% per tahun. Menurut hasil evaluasi RPJMN 2015-2019, prestasi ini dapat dicapai karena keberhasilan dalam menjalankan kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Stabilitas laju perekonomian nasional ini, dari sisi produksi terutama didukung oleh industri pengolahan, industri pertanian, industri jasa informasi dan komunikasi, dan industri transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, berdasarkan hasil evaluasi RPJMN 2015-2019, stabilitas laju perekonomian nasional terutama didukung oleh pertumbuhan investasi dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,4% per tahun dan konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh rata-rata 5,0% per tahun. Sementara ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,1% dan 0,6% per tahun.

Perekonomian nasional tahun 2019 dilihat dari distribusi pertumbuhan PDB, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dengan share mencapai 19,7% terhadap total PDB Nasional. Kontribusi terbesar selanjutnya didukung oleh sektor perdagangan yang mencapai 13,01% terhadap PDB. Sementara itu, dilihat berdasarkan laju pertumbuhan PDB (yoy), pertumbuhan tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 9,41% pada tahun 2019. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun yang sama mencapai 4,62%.

Stabilitas laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 terutama didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang mampu menopang laju pertumbuhan PDB di angka 5,0%. Namun demikian, pengaruh dinamika perekonomian global yang terjadi beberapa tahun terakhir berdampak terhadap kinerja ekspor nasional. Dalam lima tahun

terakhir, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 mengalami defisit sebesar USD 3,2 miliar, lebih rendah daripada tahun 2018 yang mengalami defisit USD 8,7 miliar. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2019 hanya mencapai USD 167,5 Miliar, menurun 6,95% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai USD 180 Miliar. Sementara dari sisi impor, nilainya turun 9,5% menjadi USD 170,7 Miliar dari sebelumnya mencapai USD 188,7 Miliar.

Defisit pada neraca perdagangan migas terutama dipicu oleh kenaikan impor migas. Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kenaikan impor migas, terutama pada gas, minyak mentah, dan hasil minyak, dipengaruhi oleh peningkatan impor minyak yang signifikan baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk minyak.

Dalam hal perdagangan nonmigas, kontribusi ekspor tahun 2019 didominasi oleh ekspor produk primer dengan share 51,7%. Adapun kontribusi ekspor produk manufaktur tahun 2019 hanya 48,3%. Namun demikian, proporsi ini lebih baik dari tahun 2018 dimana rasio ekspor produk primer dan manufaktur sebesar 54,7 : 45,3. Terkait kinerja impor nasional, Berdasarkan klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC), impor Indonesia tahun 2019 didominasi oleh Bahan Baku Penolong dengan kontribusi sebesar 73,7%, diikuti oleh Barang Modal (16,6%) dan Barang Konsumsi (9,6%).

Gambar 0.1 Ekspor Indonesia (2014-2019)



Sumber: BPS, 2019 (diolah BPPP)

Gambar 0.2 Impor Indonesia (2014-2019)



Sumber: BPS, 2019 (diolah BPPP)

Menghadapi tahun 2020, dinamika perekonomian global yang terjadi seperti, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas dunia, meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah Kawasan dan ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan pandemi Covid-19, menjadi peluang dan tantangan tersendiri dalam membangun perekonomian nasional kedepan. Bank Dunia memperkirakan perekonomian

Indonesia tahun 2020 akan tetap stabil dan berdaya tahan. Isu perekonomian dunia seperti melemahnya volume perdagangan dunia, terutama yang terjadi pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 diprediksi tidak banyak mempengaruhi perekonomian nasional karena roda penggerak perekonomian nasional masih didominasi oleh konsumsi domestik. Tingginya proporsi konsumsi domestik terhadap PDB, bahkan mampu menutupi dampak negatif dari defisit neraca perdagangan yang telah terjadi tahun 2018 dan 2019.

Dalam RPJMN 2020-2024, perekonomian nasional pada lima tahun kedepan ditargetkan untuk tumbuh 5,7% - 6,0% per tahun. Dari sisi produksi, sektor perdagangan ditargetkan tumbuh rata-rata 6,0% - 6,3% per tahun. Sementara itu, dari sisi pengeluaran ditargetkan terjadi pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 5,4% - 5,6% per tahun serta ekspor dan impor masing-masing sebesar 4,7% - 4,9% dan 4,7% - 4,8% per tahun.

Target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 ini belum memperhitungkan dampak merebaknya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, khususnya tahun 2020. Merespon eskalasi penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian nasional, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 ke dalam 2 (dua) skenario: (i). Skenario berat dengan pertumbuhan ekonomi 2,3%; dan (ii). Skenario sangat berat dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -0,4%.

1.1.2 Capaian Perdagangan

A. Perdagangan Dalam Negeri

Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

Selama periode 2015-2018, inflasi nasional cenderung menurun dan terkendali pada angka 3,3% dengan inflasi kelompok bahan makanan, terutama pada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) / Lebaran disetiap tahun. Beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan selama dua tahun terakhir, seperti penguatan regulasi, penatalaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta upaya khusus telah menghasilkan stabilitas harga bahan pokok yang terkendali.

Selama tahun 2018 telah tercatat penurunan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP) dan pendataan pedagang serta komoditas yang semakin baik dan valid.

Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar daerah nasional pada rata-rata tahun 2019 berada di angka 13,7%, masih diatas target 13% di tahun 2019. Namun demikian, capaian kinerja tahun 2019 lebih baik 0,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di tahun 2019 berada di angka 1,6%, sudah dibawah target 9%. Hal ini mengindikasikan perbedaan harga barang kebutuhan pokok pada tiap wilayah (provinsi) nasional masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi, namun harga barang kebutuhan pokok terbilang cukup stabil secara antar waktu.

Tabel 0-2 Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Daerah-Antar Waktu Nasional 2015-2019

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI					CAPAIAN 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	13%	14%	12,6%	14,8%	14,6%	13,7%	94,62
Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	9%	3,3%	3,6%	2%	2,1%	1,6%	182,2

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan, 2020

Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional. Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang juga dilakukan, diantaranya dengan koordinasi antar instansi yang terkait jika terjadi gangguan pasokan. Nilai inflasi terakhir yang tercatat pada Agustus 2019 untuk inflasi umum berada diangka 2,48, sedangkan inflasi bahan makanan berada diangka 5,60. Cenderung stabil pada kisaran 3,3 % selama 3 tahun terakhir.

Gambar 0.3 Grafik Inflasi Nasional (2015-2019)



Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pencapaian pembangunan sarana perdagangan melalui depo gerai maritim – tol laut ini baru selesai 1 unit dan dalam proses sebanyak 6 unit.

Gambar 0.4 Trayek Tol Laut



Sumber: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2018

Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat

Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang diamanahkan kepada Kementerian Perdagangan harus dilaksanakan sesuai empat prinsip, yaitu Pembangunan /Revitalisasi fisik, Pembangunan/ Revitalisasi manajemen, Pembangunan /Revitalisasi ekonomi, dan Pembangunan /Revitalisasi sosial. Hingga tahun 2018 Kementerian Perdagangan telah berhasil membangun /merevitalisasi secara fisik 4.152 Pasar Rakyat dengan peningkatan omzet pedagang mencapai 21,84%. Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat tidak hanya aspek fisik, namun juga aspek non fisik yang dibentuk maupun diperbaiki. Dalam upaya stabilisasi harga, kehadiran Pasar Rakyat harus dapat mendukung perbaikan pola distribusi perdagangan dari hulu ke hilir sehingga tercipta keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kestabilan harga bahan pokok di masing-masing daerah.

Gambar 0.5 Pencapaian Pembangunan Pasar Rakyat



2015-2018	2019 (target)
5.152	1.079

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Perlindungan konsumen nasional dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif perlindungan konsumen dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

Selama periode 2015 – 2019 lalu, berbagai upaya telah dilaukan dalam rangka mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Perlindungan Konsumen Niaga (IPKN). Indeks ini merupakan indeks komposit untuk menggambarkan kondisi

perlindungan konsumen di Indonesia yang terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan Indeks Ketaatan Pelaku Usaha (IKPU). Pada periode 2015 – 2019 lalu, capaian kinerja perlindungan konsumen dan tertib niaga terbilang memuaskan. Realisasi IPKN mengalami peningkatan selama periode tersebut dari 43,67 pada tahun 2015 menjadi 58,60 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan adanya keseriusan untuk terus melakukan peningkatan kinerja perlindungan konsumen niaga di Indonesia.

Dalam hal keberdayaan konsumen, kesadaran konsumen di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari semakin membaiknya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. IKK meningkat menjadi 41,7 (Level Mampu) dari sebelumnya dengan indeks 40,41 (Level Mampu) dan 33,70 (Level Paham) pada tahun 2017. Dalam hal ketaatan pelaku usaha, Indeks Ketaatan Pelaku Usaha (IKPU) menggambarkan kondisi ketaatan pelaku usaha atas aspek-aspek seperti tertib ukur (kemetrolagian), taat aturan, dan konsisten dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkannya. Dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan, telah dilakukan tera terhadap alat-alat UTTP yang berlaku. Selama tahun 2019 telah dilakukan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang terhadap 12.947.796 UTTP. Secara kumulatif, total UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 54.654.710 unit atau 79,73 persen dari potensi UTTP di Indonesia (68.552.441 unit). Keberhasilan dalam melakukan tera dan tera ulang jumlah UTTP didukung oleh peningkatan layanan jumlah Unit Metrologi Legal (UML) dan pembentukan Daerah tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU). UML yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang secara nasional meningkat dari 194 pada tahun 2018 menjadi 300 pada tahun 2019. Selain itu, hingga tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 54 Daerah Tertib Ukur (DTU) Kabupaten/Kota dan 1.621 Pasar Tertib Ukur (PTU).

Dalam aspek penegakan hukum perlindungan konsumen dan tertib niaga, atas upaya sinergi penegakan hukum yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen PKTN pada 2019 menerima penghargaan dari Kabareskrim Polri atas peran aktif dalam penegakan hukum, koordinasi dan sinergitas dengan Penyidik Polri.

Pemanfaatan SRG, PLK, dan PBK

Indonesia memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana pemerintah yang tersebar di 106 Kabupaten/Kota yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Dari 123 Gudang SRG yang telah dibangun, sebanyak 35 (29%) Gudang SRG telah aktif, sebanyak 58 (47%) Gudang SRG pernah aktif dan tidak beroperasi lagi, lalu sebanyak 30 (24%) Gudang SRG belum pernah aktif sama sekali. Untuk nilai transaksi SRG hingga September 2019 mencapai Rp 314,27 miliar, dengan volume 34.710 ton.

Gambar 0.6 Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia



Sumber: Bappebti, 2018

Sementara itu, persebaran Pasar Lelang Komoditi (PLK) nasional hingga tahun 2018 tersebar pada 21 Pasar Lelang (PL), yang terdiri dari 11 PL Dinas Perdagangan, 3 PL revitalisasi, dan 7 PL swasta murni. Sedangkan perkembangan dari nilai transaksi Pasar Lelang di tahun 2013 hingga 2018 terjadi kecenderungan penurunan nilai, namun di tahun 2018 kembali menguat dengan

nilai Rp 604,63 miliar. Pada tahun 2019, untuk bulan Januari hingga Agustus baru mencapai nilai Rp 178,8 miliar.

Gambar 0.7 Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang



Sumber: Bappebti, 2019

Transaksi perdagangan berjangka komoditi memiliki perkembangan yang semakin membaik. Volume transaksi PBK selama tahun 2017 tercatat sebanyak 7,064 juta lot terdiri dari Kontrak Berjangka (Multilateral) sebanyak 1,33 juta lot dan transaksi Kontrak Derivatif lainnya (Bilateral/Sistem Perdagangan Alternatif) sebanyak 5,56 juta lot. Pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh transaksi Kontrak Berjangka Multilateral yang mengalami peningkatan mencapai 12,97% dibandingkan tahun 2015, sedangkan Kontrak Derivatif Lainnya hanya terjadi peningkatan 4,81%. Untuk volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA dengan share 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%. Lalu pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan volume transaksi PBK menjadi 8,82 juta lot. Sementara untuk tahun 2019 hingga bulan Juli baru tercatat diangka 5,99 juta lot.

B. Perdagangan Luar Negeri

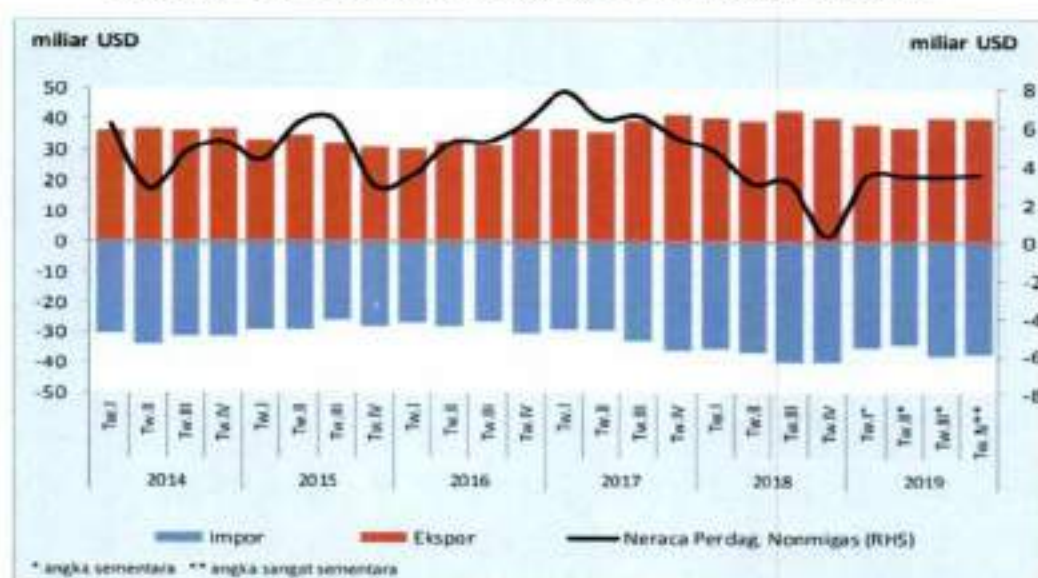
Kondisi neraca perdagangan tahun 2019 mengalami defisit USD 3,23 miliar yang disebabkan oleh defisit neraca perdagangan migas USD 9,38 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas mengalami surplus USD 6,15 miliar, lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan surplus sebesar USD 3,99 miliar. Perkembangan ini dipicu oleh positifnya kinerja perdagangan nonmigas pada triwulan IV 2019. Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019, pada periode ini mencatatkan surplus sebesar USD 3,5 miliar yang

dipengaruhi oleh penurunan impor nonmigas yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor nonmigas. Kontraksi impor terjadi pada kelompok bahan baku dan barang modal.

Ekspor Nonmigas

Kinerja ekspor nonmigas tahun 2019 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun surplus neraca perdagangan nonmigas tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 4,1% (yoy) dengan total nilai ekspor nonmigas tercatat sebesar USD 154,99 miliar. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan positif 6,4% (yoy) dengan total nilai ekspor sebesar USD 162,84 miliar. Menurut Bank Indonesia (2019), penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dipicu memburuknya kinerja ekspor riil yang terkontraksi semakin dalam dari 0,6% (yoy) pada 2018 menjadi 3,2% (yoy). Selain itu, harga komoditas ekspor juga menurun dari sebelumnya tumbuh positif 7,1% (yoy) pada 2018 menjadi kontraksi 0,9% (yoy) pada 2019.

Gambar 0.8 Neraca Perdagangan Nonmigas Nasional



Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, (Bank Indonesia, 2020)

Menurut negara tujuan utama ekspor, dalam Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019 tercatat bahwa terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor ke 10 negara tujuan utama berdasarkan pangsa pasar ekspor. Dibandingkan tahun

sebelumnya, ekspor nonmigas menurut negara tujuan utama mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,1% (yoy) dimana berdasarkan laporan pertriwulan, pertumbuhan positif hanya terjadi pada triwulan IV sebesar 2,2% (yoy). Pertumbuhan positif yang terjadi tahun 2019 dipengaruhi oleh akselerasi pertumbuhan ekspor ke negara tujuan utama seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Singapura, dan Vietnam. Sementara Jepang, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand tercatat mengalami pertumbuhan yang negatif.

Kinerja ekspor nonmigas ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memiliki pangsa pasar 16,5% pada tahun 2019 mengalami akselerasi pertumbuhan 6,0% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor komoditas barang dari logam tidak mulia. Namun, terjadi perlambatan pertumbuhan ekspor batubara dan minyak nabati, serta terkontraksinya ekspor komoditas bahan kimia. Kinerja ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang memiliki pangsa pasar 11,4% tercatat mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,8% (yoy) pada tahun 2019. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor komoditas makanan olahan. Namun, peningkatan ekspor lebih lanjut ke Amerika Serikat tertahan oleh kontraksi kinerja komoditas ekspor utama lainnya, yaitu tekstil, karet alam olahan, dan alas kaki. Jepang yang memiliki pangsa pasar 8,8% mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 15,3% (yoy). Pertumbuhan negatif ini dipicu memburuknya kinerja ekspor komoditas ekspor alat listrik, ukur, fotografi, dll, serta barang tekstil. Senada dengan Jepang, India sebagai pangsa pasar ekspor keempat Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 7,5% mengalami kontraksi pertumbuhan 14,4% (yoy). Pertumbuhan negatif ini dipicu melambatnya ekspor komoditas barang dari logam tidak mulia dan ekspor bahan kimia. Selanjutnya, Singapura menempati peringkat kelima pangsa pasar ekspor Indonesia dengan pangsa pasar 6,0% (yoy). Akselerasi pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor alat listrik, ukur, fotografi, dll dan barang dari logam tidak mulia.

Tabel 0-3 Ekspor Nonmigas menurut Negara Tujuan

Sincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (% yoy)									
	2018	2019**	2018					2019				
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	TOTAL	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III*	Tw. IV**	TOTAL**
1 Tiongkok	15.0	16.5	34.7	33.7	14.5	-13.3	14.1	-17.1	4.0	12.4	26.0	6.0
2 Amerika Serikat	10.8	11.4	3.1	1.5	4.1	3.6	3.1	-3.0	0.7	0.6	4.7	0.8
3 Jepang	10.0	8.8	21.1	21.6	12.5	-7.2	11.0	-15.3	-18.1	-19.8	-7.2	-15.3
4 India	8.4	7.5	-5.9	-10.9	13.2	-4.3	-2.1	-5.6	-13.1	-26.9	-10.1	-14.4
5 Singapura	5.4	6.0	13.3	-0.7	-10.9	-2.0	-0.5	-1.2	6.8	22.1	-2.8	6.0
6 Malaysia	4.8	4.9	10.3	15.4	14.5	2.9	10.6	-6.1	6.9	-7.2	0.6	-1.6
7 Filipina	4.2	4.3	6.6	16.8	6.3	-13.0	3.3	5.5	-4.2	-2.8	-0.7	-0.8
8 Korea Selatan	4.6	3.9	4.4	17.5	34.1	18.1	18.6	8.2	-20.3	-31.1	-26.0	-18.6
9 Thailand	3.5	3.5	15.7	7.7	3.6	-4.3	5.4	-4.6	-6.6	-3.3	-2.3	-4.4
10 Vietnam	2.8	3.3	15.5	22.5	32.4	36.1	27.4	27.8	18.9	6.1	5.7	13.2
Total 10 Negara	69.4	70.0	13.1	12.1	10.7	-2.9	7.8	-6.3	-3.4	-4.9	2.2	-3.1

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, (Bank Indonesia, 2020)

Pertumbuhan ekspor sepuluh komoditas utama nonmigas tahun 2019 secara rata-rata mengalami penurunan 4,2% (yoy), berbalik arah setelah tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% (yoy). Dalam Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019, disebutkan kontraksi pertumbuhan yang terjadi tahun 2019 disebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekspor riil dan rata-rata harga ekspor 10 (sepuluh) komoditas utama. Berdasarkan jenis komoditasnya, batubara, minyak nabati, dan barang dari logam tidak mulia mendominasi 3 (tiga) besar komoditas ekspor nonmigas nasional tahun 2019.

Batubara menjadi komoditas paling penting dalam ekspor nonmigas nasional dengan pangsa mencapai 13,9% terhadap total ekspor berdasarkan jenis komoditas pada tahun 2019. Secara nominal, terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar 9,5% (yoy) yang disebabkan oleh menurunnya indeks harga batubara sebesar 15% (yoy). Berdasarkan negara tujuan ekspornya, komoditas batubara mengalami perbaikan kinerja di pasar Jepang dan India. Akan tetapi, terjadi penurunan kinerja ekspor batubara ke RRT dan Malaysia. Ekspor minyak nabati menempati urutan kedua dengan kontribusi mencapai 10,7%. Komoditas yang didominasi oleh minyak kelapa sawit (CPO) ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,2% (yoy) yang disebabkan menurunnya indeks harga komoditas sebesar 16,8% (yoy). Pada

peringkat ketiga, barang dari logam tidak mulia berkontribusi 8,5% terhadap total ekspor berdasarkan jenis komoditas. Berbeda dengan dua komoditas unggulan di atas, barang dari logam tidak mulia pada tahun 2019 mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8% (yoy). Hasil positif ini terutama didukung membaiknya indeks harga komoditas sebesar 2,2% (yoy).

Tabel 0-4 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas Utama

Urutan	Pangsa (%)		Pertumbuhan (% yoy)									
	2018	2019**	Nominal									
			2018					2019				
			Ten. I	Ten. II	Ten. III	Ten. IV	TOTAL	Ten. I*	Ten. II*	Ten. III*	Ten. IV**	TOTAL**
1. Batubara	14.7	13.9	27.0	21.2	15.8	3.1	17.1	-7.2	-2.2	-15.4	-12.9	-9.3
2. Minyak Nabati	11.8	10.7	-18.3	-11.2	-4.1	-13.7	-12.0	-16.0	-20.3	-20.2	3.5	-13.2
3. Barang dari Logam tak Mulia	7.6	8.5	50.6	46.7	34.0	1.8	30.4	4.8	4.4	2.2	21.7	8.0
4. Tekstil dan Produk Tekstil	8.1	8.3	7.9	6.1	0.0	0.3	5.5	1.2	-2.1	-5.3	-4.4	-2.7
5. Alat Listrik, Ukur, Fotografi, dll	5.7	6.0	3.2	2.8	7.2	7.5	5.3	8.7	3.0	-3.8	-2.8	1.0
6. Kendaraan & Bagiannya	4.8	5.2	3.8	9.2	11.9	16.3	10.5	10.6	4.0	15.3	2.8	8.3
7. Makanan Olahan	4.8	5.1	9.4	11.0	9.2	0.7	7.2	-4.0	4.8	3.1	6.5	2.8
8. Karet Olahan	3.8	3.7	-21.8	-17.6	-6.2	-13.0	-15.0	-15.2	-2.4	-4.1	-4.5	-6.6
9. Mesin & Peralatan Mekanik	3.4	3.4	2.4	-0.9	-3.4	-8.0	-2.7	-6.5	-7.8	-3.3	1.1	-4.1
10. Alas Kaki	3.1	2.8	7.0	2.4	3.7	3.2	4.1	-10.2	-14.3	-14.2	-15.9	-13.7
Total 10 Komoditas	67.7	67.6	5.2	7.2	8.6	-1.2	4.8	-4.4	-4.0	-7.2	-8.9	-4.2

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, (Bank Indonesia, 2020)

Impor Nonmigas

Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019, kinerja impor nonmigas mengalami kontraksi sebesar 6,1% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 19,6% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, impor nonmigas tahun 2019 didominasi oleh kelompok impor bahan baku dengan proporsi 68,4%, selanjutnya kelompok impor barang modal sebanyak 19,4%, dan impor barang konsumsi sebanyak 10,7%.

Impor bahan baku pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 6,4% (yoy). Negatif pertumbuhan pada impor bahan baku dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan impor riil dan harga, masing – masing sebesar 4,5% dan 2,0%. Komoditas bahan baku yang mengalami kontraksi impor antara lain bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor, biji gandum dan meslin,

bahan plastik lainnya, dalam bentuk awal. Impor barang modal juga mengalami kontraksi pertumbuhan yang mencapai 5,5% (yoy). Kontraksi pertumbuhan impor barang modal terutama dipengaruhi oleh impor mesin otomatis pengolah data dan satuannya, pemanas dan pendingin & alat-alatnya, serta mesin lainnya untuk industri tertentu yang mengalami perlambatan. Selanjutnya, impor barang konsumsi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,6% (yoy).

Berdasarkan negara asalnya, dominasi impor nonmigas Indonesia tahun 2019 berasal dari RRT dengan kontribusi mencapai 28,6% terhadap total impor nonmigas nasional. Disusul selanjutnya impor berasal dari Jepang sebesar 10,7% dan Singapura 7,7%. Sementara itu, Thailand dan Amerika Serikat masing-masing berkontribusi sebesar 6,0% dan 5,3% terhadap total impor nonmigas nasional.

Tabel 0-5 Impor Nonmigas Menurut Kelompok Barang

Rincian	Pengsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (%) yoy)									
	2018	2019**	2018					2019				
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	TOTAL	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III*	Tw. IV**	TOTAL**
Barang Konsumsi												
Nominal	10.4	10.7	22.3	22.1	36.1	11.2	22.4	-12.2	-6.5	-6.1	9.7	-3.6
Ril	9.1	8.9	8.9	10.9	31.7	3.2	13.1	-12.4	-11.8	-12.2	4.1	-8.0
Indeks Harga	0.0	0.0	12.3	10.0	3.4	7.7	8.3	0.2	6.6	6.7	5.3	4.7
Bahan Baku												
Nominal	68.6	68.4	21.0	17.3	17.3	14.3	17.3	0.1	-5.5	-7.5	-11.8	-6.4
Ril	70.1	71.1	9.6	7.1	11.5	11.7	9.9	0.6	-3.4	-5.1	-8.9	-4.5
Indeks Harga	0.0	0.0	10.4	9.5	5.3	2.3	6.8	-0.5	-2.2	-2.3	-3.0	-2.0
Barang Modal												
Nominal	19.3	19.4	26.7	38.5	22.8	9.1	22.8	-3.1	-8.7	-2.0	-8.2	-5.5
Ril	19.0	18.5	24.1	34.7	27.0	11.7	23.1	-5.1	-9.9	-4.9	-13.4	-8.2
Indeks Harga	0.0	0.0	2.1	2.8	-3.4	-2.1	-0.1	2.2	1.4	3.1	6.0	3.0
Total												
Nominal	100.0	100.0	22.8	23.5	21.3	12.5	19.6	-1.8	-6.8	-6.8	-8.1	-6.1
Ril	100.0	100.0	12.9	14.2	17.5	10.4	13.5	-1.9	-6.2	-6.6	-8.6	-6.0
Indeks Harga	0.0	0.0	8.8	8.1	3.2	1.8	5.4	0.1	-0.6	-0.2	0.1	-0.1

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, (Bank Indonesia, 2020)

Neraca Perdagangan Jasa

Menurut Bank Indonesia, terjadi lonjakan defisit neraca perdagangan jasa pada tahun 2019 sebesar 20,0% (yoy). Defisit neraca perdagangan jasa terjadi karena berkurangnya surplus yang terjadi pada jasa perjalanan. Meskipun terdapat peningkatan jasa perjalanan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, namun terdapat penurunan tajam dalam hal jasa perjalanan yang

menyebabkan surplus jasa perjalanan berkurang secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 0.9 Neraca Perdagangan Jasa Nasional



Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, (Bank Indonesia, 2020)

Dalam rangka menjaga surplus neraca perdagangan nonmigas, Kementerian Perdagangan telah melakukan sejumlah terobosan dalam membuka akses pasar ke negara-negara nontradisional atau pasar prospektif. Sejumlah terobosan tersebut antara lain dilakukan melalui percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional serta pelaksanaan misi dagang ke negara-negara nontradisional.

Kerjasama dan Diplomasi Perdagangan

Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 14 perjanjian PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian bilateral dengan Jepang, Pakistan, Chile, EFTA, Australia, dan Mozambik serta perjanjian dalam lingkup ASEAN, yaitu dengan ASEAN sendiri, Jepang, India, Australia dan New Zealand (AANZ), China, dan Hong Kong. Ke-14 perjanjian yang telah disepakati tersebut telah mencakup 22 negara mitra dagang Indonesia.

Perjanjian yang telah diimplementasikan dan telah dapat dimanfaatkan sebanyak 9 perjanjian Jepang, Pakistan, Chile, serta dalam lingkup ASEAN meliputi, ATIGA, ASEAN-India, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, ASEAN-China, dan ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ). Diperkirakan sampai dengan

2019-2020, Indonesia akan memiliki setidaknya 15 PTA/FTA/CEPA. Jika perjanjian dengan EU yang memiliki 28 negara anggota dapat disepakati di tahun 2020, Indonesia akan memiliki perjanjian yang sudah mencakup 50 negara mitra dagang yang diliberalisasi perdagangannya. Perjanjian perdagangan internasional tidak hanya memperluas akses pasar melalui penurunan tarif, namun juga mencari solusi terhadap hambatan-hambatan non tarif yang dihadapi Indonesia di negara mitra.

Tabel 0-6 Perjanjian PTA/FTA/CEPA yang Dimiliki Indonesia

Perjanjian Yang Telah Disepakati	Perjanjian Yang Telah Diimplementasikan/Dimanfaatkan
14 perjanjian PTA/FTA/CEPA	9 perjanjian

Sumber : Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Perdagangan, 2019

Dalam keanggotaannya pada ASEAN, Indonesia juga mengambil bagian dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan negara ASEAN dan enam negara mitra ASEAN. Selain itu Indonesia juga sedang terlibat dalam review perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) dan ASEAN-India FTA (AIFTA). Perundingan RCEP ini sendiri ditargetkan untuk dapat diselesaikan di tahun 2019.

Kedepannya Indonesia tidak hanya fokus dalam memperluas perjanjian perdagangan dengan negara mitra dagang lainnya, namun juga akan fokus terhadap perluasan produk yang dicakup dalam perjanjian yang telah ada melalui revidi perundingan. Indonesia juga berpartisipasi dalam perundingan dalam rangka fasilitasi perdagangan untuk mendorong ekspor Indonesia baik dalam kerangka regional maupun multilateral.

Misi Dagang

Dalam upaya menjaga surplus neraca perdagangan nonmigas, dilakukan pula terobosan dalam menysasar negara-negara nontradisional atau pasar prospektif. Pada tahun 2018 telah dilakukan misi dagang dilakukan secara intensif ke 13 negara nontradisional atau pasar prospektif, yaitu India, Pakistan, Selandia Baru, Taiwan, Bangladesh, Tunisia, Maroko, AS, Swiss, Spanyol, Cina, Aljazair, dan Arab Saudi. Sepanjang tahun 2015-

2019, telah terjadi peningkatan nilai transaksi yang diperoleh dari misi dagang. Tahun 2015 transaksi misi dagang mencapai USD 2,6 juta, tahun 2016 membukukan capaian USD 18,7 juta. Selanjutnya tahun 2017 transaksi meningkat tajam menjadi USD 3,6 miliar dan tahun 2018 nilai transaksi kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi USD 14,79 miliar. Untuk misi dagang di tahun 2019 hingga bulan September, tercatat sudah dilakukan kegiatan misi dagang ke 7 negara (Amerika Serikat, India, Chile, New Zealand, Turki, Mozambik, dan China) dengan total transaksi sebesar USD 4,60 miliar.

Pengamanan Perdagangan

Pengamanan perdagangan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional yaitu dengan melindungi produk ekspor di negara tujuan ekspor, pemerintah berhasil memenangkan 17 kasus/sengketa dagang yang dituduhkan kepada produk Indonesia. Pemerintah melakukan langkah diplomatis dalam menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan produk Indonesia di negara ekspor sampai ke World Trade Organization (WTO) untuk mengembalikan akses pasar Indonesia.

Tabel 0-7 Kasus Tuduhan Trade Remedies terhadap Indonesia 1995 – Juli 2018

Kasus Tuduhan	Status	Jumlah
Dumping	Dikenakan	100
	Dihentikan	100
	Dalam proses	23
	Total	223
Subsidi	Dikenakan	5
	Dihentikan	12
	Dalam proses	7
	Total	24
Safe Guard	Dikenakan	22
	Dihentikan	36
	Dalam proses	7
	Total	65

Sumber : Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag 2018, WTO diolah.

Hingga Juli 2019, total nilai ekspor yang berhasil diselamatkan USD 1,7 miliar atau sebesar Rp23 triliun di India, Amerika

Serikat, Australia, Malaysia, Vietnam, Argentina, Prancis, dan Afrika Selatan. Produk yang berhasil diselamatkan antara lain rumput laut, melamin, alumunium ekstruksi, otomotif, serat poliester bertekstur, minyak kelapa sawit, dan lainnya.

C. Kelembagaan Kementerian Perdagangan

Penilaian terhadap kelembagaan Kementerian Perdagangan dapat tercermin dari komponen Indeks Reformasi Birokrasi, AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan di tahun 2018 masih dikisaran skor 74,48, sedikit dibawah target skor yaitu 75. Maka dari itu perlu masih perlu peningkatan dalam menjalankan dan mengelola sistem Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sementara untuk AKIP berada pada predikat BB yang artinya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Namun demikian, tetap harus ada usaha untuk menjaga serta memperbaiki predikat yang sudah dimiliki ini untuk kedepannya. Untuk Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Perdagangan tahun 2018 berada pada angka 90. Lalu Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan masih terjaga dalam predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang mengindikasikan kondisi keuangan masih dalam keadaan baik. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan ini masih tetap memenuhi target WTP untuk terus menjaga predikat ini.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Ditengah isu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa masa mendatang, perekonomian Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan menyimpan sejumlah potensi dan permasalahan terkait dengan perdagangan yang harus ditangani. Sejumlah potensi dan permasalahan dalam pembangunan sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Peningkatan Kualitas Pasar melalui Sertifikasi Pasar

Upaya Kementerian Perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dari sisi perdagangan dalam negeri salah satunya dengan melakukan revitalisasi pasar dan program penetrasi pasar dalam rangka menjaga melambungnya harga-harga barang pokok terutama di waktu tertentu. Kementerian Perdagangan telah berhasil membangun/merevitalisasi secara fisik 4.152 Pasar Rakyat dengan peningkatan omzet pedagang mencapai 21,84% hingga tahun 2018. Konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor lain. Pembenahan secara fisik diharapkan dapat meningkatkan citra serta menggantikan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Disamping itu diperlukan juga revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial. Revitalisasi manajemen merupakan pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, permodalan, dan SOP pelayanan pasar. Revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Guna meningkatkan kualitas pasar, saat ini pasar rakyat sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional. Kementerian Perdagangan akan melakukan

sertifikasi terhadap pasar rakyat agar bisa memiliki SNI. Dalam mengoptimalkan peran pasar rakyat, SNI 8152:2015 dibuat dengan tujuan menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas pasar rakyat dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, maupun pusat perdagangan lainnya, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan aturan tersebut, upaya yang perlu dilakukan Kementerian Perdagangan adalah dengan memenuhi 3 persyaratan pasar rakyat yang meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan.

Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok. Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah. Fokus pasar yang menjadi sasaran adalah pasar rakyat yang termasuk pantauan IHK BPS (Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik) di seluruh Indonesia. Komoditas yang menjadi fokus adalah beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017. Selain itu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah sesuai acuan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018) serta bawang putih. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan, yaitu seperti Perum Bulog, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi/Daerah, kepolisian dan pelaku usaha yang ada di daerah untuk memasok barang kebutuhan pokok yang harganya mulai tampak naik di pasar tersebut. Gejolak harga biasanya terjadi saat mendekati bulan puasa, hari raya besar atau hari-hari penting tertentu lainnya. Laju inflasi pada Lebaran 2018 merupakan laju terendah dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017. Penetrasi Pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang perlu terus dilakukan,

didukung dengan koordinasi antar instansi yang terkait terutama jika terjadi gangguan pasokan.

Besarnya Pangsa Pasar Dalam Negeri

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luas wilayah, ukuran pasar domestik juga tercermin dari besarnya populasi penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, meningkatnya daya beli masyarakat, serta besarnya nilai produksi perekonomian. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun asing. McKinsey Global Institute (MGI) memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada tahun 2030, dengan 135 juta konsumen potensial dengan pasar bernilai USD 1,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang pasar domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor maupun para pelaku usaha dalam negeri. Kondisi tersebut sekaligus memberikan tantangan bagi para pelaku perdagangan dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen pasar domestik.

Sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan daya beli yang tinggi, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini dapat menjadi potensi yang baik bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal, baik sebagai pasar produk halal maupun produsen produk halal. Indonesia berada pada posisi strategis bagi halal super highway link dalam global halal supply chain. Halal tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor melalui produk-produk halal yang diproduksi di dalam negeri dan diharapkan menjadi penjamin produk halal terbaik di dunia kedepannya.

Sejalan dengan itu, saat ini Indonesia menjadi pengguna internet terbesar di Asia, dengan angka mencapai 150 juta lebih pengguna. Angka tersebut menunjukkan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah terhubung jaringan internet. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, maka terbuka pula peluang usaha online yang dapat memberikan multiplier-effect yang cukup signifikan. Melalui teknologi informasi dan internet, pendapatan negara dari sektor ini juga dapat meningkat. Kinerja ekonomi akan terus terdorong dan sekat-sekat birokrasi terpotong serta proses transaksi menjadi jauh lebih cepat. Angka pengguna internet yang terus meningkat perlu untuk dicermati karena akan memperkuat konsumsi domestik Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, distribusi barang, industri elektronik dan perangkat lunak.

Peningkatan Keberdayaan Konsumen

Potensi konsumen pasar domestik Indonesia yang tinggi perlu diimbangi dengan kesadaran konsumen yang semakin meningkat pula. Kondisi saat ini, kesadaran konsumen Indonesia terus meningkat yang tercermin dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2018 meningkat menjadi 40,41 (Level Mampu) dari 33,70 (Level Paham) pada tahun 2017. Butuh dua tingkatan lagi bagi pemerintah untuk mendorong tingkat indeks konsumen nasional di level paling tinggi yaitu Kritis dan Berdaya. Upaya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen perlu terus dilakukan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas.

Sinergi positif perlu dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan bersama demi meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia menjadi konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen Indonesia saat ini masih sebagai target pasar dan belum dapat mengelaborasi perannya sebagai market driven bagi perkembangan barang dan jasa. Lebih lanjut konsumen Indonesia memiliki karakteristik

menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan. Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. Pencapaian kelembagaan perlindungan konsumen hingga tahun 2018 adalah berhasil menciptakan konsumen yang mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya.

Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kemetrologian berupa pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian di tingkat kabupaten/kota, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi telah membina 1.373 orang Penera, 34 orang Pranata Laboratorium, 166 orang Pengawas Kemetrologian, dan 236 orang Pengamat Tera. Sumber daya manusia Metrologi Legal tersebut tersebar di Pusat dan Kabupaten/Kota untuk menunjang pelayanan maupun pengawasan kemetrologian.

Disamping itu pula, dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan kemetrologian, Direktorat Metrologi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membentuk Juru Ukur, Takar, dan Timbang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang bertugas di pasar modern dan tradisional. Juru Ukur, Takar, dan Timbang ini bertugas melakukan pendataan UTTP, mengecek timbangan yang digunakan di pasar, mengelola pos ukur ulang, dan menangani pengaduan konsumen dalam hal ukuran, takaran, dan timbangan. Hingga tahun 2019 telah terbentuk 236 Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang tersebar di pasar-pasar di 42 Kabupaten/kota.

Untuk mengukur kinerja kemetrologian di daerah kabupaten/kota, Direktorat Metrologi berkolaborasi dengan pemerintah daerah membentuk Daerah Tertib Ukur dan Pasar

Tertib Ukur yang mengindikasikan bahwa adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di wilayah kabupaten/kota tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tahun 2019 telah terbentuk 54 Daerah Tertib Ukur (DTU) yang meningkat 24 persen dari tahun 2018 dan untuk Pasar Tertib Ukur di tahun 2019 telah bertambah menjadi 1.465 Pasar Tertib Ukur (PTU) yang meningkat 19 persen dari tahun 2018. Kementerian Perdagangan akan terus mendorong terbentuknya Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Di samping peningkatan dan penguatan kinerja penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian di daerah, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi juga meningkatkan peran aktif melalui kemitraan nasional dan internasional. Di tingkat nasional, kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi untuk pembinaan dan penguatan peran metrologi legal dalam penyaluran bantuan pangan non tunai telah dilakukan, begitu pula dengan instansi lain seperti PT PLN (Persero), BP Migas, PT Pegadaian, dan lain-lain. Di tingkat internasional, kerjasama peningkatan kapasitas laboratorium uji telah dilakukan dengan Czech Metrology Institute. Kerjasama Selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang metrologi telah dilakukan selama 2017 – 2019 bersama dengan Timor Leste. Direktorat Metrologi memberikan konsultasi regulasi dan bimbingan teknis kepada SDM metrologi di Timor Leste dalam rangka mengembangkan sistem metrologi legal dan kapabilitas kelembagaan metrologi legal Timor Leste.

Peningkatan Infrastruktur Mutu Dalam Melakukan Pengendalian Mutu

Dalam mendukung konsistensi dan kesesuaian Mutu produk dengan standar dan regulasi, baik dalam maupun luar negeri, Kementerian Perdagangan memiliki Unit yang memberikan layanan Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi. Ketiga unit layanan tersebut telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN),

selaku Badan Akreditasi di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan secara Internasional.

Kementerian Perdagangan juga memiliki laboratorium sub jejaring sebanyak 32 laboratorium yang tersebar di 27 Provinsi. Infratrstruktur laboratorium ini dapat menjadi potensi dalam peningkatan kualitas dan kesesuaian mutu dengan standar dan regulasi teknis sehingga produk nasional memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Disamping Kemendag, kegiatan ini tentunya merupakan sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait.

Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Berjangka Komoditi memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi. Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistem Resi Gudang (SRG) memberi peluang bagi pembiayaan produsen, dimana komoditi-komoditi yang disimpan di dalam gudang dapat dijadikan agunan bank. Hingga tahun 2018, Indonesia memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana pemerintah yang tersebar di 106 Kabupaten/Kota, sebanyak 35 (29%) gudang tersebut telah aktif. Terkait Pasar Lelang, keberadaannya mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah. Pembinaan dari hasil evaluasi SRG diharapkan dapat diintegrasikan dengan pasar lelang komoditas, sehingga dapat menjadi instrumen perdagangan yang efektif dan efisien dalam pembentukan harga komoditas pangan yang transparan, pengendalian ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditi pangan serta stabilisasi harga pangan.

Peningkatan Kinerja Perizinan dan Kenaikan Transaksi PBK

Kinerja PBK, jika dilihat dari volume transaksi kontrak multilateral dan kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

baik, di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Berjangka Derivatif Indonesia (BKDI), terus meningkat sejak 2015-2019. Berdasarkan data transaksi BBJ dan BKD pada 2016, total volume transaksi PBK meningkat 6,40 persen atau sebesar 7.012.220 lot dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 2017 naik 0,48 persen atau sebesar 7.046.179 lot, dan pada 2018 terus naik 25,20 persen atau menjadi 8.821.762 lot. Sementara volume transaksi kontrak berjangka dari Januari-Juli 2019 tercatat sebesar 5,996,830 lot.

Dalam rangka peningkatan transaksi di bursa (multilateral), Bappebti telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha di bidang PBK dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, mendorong optimalisasi peran commodity desk, moratorium perizinan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta mendorong bursa berjangka menyediakan sistem transaksi yang semakin handal. Selain itu, Bappebti juga mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti CPO, olein, kopi, kakao, timah serta mengkaji kontrak baru seperti karet, teh, pala, dan rumput laut.

Di sisi lain, dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan pemrosesan izin, pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini Bappebti telah meningkatkan kinerja perizinan PBK, yang sebelumnya membutuhkan waktu 11 hari menjadi hanya 4 hari. Sehingga pada 2018, pertumbuhan volume transaksi PBK mengalami peningkatan sebesar 25,20 persen. Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka ini, Kementerian Perdagangan terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.

Pemantapan Pasar Utama Ekspor dan Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional

Pemantapan pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar ekspor utama (market maintenance) dilakukan untuk meningkatkan

ekspor nonmigas dalam memperkuat daya saing produk olahan ekspor non-migas. Berdasarkan data yang dilekuarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, mencatat akumulasi nilai ekspor nonmigas Indonesia ke negara tujuan utama pada Januari-juli 2019 sebagian besar menurun, namun pasar ekspor non-migas Indonesia yang terbesar pada Januari-Juli 2019 masih pada negara Tiongkok dengan nilai US\$ 13,68 miliar dan Amerika Serikat (AS) sebesar US\$ 9,92 miliar. Meskipun Tiongkok dan AS masih menjadi pasar terbesar ekspor nonmigas, tetapi nilai ekspor ini turun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia selanjutnya adalah Jepang (US\$ 7,91 miliar), India (US\$ 6,66 miliar), Singapura (US\$ 5,05 miliar), Malaysia (US\$ 4,46 miliar), dan Korea Selatan (US\$ 3,71 miliar). Posisi selanjutnya ditempati Thailand (US\$ 3,25 miliar), Taiwan (US\$ 2,15 miliar), Belanda (US\$ 1,84 miliar), Jerman (US\$ 1,36 juta), Australia (US\$ 1,23), dan Italia (US\$ 1 juta). Secara umum, terjadi penurunan di semua negara tujuan utama ekspor nonmigas. Hanya ekspor non-migas ke Taiwan yang mencatat kenaikan menjadi US\$ 2,15 dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 2 miliar pada Januari-Juli 2018.

Untuk meningkatkan ekspor, selain perlu dilakukannya diversifikasi produk dan pelaku usaha, juga dibutuhkan diversifikasi pasar. Pasar ekspor Indonesia sudah mulai membidik pasar internasional nontradisional di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Jika hanya menyasar pasar tradisional atau pasar utama seperti AS, Tiongkok, Jepang, India dan Eropa sebagai tujuan ekspor maka Indonesia akan mudah terimplikasi tekanan global. Pasar-pasar non-tradisional memiliki jumlah penduduk yang fantastis dengan jumlah masyarakat kelas menengah (middle class) yang terus meningkat. Pasar non-tradisional juga merupakan pasar yang prospektif. Saat ini, Afrika memiliki 1,3 miliar penduduk dengan 600 juta middle class, pertumbuhan negara tersebut rata-rata di atas 6%. Prospek serupa juga berlaku bagi pasar Asia Selatan, seperti Bangladesh dan Sri Lanka. Secara total jumlah penduduk

Asia Selatan sebanyak 1,6 miliar sehingga dinilai menjadi pasar yang baik. Pasar prospektif ini perlu terus di dorong bersama untuk memperluas pasar.

Langkah diversifikasi pasar telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan membuka peluang-peluang pasar non-tradisional. Dengan langkah tersebut, diharapkan nantinya Indonesia tidak bergantung kepada beberapa kelompok negara maupun beberapa jenis produk ekspor, namun dapat menjadikan negara-negara lainnya sebagai mitra dagang utama yang seimbang. Hal ini juga membuka peluang untuk dapat menciptakan dan meningkatkan keragaman produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Adapun kebijakan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk perluasan pasar ekspor ke pasar-pasar prospektif yaitu dengan mengintensifkan kegiatan promosi, peningkatan akses informasi kepada dunia usaha, pengembangan produk, pemberdayaan kelembagaan ekspor, penguatan kerja sama ekspor, dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor dalam memasuki pasar global.

Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang terkait dengan kelembagaan meliputi beberapa aspek seperti: a) sistem manajemen kinerja Kementerian Perdagangan perlu diperkuat untuk mencapai outcome/output; b) kualitas dialog kinerja perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit di lingkungan Kementerian Perdagangan; c) perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang menjadi tanggung jawab K/L lain dalam rangka mengimplementasikan program terkait Kementerian Perdagangan. Untuk itu harmonisasi menjadi sangat perlu ditekankan agar perencanaan, penganggaran serta evaluasi dapat lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan kinerja Kementerian Perdagangan dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan

peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit kerja di Kementerian Perdagangan.

1.2.2 Permasalahan

Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan

Kendala dalam distribusi nasional menjadi salah satu perhatian Kementerian Perdagangan dalam periode lima tahun kedepan karena sangat erat kaitannya dengan stabilitas harga barang terutama barang kebutuhan pokok. Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu dilakukan penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan guna menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor. Secara umum, produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi, ini merupakan akibat bottleneck dalam rantai pasok serta terbatasnya kapasitas bongkar/muat pelabuhan di beberapa daerah yang kemudian menciptakan disparitas harga antar daerah. Kendala lain yang terjadi adalah belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan. Dukungan Kementerian Perdagangan dalam penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan adalah dengan mendorong efisiensi arus barang melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan (pasar, gudang yang menerapkan sistem resi gudang (SRG), dan gerai maritim), peningkatan kapasitas pelaku logistik, serta peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha/asosiasi.

Efektivitas Pengawasan Barang

Selain meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha, Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan prapasar atau uji petik barang impor wajib SNI, pengawasan barang beredar di pasar (pemenuhan SNI, label, manual kartu garansi) serta Pengawasan BDKT pada tahun 2018 sebanyak 6.803 Produk di 9 Kabupaten/Kota dan pada tahun

2019 sebanyak 5.322 Produk di 14 Kabupaten/Kota. Untuk pengawasan SPBU pada tahun 2018 sebanyak 174 Nozzle 59 SPBU di 16 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2019 sebanyak 432 Nozzle 122 SPBU di 35 Kabupaten/Kota.

Terhadap pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan, Kementerian Perdagangan secara tegas melakukan penegakan hukum. Pada tahun 2018 terdapat 459 penindakan yang meningkat sebesar 33,4 persen dari tahun 2017. Jenis penindakan yang diberikan berupa sanksi administratif (pemberian teguran, rekomendasi pencabutan API (Angka Pengenal Importir), rekomendasi pemblokiran akses kepabeanan, rekomendasi pencabutan izin usaha), penarikan dari peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana. Penegakan Hukum untuk dugaan tindak pidana sedangkan Pada tahun 2019, terdapat 185 penindakan yang terdiri dari 131 penindakan hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 54 penindakan hasil pengawasan post border. Jenis penindakan yang diberikan berupa sanksi administratif (pemberian teguran, rekomendasi pengamanan, rekomendasi pemusnahan, rekomendasi pengecualian, dan rekomendasi penghentian usaha sementara) serta proses sanksi pidana (Pemberian sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Undang-Undang Nomor 2 1981 tentang Metrologi Legal pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak 3 kasus pelanggaran SPBU yang telah mendapatkan vonis pengadilan (inkrach), 1 kasus SPBU masih P19 dimana berkas perkara masih harus dipenuhi sesuai permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU), 8 kasus SPBU dalam proses penyidikan. Di samping itu, pengawasan pada sektor jasa juga telah dilakukan mulai dari pembinaan terhadap seluruh asosiasi pada sektor jasa dan juga pembinaan langsung terhadap beberapa jasa bisnis dan jasa distribusi seperti jasa travel umroh, marketplace, surveyor, jasa perparkiran, dan lain-lain; khususnya yang terkait dengan parameter pengawasan yang meliputi standar mutu pelayanan, cara menjual, layanan purna jual, pengiklanan, serta klausula baku.

Terlepas dari berbagai kegiatan pengawasan yang telah terlaksana, dalam kaitan ini adalah permasalahan mengenai sudah sejauh mana kegiatan pengawasan tersebut memberikan dampak terhadap sasaran yang dituju, seperti jumlah peredaran barang impor yang ber-SNI, jumlah peredaran barang di pasar yang memiliki parameter SNI, label bahasa Indonesia dan kartu garansi, dan jumlah barang dalam kemasan terbungkus, serta jumlah perizinan dan jumlah pengawasan barang pokok dan barang penting. Hal tersebut menjadi penting untuk mengetahui kegiatan pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut berdampak terhadap sasaran yang dituju.

Pengaturan E-Commerce

Dalam euforia perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang semakin meningkat, penyerapan produk dalam negeri ikut terdongkrak. Saat ini terdapat sekitar empat juta UKM yang berhasil masuk ke market place (lapak online), dimana sebanyak 80 persen produk yang dijual adalah produk lokal. Pada penyelenggaraan hari belanja online nasional (Harbolnas) 2018, transaksi tercatat meningkat 44,7 persen dibandingkan pada 2017. Namun meningkatnya transaksi perdagangan secara elektronik belum diimbangi dengan terlaksananya pengaturan terkait seperti:

- a) Penyelesaian regulasi dan tata kelola e-commerce bersinergi dengan Kemenkominfo dan kementerian/lembaga terkait, dengan tujuan melindungi kepentingan pelaku usaha nasional khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- b) Pengamanan aktivitas perdagangan digital melalui pengawasan produk di e-commerce terkait SNI dan Label;
- c) Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;
- d) Secara paralel, ekosistem offline juga perlu diperkuat, seperti *packaging* dan *branding* harus dipersiapkan untuk membantu para pedagang melakukan penetrasi pasar dan menggapai konsumennya.

Tantangan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan e-commerce cukup tinggi, menyebabkan perlu disiapkannya perlindungan konsumen untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV terkait Roadmap E-Commerce, terdapat arahan aspek regulasi terkait perlindungan konsumen, yaitu (i) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik; (2) harmonisasi regulasi; (iii) sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-commerce dan (iv) pengembangan national payment gateway secara bertahap. Rancangan peraturan pemerintah perlu disusun terkait Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik agar dapat melindungi konsumen dalam setiap transaksi yang menggunakan sistem tersebut. Selain itu, edukasi terhadap konsumen perlu dilakukan agar meningkatkan pemahaman transaksi melalui sistem elektronik baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Pengawasan dan Pengendalian Barang Impor

Pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi, pengelolaan impor dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terhadap barang untuk kebutuhan industri, pengelolaan barang impor berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pengelolaan impor barang modal dan bahan baku/penolong yang digunakan di dalam proses produksi untuk tujuan ekspor. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kebutuhan industri di dalam negeri diperlukan suatu kebijakan impor yang dinamis dan komprehensif. Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan terkait impor, dimana kebijakan tata niaga impor tersebut belum optimal pelaksanaannya.

Disaat yang sama terdapat upaya dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*/EODB) yang salah satunya dengan melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean. Perubahan ini diharapkan dapat memperlancar proses masuk barang. Selain itu, transaksi importir diharapkan menjadi lebih mudah karena dapat mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas. Komoditas yang masuk kategori di post border didominasi dari golongan bahan baku, sedangkan bahan pangan atau barang lainnya yang memiliki risiko tinggi dan menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, akan tetap diperiksa melalui border.

Namun, kebijakan post border untuk menurunkan biaya logistik dan *dwelling time*, dinilai belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini berpotensi dimanfaatkan importir dengan memasukkan produk tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan di bawah Kementerian Perdagangan dinilai belum cukup mumpuni untuk menutup celah kecurangan impor barang. Salah satu bentuk kecurangannya adalah mengubah harmonized system (HS), sehingga yang awalnya dikenakan larangan atau dibatasi menjadi tidak terdeteksi. Disamping itu, kebijakan post border juga dirasa menunjukkan lemahnya pengawasan sebab barang bisa melewati wilayah pabean. Artinya barang sudah benar-benar masuk, baru terjadi pemeriksaan dan pemenuhan syarat. Hal ini hanya dapat menguntungkan beberapa pihak seperti investor dan importir yang mudah memasukkan barang impor tanpa kendali yang ketat. Pada sisi lain, ada keinginan kuat untuk melakukan pengetatan impor namun juga pelaksanaan post border yang malah melonggarkan barang impor masuk tanpa pengecekan dan verifikasi di daerah pabean. Perlu penelaahan lanjutan terkait kebijakan ini, karena terkait dengan persoalan pengamanan perdagangan nasional.

Peningkatan Ketertelusuran Mutu

Peningkatan keterbukaan pasar sebagai konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hsl ini dimana produk yang digunakan konsumen harus memiliki kepastian atas Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L). Disamping itu produk yang diperdagangkan juga harus tidak merugikan konsumen. Keterbukaan pasar ini memiliki 2 (dua) implikasi utama, yaitu: (i) meningkatnya arus transaksi produk dari luar negeri ke dalam negeri dan (ii) terciptanya pasar baru di luar negeri yang lebih efisien bagi produk nasional.

Tingginya aliran produk impor ke dalam negeri, selain dapat memanjakan konsumen dengan banyaknya pilihan akan produk yang lebih beragam juga dapat memiliki potensi negatif terhadap konsumen. Adapun potensi negatif yaitu meningkatnya peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan di pasar domestik yang dapat mengancam perlindungan konsumen. Kebijakan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor melalui paket kebijakan ekonomi Nomor XV Tahun 2017 memiliki potensi meningkatkan peredaran produk di pasar domestik yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib. Kebijakan ini menggeser pengawasan barang yang termasuk dalam pengaturan larangan dan/atau pembatasan yang semula dilakukan pengawasan di kawasan pabean (border) menjadi pengawasan di luar kawasan pabean (post-border). Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar arus barang impor, tugas pengawasan tersebut dialihkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pengawasan di luar kawasan pabean.

Dalam kebijakan post-border, salah satu tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah melakukan pemeriksaan kesesuaian data importasi barang yang diberlakukan SNI secara wajib. Pada saat ini sudah terdapat 115 produk yang diberlakukan SNI secara wajib dan akan terus bertambah. Pemeriksaan (analysing point) dilakukan secara elektronik terhadap sekitar 500 data Pendaftaran Importasi Barang (PIB)

setiap hari. Memperhatikan beban dan tugas tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten yang dapat melakukan analisa data importasi. Selanjutnya juga memastikan validitas data sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengawasan di lapangan.

Kenaikan arus perdagangan internasional ke pasar domestik akibat keterbukaan pasar juga meningkatkan kompetisi produk domestik terhadap produk impor. Dalam rangka menjaga daya saing produk domestik dan meningkatkan konsumsi produk domestik, perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan melalui pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat. Pendampingan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial pengelolaan pasar dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian dapat diwujudkan pasar yang bersih, nyaman, aman, dan sejuk sebagai rumah perekonomian rakyat. Pada tahun 2014-2019, Pemerintah telah membangun dan merevitalisasi sekitar 5.000 pasar rakyat dari total 14.182 pasar di seluruh Indonesia. Dari jumlah total pasar dimaksud, sampai dengan November 2019 baru terdapat 37 pasar rakyat yang memperoleh sertifikat SNI Pasar Rakyat dan 20 pasar yang memperoleh bantuan pendampingan dari Kementerian Perdagangan (sumber: data Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik). Kondisi ini mengindikasikan masih sedikitnya pasar yang memiliki manajerial pengelolaan pasar dan lingkungan yang sesuai standar.

Mengingat masih minimnya kualitas pasar rakyat dan dalam rangka meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat, diperlukan upaya yang intensif dalam penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat di tengah maraknya pertumbuhan pasar retail modern.

Terciptanya pasar baru di luar negeri yang lebih efisien bagi produk nasional tidak secara otomatis menghilangkan hambatan

ekspor produk Indonesia di pasar mitra dagang. Kondisi ini diindikasikan dengan adanya trend peningkatan hambatan non-tariff terutama terkait *Technical Barrier to Trade* dan *Sanitary Phyto Sanitary*.

Pada kasus produk pangan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa dan Amerika masih banyak terdapat notifikasi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, data European Commission Rapid Alert System for Food and Feed (EU RASFF) menunjukkan bahwa Indonesia menerima 67 notifikasi dari Uni Eropa. Dari jumlah tersebut, 48% diantaranya terkait dengan produk perikanan serta 25% produk pala. Sementara data US Food and Drug Administration periode tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa terdapat 39 notifikasi terkait ekspor Indonesia ke Amerika, dan 46% diantaranya adalah produk perikanan. Selain itu, banyak perusahaan dari Indonesia yang masih masuk ke dalam daftar merah di USFDA karena belum dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Ketertiban Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik di Bursa Berjangka

Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Besarnya manfaat yang dapat diterima oleh pelaku di dunia usaha dari perdagangan berjangka komoditi perlu didukung dengan adanya kelembagaan penunjang dan pengembangan dalam pembinaan maupun pengawasan transaksi perdagangan berjangka komoditi. Permasalahan dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi salah satunya berupa updating dan upgrade sistem pengawasan transaksi perdagangan berjangka komoditi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pengawasan tidak hanya terhadap pengawasan, tetapi para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

Penegakan aturan dan penindakan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi menjadi kendala lain yang perlu dihadapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang-pialang ilegal yang tersebar maupun situs *website* ilegal menjadi

salah satu masalah dan perlu diberantas. Setidaknya, ada beberapa situs ilegal yang telah diberantas, akan tetapi situs-situs baru tumbuh dari waktu ke waktu. Koordinasi dengan pihak berwajib menjadi penting selain dengan regulator yang berwenang dalam penanganan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha ilegal. Kementerian Perdagangan perlu terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.

Tantangan dalam Peningkatan Ekspor Non-migas dan Jasa

Meningkatkan ekspor merupakan langkah dari memperbaiki neraca perdagangan yang mana menjadi salah satu fokus kebijakan perdagangan. Beberapa dinamika yang mempengaruhi perekonomian global seperti yang telah disinggung sebelumnya diprediksi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja ekspor nasional. Untuk mengatasi tantangan kedepan, diperlukan usaha yang lebih dalam membuka pasar ekspor nasional, terutama ekspor non migas dan jasa. Untuk menemukan peluang pasar ekspor non migas dan jasa potensial serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor perlu dilakukan identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor. Tujuannya agar secara bersama-sama dengan mitra strategis dapat mengimplementasikan peningkatan perdagangan nasional yang berdaya saing. Disamping itu, dalam mengoptimalisasi dan mendorong ekspor non-migas dan jasa perlu dilakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan ekspor. Upaya dalam melindungi industri nasional sekaligus penguasaan pasar ekspor, baik di negara tradisional maupun nontradisional, peningkatan ekspor nonmigas perlu difokuskan pada langkah diversifikasi pasar dan produk ekspor. Ketergantungan terhadap suatu pasar tertentu dapat berdampak negatif ketika terjadi krisis, sehingga perlu dilakukan suatu diversifikasi pasar tujuan ekspor serta pengembangan komoditas yang memiliki daya saing tinggi.

Strategi meningkatkan ekspor non migas dan jasa perlu terus digencarkan Kementerian Perdagangan, dimulai dengan adanya

pembukaan akses dan kerjasama dengan negara-negara pasar non-tradisional, diversifikasi produk ekspor yang berdaya saing hingga promosi ekspor maupun pencitraan. Namun belum terealisasinya penyusunan rancangan kebijakan-kebijakan seperti rancangan kebijakan terkait promosi dan pencitraan dapat menjadi salah satu kendala. Kebijakan terkait peningkatan fasilitas ekspor dan impor serta pengendalian impor yang memiliki dinamika yang cukup intens juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang membidangi sektor-sektor hulu tersebut. Kebijakan tersebut masih terkendala dalam hal teknis dengan instansi terkait, dan masih perlu dilakukannya koordinasi lebih lanjut di internal maupun eksternal Kementerian Perdagangan.

Pemanfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional oleh Pelaku Usaha

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional telah melakukan berbagai macam perundingan perdagangan di berbagai tingkatan baik secara bilateral, regional, internasional maupun forum organisasi. Hasil dari perundingan maupun perjanjian internasional tersebut dapat menjadi pembuka peluang pasar ekspor di negara-negara tujuan maupun menjaga eksistensi Indonesia dalam forum-forum perdagangan. Pemanfaatan diplomasi ekonomi secara optimal melalui percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional (perjanjian internasional hingga tahap disepakati) dapat mendukung peningkatan nilai dan volume ekspor barang dan jasa Indonesia. Sehingga pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional berpengaruh terhadap kinerja neraca perdagangan nasional. Pemanfaatan hasil perundingan kerjasama perdagangan masih dibawah 50% oleh pelaku usaha. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memanfaatkan secara optimal hasil-hasil kerjasama yang telah dibuat untuk kepentingan nasional oleh para pelaku usaha.

Diversifikasi Produk Ekspor

Lesunya perekonomian global berpengaruh terhadap permintaan ekspor nasional. Penurunan permintaan dari negara-negara

mitra dagang utama ekspor Indonesia secara signifikan berpengaruh terhadap nilai ekspor Indonesia. Struktur ekspor nonmigas nasional yang masih didominasi oleh barang berbasis komoditas menjadi tantangan tersendiri. Menurut laporan Bank Indonesia, penurunan pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas tahun ini antara lain selain disebabkan oleh stagnasi perekonomian global, juga disebabkan oleh minimnya diversifikasi produk bernilai tinggi serta dominasi produk komoditas yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Menurunnya harga komoditas dunia, antara lain CPO (nilainya turun 11,4% YoY, sementara volumenya naik 3,2% YoY) serta karet dan produk karet (volume turun 17,6% YoY, nilai turun 8,1% YoY) pada tahun 2018 terbukti mempengaruhi kinerja ekspor non migas nasional. Oleh karena itu, strategi pemerintah dalam lima tahun kedepan salah satunya adalah mendorong diversifikasi produk ekspor dengan meningkatkan kontribusi ekspor komoditas di luar 10 produk utama, terutama mendorong ekspor produk yang bernilai tambah tinggi serta mendorong peningkatan peran Indonesia dalam jaringan produksi global dan rantai nilai global.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan

Keterbatasan kualitas SDM di sektor perdagangan menyebabkan Kementerian Perdagangan menaruh perhatian utama dalam rencana pembangunan sektor perdagangan dalam lima tahun kedepan. Sumber daya manusia sektor perdagangan terbagi menjadi sumber daya manusia sektor perdagangan secara internal dan eksternal. SDM sektor perdagangan internal adalah aparatur Kementerian Perdagangan, sementara SDM sektor perdagangan eksternal adalah para pelaku usaha, calon eksportir, pengelola pasar rakyat, dan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tersebut.

Dalam upaya penanganannya, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan pelatihan terhadap SDM sektor perdagangan secara eksternal, seperti pelatihan pengelola pasar rakyat dan

pelatihan bagi calon eksportir nasional. Selain itu, di bidang kemetrolagian, Kementerian Perdagangan telah membangun Akademi Metrologi. Kedepan, pengembangan SDM Kemetrolagian juga menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Perdagangan. Sementara salah satu tantangan dari SDM sektor perdagangan internal adalah meningkatkan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk membangun nilai-nilai Kementerian Perdagangan yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan juga perlu terus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Pengembangan sumber daya aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan.

Integrasi Data mengenai Perdagangan

Sistem pengelola data dan informasi perdagangan belum berjalan dengan optimal. Faktor penyebabnya karena terdapat beberapa jenis data maupun informasi yang belum tersedia, juga belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi baik di dalam internal Kementerian Perdagangan, antar instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menjadi dasar dari belum optimalnya integrasi data mengenai perdagangan. Peningkatan kualitas informasi dan teknologi perdagangan untuk periode tahun 2020-2024 perlu ditekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi dan data yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di unit-unit ke dalam sistem informasi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan sistem informasi manajemen perdagangan terpadu yang pada

akhirnya akan menghasilkan data terkait perdagangan yang terintegrasi dan dapat diamanatkan dengan baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 yang akan dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya.

2.1 VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

2.2 MISI

Sesui dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan

kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.

Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang

mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Misi 8 "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektivitasnya.

Misi 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan

pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayah-wilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indicator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah

ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0

3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas**; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

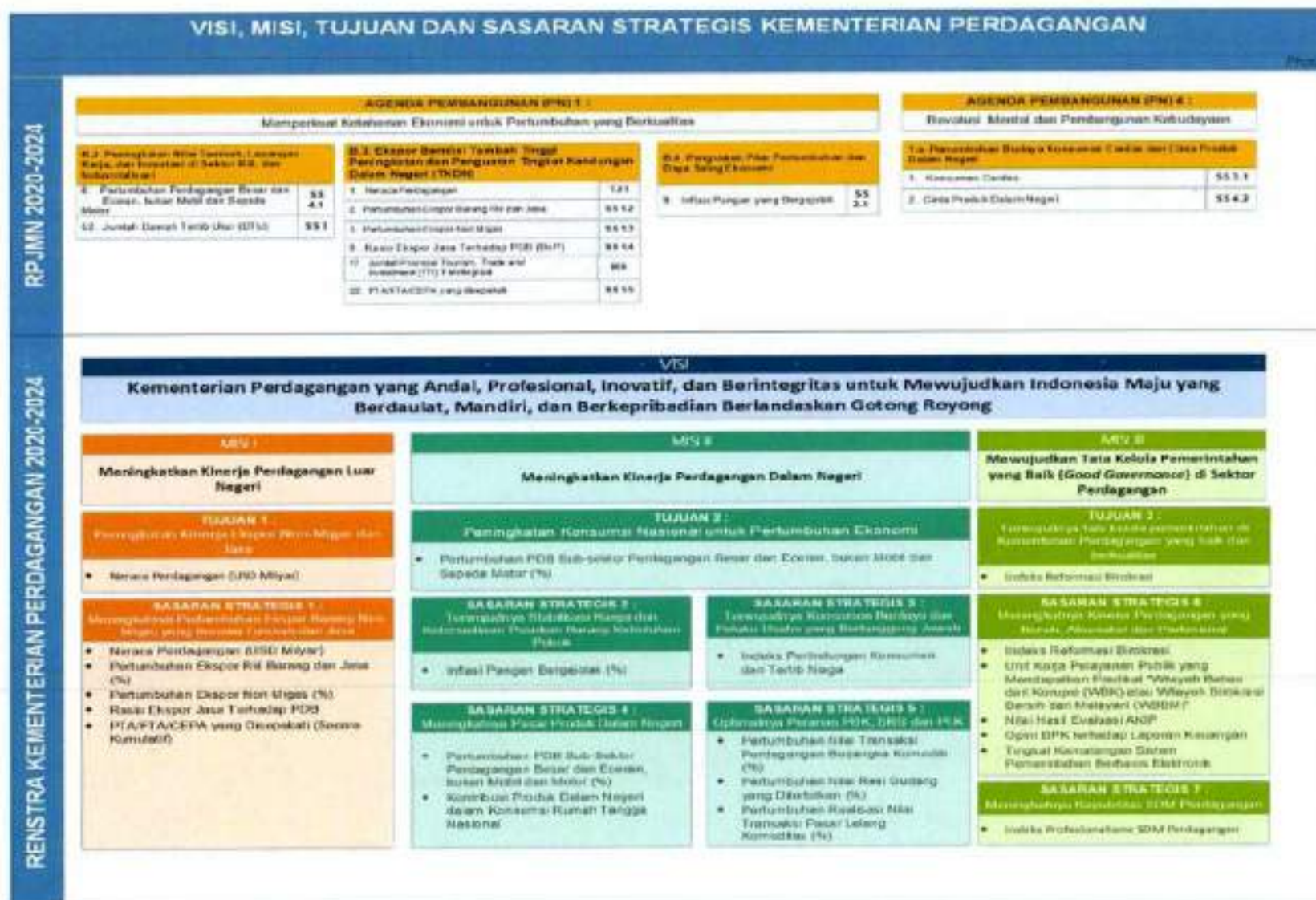
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Sebagai catatan, dalam Renstra ini terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Kementerian Perdagangan.

Gambar 0.10 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024



2.4.1. Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas dan Jasa

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah **Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa** sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Neraca perdagangan;
2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa;
3. Pertumbuhan ekspor barang non migas;
4. Rasio ekspor jasa terhadap PDB; dan
5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati.

Defisit neraca perdagangan sebesar USD 8,7 miliar dan USD 3,2 miliar yang dialami Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 menjadikan hal ini sebagai salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama lima tahun kedepan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, maka target neraca perdagangan kedepan adalah kondisi surplus. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 semula adalah surplus sebesar USD 0,3 miliar dan diharapkan dapat terus tumbuh sehingga tahun 2024 surplus mencapai USD 15 miliar. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi Covid-19, target neraca perdagangan tahun 2020 direvisi menjadi defisit sebesar USD -1,5 miliar.

Kondisi defisit neraca perdagangan yang dialami terutama pada tahun 2019 salah satunya dipicu oleh kontraksi pertumbuhan

ekspor riil barang dan jasa pada tahun tersebut dimana kinerja ekspor riil barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar -0,9% (yoy). Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, Kementerian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa adalah sebesar 3,9% (yoy) pada tahun 2020 dan tumbuh menjadi 6,2% (yoy) pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -14% (yoy).

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didorong melalui pertumbuhan ekspor barang non migas dan pertumbuhan ekspor jasa. Terkait pertumbuhan ekspor non migas, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Perdagangan menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat pada tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor non migas sebesar -4,8% (yoy). Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir serta juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor non migas semula adalah sebesar 5,2% (yoy) pada tahun 2020 dan menjadi 9,3% (yoy) pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekspor non migas tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -13,5% (yoy).

Selain pertumbuhan ekspor barang non migas, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekspor jasa. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebagai salah satu keberhasilan pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, rasio ekspor jasa terhadap PDB semula ditargetkan sebesar 2,8% pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi

3,0% pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target rasio ekspor jasa terhadap PDB tahun 2020 direvisi menjadi sebesar 1,9%.

Aspek penting lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa adalah melalui peningkatan jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 14 perjanjian PTA/FTA/CEPA. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati diharapkan meningkat dari 20 (secara kumulatif) pada tahun 2020 menjadi 40 (secara kumulatif) pada tahun 2024. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi Covid-19, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada tahun 2020 secara kumulatif menjadi 14.

Tabel 0-8

Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah

Indikator	Tahun					
	2020*		2021	2022	2023	2024
	Semula	Menjadi				
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	3,9	-14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	5,2	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0
PTA/FTA/CEPA yang disepakati (secara kumulatif)	20	14	25	30	35	40

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan BPPP (2020)

*Target indikator sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 terdiri dari: (i). Target Semula (berdasarkan RPJMN); dan (ii). Target Menjadi (hasil penyesuaian dampak pandemi Covid-19).

2.4.2. Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, terkait bidang perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
2. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
3. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
4. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi umum dan barang bergejolak selama periode 2015-2019 menjadi salah satu landasan dalam penetapan sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada perencanaan pembangunan perdagangan tahun 2020-2024. Selama 2015-2019, tingkat inflasi umum berada pada angka rata-rata 3,2. Khusus tahun 2019, tingkat inflasi umum berhasil dijaga pada angka 2,72 dengan inflasi barang bergejolak terjaga pada angka 4,30.

Dalam periode 2020-2024, keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok diukur dengan indikator inflasi pangan bergejolak (*volatile food*). Kriteria pangan bergejolak dipilih karena bahan pangan bergejolak secara signifikan berpengaruh positif terhadap pergerakan angka inflasi umum. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024, target inflasi pangan bergejolak pada tahun 2020 diharapkan tercapai pada tingkat 3,2% plus-minus 1% atau sebesar $3,2 \pm 1$ %. Sementara pada tahun 2024, inflasi pangan bergejolak ditargetkan dapat dijaga pada tingkat 3,1%.

Tabel 0-9
Sasaran Strategis Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan
Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi pangan bergejolak (%)	3,2 ± 1	3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	3,1

Sumber: RPJMN 2020-2024

C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab

Latar belakang ditetapkan nya sasaran terwujud nya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari indeks keberdayaan konsumen, indeks tertib ukur, indeks tertib mutu dan indeks tertib niaga. Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dalam rangka mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka target Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahun 2020 adalah sebesar 45 dan menjadi 55 pada tahun 2024.

Tabel 0-10
Sasaran Strategis Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45	48	50	53	55

Sumber: Ditjen. PKTN (2020)

D. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pasar produk dalam negeri, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
2. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Kondisi perekonomian nasional menurut pendekatan lapangan usaha ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain adalah sektor perdagangan yang terdiri dari 2 (dua) sub sektor: (i). Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan (ii). Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan fokus pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, di luar mobil dan sepeda motor sehingga indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Kinerja Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2018 sebesar 4,99% (yoy) dan kemudian sedikit menurun menjadi 4,81% (yoy) pada tahun 2019. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 5,7% – 6,0% per tahun, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 adalah sebesar 4,5% dan tumbuh menjadi 6,0% pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam mengukur peningkatan pasar produk dalam negeri juga digunakan indikator kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional yang menggambarkan tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga secara nasional. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga merupakan nilai konsumsi rumah tangga yang dikurangi dengan nilai konsumsi yang dipenuhi oleh barang yang diimpor dari luar negeri. Indikator ini dihitung secara tahunan agar pengelolaan impor barang-barang konsumsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan realisasi kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional pada tahun 2019 sebesar 94%, maka target dari indikator kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional tahun 2020 adalah sebesar 94% dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2024.

Tabel 0-11 Sasaran Strategis Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0
Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	94	94,3	94,5	94,8	95

Sumber: BPPP (2020)

E. Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditi diharapkan dapat mendorong terjadinya transparansi harga maupun pembentukan harga yang wajar (*fair trade*) dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Sementara sistem resi gudang diharapkan menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi produsen pada saat produksi berlebihan dan harga komoditi mengalami penurunan khususnya komoditi pertanian dan kelautan. Untuk

mencapai sasaran optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), indikator yang digunakan adalah:

1. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan; dan
3. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menggambarkan besarnya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil PBK dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui nilai transaksi PBK dan pertumbuhan nilai transaksi PBK. Semakin tinggi nilai volumenya, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PBK. Target pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tahun 2020 adalah 5% dan menjadi 15% pada tahun 2024.

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan SRG. Target pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan tahun 2020 adalah 5% dan menjadi 14% pada tahun 2024.

Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi PLK. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasi. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK. Target pertumbuhan realisasi nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas tahun 2020 adalah 2% dan tumbuh menjadi 10% pada tahun 2024.

Tabel 0-12
Sasaran Strategis Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)	5	8	10	13	15
Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)	5	7	9	12	14
Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)	2	3	5	7	10

Sumber: Bappebti (2020)

2.4.3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Kementerian Perdagangan Yang Baik Dan Berkualitas

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas adalah:

1. Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional; dan
2. Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

F. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional

Indikator dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional adalah:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP;
4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; dan
5. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Indikator yang merepresentasikan kinerja reformasi birokrasi adalah Indeks reformasi birokrasi yang dinilai dari beberapa kategori penilaian dan hasilnya diberikan dalam bentuk angka. Target indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 76 dan meningkat menjadi 85 pada tahun 2024.

Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” mengindikasikan jumlah unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”. Target yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 unit dan menjadi 4 unit pada tahun 2024.

Nilai Hasil Evaluasi AKIP berkaitan dengan asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang bermakna setiap program atau kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Nilai AKIP ini menjadi cerminan sejauh mana kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh atas penggunaan uang negara. Evaluasi AKIP dinilai dari beberapa kategori dan hasilnya diberikan dalam bentuk simbol Alfabetik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara berurutan, dari urutan penilaian paling rendah, yaitu huruf D, C, CC, B, A dan AA. Target nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun 2020 adalah mencapai predikat BB dan meningkat menjadi predikat A pada tahun 2024.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan menjelaskan dalam pertanggungjawaban anggaran negara, suatu instansi sudah transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya suatu instansi pemerintahan untuk mendapatkan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)’ yang merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan

keuangan negara. Mencapai penilaian WTP mengindikasikan informasi keuangan suatu institusi pemerintah telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan atau sudah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Target opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan sepanjang tahun 2020 – 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjelaskan bahwa proses kerja yang terjadi di instansi pemerintahan bersangkutan sudah efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi. Penilaian SPBE meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Target tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2020 mencapai predikat baik dan menjadi sangat baik pada tahun 2024.

Tabel 0-13
Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85
Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	2	2	3	4
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	A
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

G. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Secara umum peningkatan kapabilitas SDM adalah untuk memastikan bahwa SDM perdagangan adalah orang-orang yang berkualitas dan produktif. Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk mengurangi potensi ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja dan kualifikasi kerja yang dibutuhkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapabilitas SDM sektor perdagangan adalah indeks profesionalisme SDM Perdagangan.

Indeks profesionalisme SDM Perdagangan merupakan suatu indeks komposit yang menjelaskan instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalisme ASN Kementerian Perdagangan, kompetensi ASN perdagangan di daerah, kualitas manajemen usaha peserta pelatihan non ASN, dan kualitas SDM di bidang Pendidikan metrologi. Target indeks profesionalisme SDM Perdagangan adalah mencapai predikat sedang pada tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 0-14
Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Sasaran Strategi Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dilakukan dengan strategi peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter sehingga tercipta SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Strategi dalam pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya).

4. Penyederhanaan Birokrasi

Menyederhanakan birokrasi dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dilaksanakan dengan strategi penyederhanaan prosedur segala bentuk perizinan, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan public untuk kegiatan ekspor, impor, kepabeanan, dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi dalam transformasi ekonomi adalah Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Kelima Arahan Presiden di atas, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal ini dilaksanakan melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Penguatan ini dilakukan melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses

terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan lima tahun kedepan, Kementerian Perdagangan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 terlibat secara khusus dalam pengimplementasian Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; dan Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sebagai landasan utama pembangunan nasional tahun 2020-2024, keterkaitan antara Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam Agenda Pembangunan tergambar sesuai kerangka berpikir pada gambar berikut:

Gambar 0.1 Landasan Utama Pembangunan Nasional 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024

3.1.1. Agenda Pembangunan: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran dari agenda pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah: (i). Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (ii). Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, dan (2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, secara khusus arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kementerian Perdagangan antara lain adalah Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, secara khusus arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kementerian Perdagangan antara lain adalah:

- a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (4) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; dan (2) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi.
- c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (2) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan (3) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

3.1.2. Agenda Pembangunan: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembagalembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Dalam RPJMN 2020-2024, pengimplementasian revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga.

Secara khusus, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kementerian Perdagangan, antara lain adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, melalui pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila yang mencakup penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

3.2 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arah Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

3.2.1.1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

Pengimplementasian ketiga strategi di atas dilakukan antara lain melalui: (i) upaya peningkatan promosi ekspor non-migas dan jasa; (ii) peningkatan pencitraan dan standar produk Indonesia; (iii) peningkatan promosi ekspor dan misi dagang; (iv) optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri dan *export center* di dalam negeri; (v) peningkatan pelayanan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor; (vi) pengamanan perdagangan untuk penyelamatan ekspor; dan (vii) pengelolaan impor untuk mendukung ekspor.

Tabel 0-1 Daftar Pasar Utama dan Pasar Prospektif

1.	RRT	1.	Inggris
2.	Amerika Serikat	2.	Perancis
3.	Jepang	3.	Kanada
4.	India	4.	Meksiko
5.	Singapura	5.	Belgia
6.	Malaysia	6.	Emirat Arab
7.	Filipina	7.	Swiss
8.	Korea Selatan	8.	Federasi Rusia
9.	Thailand	9.	Turki
10.	Vietnam	10.	Polandia
11.	Taiwan	11.	Brasil
12.	Belanda	12.	Swedia
13.	Hongkong	13.	Hongaria
14.	Jerman	14.	Afrika Selatan
15.	Australia	15.	Mesir
16.	Pakistan	16.	Chili
17.	Bangladesh	17.	Argentina
18.	Italia	18.	Aljazair
19.	Spanyol	19.	Nigeria
20.	Arab Saudi	20.	Myanmar

3.2.1.2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA);

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) percepatan penyelesaian perundingan perdagangan

internasional; (ii) peningkatan PTA/FTA/CEPA yang disepakati; (iii) penyelarasan regulasi dengan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional; dan (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2.1.3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan penguatan jaringan distribusi untuk barang kebutuhan pokok, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan
- b. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) optimalisasi pemanfaatan pasar dan gudang; (ii) optimalisasi pemanfaatan gerai maritim dan tol laut; (iii) pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Perdagangan Antar Provinsi; dan (iv) pembinaan dan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

3.2.1.4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bapokting, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
- c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok; (ii) peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok Bersama institusi penegak hukum dan pemerintah daerah; (iii) optimalisasi efektivitas pengelolaan impor barang kebutuhan pokok; dan (iv)

optimalisasi efektivitas kebijakan pengaturan harga kebutuhan pokok.

3.2.1.5. Peningkatan pemberdayaan konsumen

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan edukasi konsumen; dan
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Penguatan regulasi pro-konsumen; (ii) Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan; (iii) Penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen; (iv) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen. Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha.

3.2.1.6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan tertib niaga, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan;
- b. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; (ii) Peningkatan pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen; (iii) Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar; (iv) Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual; (v) Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum.

3.2.1.7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung kebijakan pengamanan pasar dalam negeri, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan pelayanan kemudahan berusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri yang mudah, murah, cepat dan akurat; (ii) peningkatan sinergitas antara pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan; (iii) optimalisasi revitalisasi pasar yang berkualitas, nyaman aman dan bersih; (iv) optimalisasi kegiatan pemasaran produk dalam negeri unggulan yang berkesinambungan; (v) peningkatan kapasitas pelaku usaha (UMKM) melalui pembinaan dan pelatihan usaha; dan (vi) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk pasar dan produk dalam negeri.

3.2.1.8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK melalui: (i) peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi; (ii) peningkatan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK; (iii) peningkatan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK; dan (iv) xc/SRG dan PLK.

3.2.1.9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Dalam rangka mencapai arah kebijakan penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- b. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- e. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan;
- f. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.2.1.10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka mencapai arah kebijakan pelayanan publik yang prima, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; serta
- b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

3.2.1.11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

Dalam rangka mencapai arah kebijakan peningkatan kualitas kebijakan perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan; serta
- b. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.

3.2.1.12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;

- b. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
- c. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

3.2.2. PROGRAM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi nasional serta Kementerian Perdagangan, maka dilakukan penyusunan program⁷⁾ kementerian yang terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen; (2) Program Perdagangan Dalam Negeri; (3) Program Perdagangan Luar Negeri; (4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

⁷⁾ Pada perencanaan dan pelaksanaan program tahun 2020, Kementerian Perdagangan masih mengacu kepada 10 Program.

3.2.2.1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat kesekretariatan, operasional, kepegawaian, dan pengawasan internal yang ditujukan secara umum untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas teknis yang diemban Kementerian Perdagangan yang mencakup hal perdagangan dalam dan luar negeri, beserta kajian-kajian pengembangan. Selanjutnya, tujuan program ini secara khusus diarahkan untuk pencapaian keberhasilan pada sasaran-sasaran peningkatan kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia perdagangan baik ASN maupun Non-ASN.

Arah pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan adalah:

1. **Peningkatan pengelolaan perencanaan** yang berlandaskan pada prinsip anggaran berbasis kinerja dengan melakukan: (a) penajaman *outcome* dan *output* program dan kegiatan; (b)

- melakukan *reviu* perencanaan dan dokumen anggaran; (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan; dan (d) peningkatan *monitoring* dan evaluasi implementasi perencanaan.
2. **Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi** untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan yang profesional dan memiliki integritas, dengan melakukan: (a) peningkatan kapasitas SDM administrasi; (b) peningkatan kapasitas aparatur Kementerian Perdagangan; (c) peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan organisasi.
 3. **Peningkatan pengelolaan keuangan** untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan melakukan: (a) peningkatan kapasitas SDM dalam mengadministrasikan pengelolaan anggaran; (b) peningkatan manajemen pengelolaan anggaran; (c) peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran; dan (d) pengembangan sistem informasi pengelolaan anggaran.
 4. **Pembinaan administrasi dan pelayanan pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan** dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang/jasa serta pelayanan kesehatan Kementerian Perdagangan dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada aparatur Kementerian Perdagangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 5. **Penyusunan perangkat dan pelayanan hukum Bidang Perdagangan** dalam rangka meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, dengan melakukan: (a) perumusan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat administratif maupun bersifat kebijakan publik; (b) penyelesaian *legal opinion* terkait bidang Perdagangan; dan (c) pemberian advokasi/pelayanan hukum dan peningkatan penyusunan

informasi hukum (d) dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

6. **Pengelolaan pendidikan dan pelatihan** dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan di Kementerian Perdagangan dengan melakukan:
 - a. pengembangan standar kompetensi SDM perdagangan termasuk SDM Metrologi dan Penguji Mutu Barang;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan model pelatihan;
 - c. peningkatan kompetensi tenaga dan sertifikasi pengajar internal;
 - d. uji kompetensi SDM perdagangan; (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk pengelolaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis yang bersifat teknis seperti bidang kemetrologian, dan teknis penguji mutu barang serta penyelenggaraan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perdagangan maupun melalui kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil dalam pelayanan disektor perdagangan.
7. **Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian** dalam rangka melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kemetrologian.
8. **Pelayanan informasi publik** dalam rangka meningkatkan persepsi positif Kementerian Perdagangan di mata publik, dengan melakukan: (a) peningkatan kualitas materi informasi; (b) peningkatan pelayanan informasi kepada para pemangku kepentingan; dan (c) optimalisasi kerjasama dengan media dalam mendiseminasikan informasi.
9. **Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor** dalam rangka melaksanakan penanganan isu strategis, pendeteksian isu strategis terkini, penyampaian rekomendasi terhadap isu strategis yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta pemantauan tindak lanjut penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan.

10. **Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia** di Taiwan dalam rangka menyelenggarakan urusan perdagangan di Taiwan sehingga dapat meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Taiwan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan kepentingan global.
11. **Penyelenggaraan Akademi Metrologi** dalam rangka menyelenggarakan pendidikan di bidang metrologi sehingga dapat mendukung ketersediaan tenaga terampil di bidang kemetrologian yang kompeten dan siap kerja.
12. **Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan** dalam rangka melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Kementerian Perdagangan.
13. **Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang** dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan.
14. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan** dalam rangka peningkatan Layanan dan dukungan dalam pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur.
15. **Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan yang** terbagi ke dalam 4 (empat) wilayah dalam rangka mewujudkan Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan.
16. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** dalam kerangka pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian perdagangan.

17. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** dalam kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri.
18. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** dalam kerangka perlindungan konsumen dan tertib niaga.
19. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi.
20. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri.
21. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka perundingan perdagangan internasional.
22. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka pengembangan ekspor nasional.
23. **Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan fokus peningkatan urusan rencana, pemantauan program dan kerjasama, urusan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, urusan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi dalam rangka meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan informasi perdagangan.

Outcome yang diharapkan dari Program Dukungan Manajemen adalah: (i) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik; (ii) Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; (iii) Penguatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja; (iv) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal; (v) Meningkatnya Profesionalisme dan Kemampuan Manajemen Usaha SDM Perdagangan.

3.2.2.2. Program Perdagangan Dalam Negeri

Program Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis mencakup fasilitasi, promosi,

regulasi, advokasi, penetrasi, distribusi, kerjasama, edukasi, pengamanan dan pengawasan yang secara khusus ditujukan untuk pencapaian sasaran-sasaran stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting, peningkatan pasar produk dalam negeri, konsumen berdaya saing dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta optimalisasi peran PBK, SRG, dan PLK melalui pengelolaan dan pengembangan pasar dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Program ini dilakukan untuk mendukung kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan perdagangan berjangka komoditi.

A. Kerangka Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Arah pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri adalah:

1. **Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** melalui penyempurnaan berbagai kebijakan terkait distribusi komoditi di dalam negeri, peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga bahan pokok, ketersediaan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN.
2. **Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan** melalui studi pengembangan sistem logistik nasional, fasilitasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan dan pengembangan sistem informasi sarana logistik perdagangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan dan peningkatan pembinaan serta fasilitasi revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat, dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana perdagnagan khususnya daerah-daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

3. **Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan** melalui berbagai penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang usaha perdagangan, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional, dan pembinaan pelaku usaha di bidang perdagangan.
4. **Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan promosi makanan dan minuman sehat nusantara sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri.
5. **Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah** dengan fokus kegiatan pada peningkatan kualitas logistik daerah, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok, pemetaan sarana distribusi perdagangan dan pelaku jasa logistik di daerah, sosialisasi dan harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, pembinaan usaha kecil dan menengah, fasilitasi pasar murah, perlindungan konsumen di daerah, Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah, dan penggunaan pasar lelang di daerah.

Outcome yang diharapkan dari pengembangan perdagangan dalam negeri adalah: (i). Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok; (ii). Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; (iii). Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan.

B. Kerangka Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Terkait kerangka perlindungan konsumen dan tertib niaga, arah pelaksanaan kegiatan dalam perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah:

1. **Standardisasi dan Pengendalian Mutu** melalui penyusunan rancangan Kebijakan dan NSPK di bidang standardisasi dan

pengendalian mutu, layanan standardisasi dan pengendalian mutu, layanan pembinaan jabatan fungsional penguji mutu barang, Pemantauan Mutu Produk, Pendampingan dan atau monitoring penerapan standar /persyaratan, Edukasi Pemangku Kepentingan terkait Pengendalian Mutu, Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian, Penyediaan Informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis, Kerjasama Internasional di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu, dan peningkatan sarana laboratorium pengujian

2. **Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen** melalui penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK dibidang perlindungan konsumen, edukasi konsumen, edukasi pelaku usaha terkait perlindungan konsumen, memberikan Layanan Pengaduan Konsumen diantaranya dengan melakukan publikasi yang masif, Pembinaan SDM BPSK dan pembinaan SDM lembaga perlindungan konsumen.
3. **Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa** melalui penyusunan rancangan kebijakan dan nspk bidang pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang beredar terhadap produk yang diberlakukan SNI wajib, label, manual kartu garansi, Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis, distribusi dan jasa, peningkatan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, serta penegakan hukum perlindungan konsumen.
4. **Peningkatan Tertib Ukur** melalui penyusunan rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi, Edukasi Kemetrolagian, Penilaian dan Surveillance UML (Unit Metrologi Legal), meberikan Layanan Verifikasi Standar Ukuran, Layanan Verifikasi Standar Ukuran (SNSU), Layanan Perizinan Izin Tipe, Layanan Pengujian UTTP dan Tera Tera Ulang UTTP penanganan khusus, Pengembangan Kompetensi SDM Kemetrolagian, Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML, Meningkatkan peran diplomasi di bidang kemetrolagian, Partisipasi Aktif pada Forum Metrologi Internasional, Kerjasama Kemetrolagian (KSST) serta

pengawasan kemetrolagian terhadap, penegakan hukum dibidang metrologi legal yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dibidang metrologi legal.

5. **Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang** melalui Layanan Pengujian Mutu Barang dan Pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian mutu barang.
6. **Peningkatan Pelayanan Kalibrasi** melalui Layanan kalibrasi dan Pengembangan ruang lingkup kalibrasi.
7. **Peningkatan Pelayanan Sertifikasi** melalui Layanan sertifikasi dan Pengembangan ruang lingkup sertifikasi.
8. **Peningkatan Tertib Niaga** melalui penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga, pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN, Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan, pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan post border, tindak lanjut pengawasan perdagangan, dan layanan pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).
9. **Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional** melalui layanan pengaduan konsumen, pemberian informasi dibidang perlindungan konsumen, dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen.

Outcome yang diharapkan dari perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab.

C. Kerangka Perdagangan Berjangka Komoditi

Terkait kerangka perdagangan berjangka komoditi, arah pelaksanaan kegiatan dalam perdagangan berjangka komoditi adalah:

1. **Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)** melalui penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK, kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK,

pembinaan pelaku usaha PBK, pelaku usaha PBK yang diaudit dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, pelaku usaha PBK yang patuh dalam dalam Pelaksanaan Transaksi dan kegiatan operasional, keuangan dan APU PPT.

2. **Peningkatan pelayanan hukum** melalui penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan PBK, SRG, dan PLK pemberian konsultasi, asistensi, dan pemberian keterangan sebagai saksi/ahli hukum tentang peraturan di bidang PBK dan SRG, Pengenaan sanksi administrasi dan rekomendasi tindak lanjut proses penyidikan atas pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang yang sesuai ketentuan.
3. **Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas** melalui analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang, perizinan pelaku usaha PBK, cakupan komoditi dalam sistem informasi harga, pelatihan teknis pelaku usaha PBK, dan penguatan kompetensi pelaku perdagangan berjangka komoditi.
4. **Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) Dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)** dengan melakukan penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL, peningkatan pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL, pemanfaatan SRG dan PL secara luas, pengawasan SRG, jumlah lembaga SRG dan PLK yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku, jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan resi gudang, jumlah pengguna pasar lelang, dan pilot project gudang SRG dengan *warehouse management system*.

Outcome yang diharapkan dari perdagangan berjangka komoditi adalah meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

3.2.2.3. Program Perdagangan Luar Negeri

Program Perdagangan Luar Negeri terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis mencakup fasilitasi, promosi, regulasi, advokasi, diplomasi, kerjasama, edukasi, proteksi perdagangan yang secara khusus ditujukan untuk pencapaian sasaran peningkatan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor dan impor, penetrasi pasar dan produk, serta perundingan dan pembukaan akses pasar internasional.

Program ini dilakukan untuk mendukung kerangka peningkatan perdagangan luar negeri, perundingan perdagangan internasional, dan pengembangan ekspor nasional.

A. Kerangka Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Arah pelaksanaan kegiatan dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri adalah:

1. **Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan** untuk kepentingan peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan melalui penyusunan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan, layanan penerbitan dokumen ekspor produk pertanian dan kehutanan, fasilitasi kebijakan peningkatan hilirisasi ekspor produk pertanian dan kehutanan, dan fasilitasi kebijakan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan.
2. **Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan** untuk kepentingan peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan melalui penyusunan kebijakan ekspor produk industri, layanan penerbitan dokumen ekspor produk industri dan pertambangan, forum kerjasama dan koordinasi di bidang ekspor produk industri dan pertambangan, penyusunan profil komoditi produk industri dan pertambangan, dan fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi.
3. **Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor** melalui penyusunan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor, layanan

fasilitasi ekspor dan impor melalui intrade, fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan penerapan sertifikasi mandiri, fasilitasi peningkatan akses pasar melalui skema imbal dagang, fasilitasi ekspor dan impor di wilayah perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui fasilitasi pembiayaan perdagangan, dan dukungan terhadap implementasi fasilitasi perdagangan (KNFP).

4. **Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** melalui identifikasi pendelegasian fasilitasi dan perizinan ekspor impor di KEK dan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan di KEK.
5. **Pengelolaan impor** melalui penyusunan kebijakan impor dalam rangka penguatan struktur impor bahan baku dan penolong, kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan pangan nasional, monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border, pelaksanaan kebijakan impor di post border, dan kebijakan impor dalam rangka pengelolaan impor barang konsumsi.
6. **Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar** melalui peningkatan pemberian advokasi dan bimbingan teknis, percepatan penyelesaian kasus-kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan *safeguards* serta penyelesaian kasus sengketa dagang yang dihadapi eksportir Indonesia di negara tujuan ekspor.
7. **Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah** dengan fokus pada optimalisasi kesepakatan perdagangan, fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, fasilitasi promosi dan diklat kepada UKM, FTA Center di Daerah, dan identifikasi potensi ekspor.
8. **Layanan Advokasi Perdagangan** dalam rangka memberikan advokasi berupa penelaahan hukum, konsultasi hukum dan

pendampingan serta tindakan hukum lain dalam penyusunan perjanjian dan kebijakan terkait perdagangan internasional serta sengketa perdagangan internasional.

9. **Penyelidikan kasus dumping dan subsidi** melalui penanganan penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan.
10. **Peningkatan penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguard*)** melalui penanganan penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguard*).

Outcome yang diharapkan dari peningkatan perdagangan luar negeri adalah: (i). Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor, dan (ii). Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor pangan.

B. Kerangka Perundingan Perdagangan Internasional

Terkait kerangka perundingan perdagangan internasional, arah pelaksanaan kegiatan dalam perundingan perdagangan internasional adalah:

1. **Peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional** melalui upaya penurunan hambatan akses pasar di negara mitra, penguatan peran diplomasi perundingan perdagangan internasional, peningkatan kapasitas negosiator perundingan perdagangan internasional di pusat, luar negeri, dan daerah, tindak lanjut perundingan perdagangan internasional, dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional, FTA Center, dan FTA Support Center.
2. **Perundingan perdagangan jasa** melalui peningkatan akses pasar jasa di pasar internasional, peningkatan peran perundingan bidang jasa, dokumen ratifikasi kesepakatan perundingan perdagangan jasa, dan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan jasa.

3. **Perundingan perdagangan multilateral** melalui peningkatan akses pasar barang olahan di fora multilateral, pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di fora multilateral, dan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
4. **Perundingan perdagangan internal dan eksternal ASEAN** melalui peningkatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan mitra ASEAN, penanganan hambatan non-tarif di negara ASEAN dan mitra ASEAN, pemenuhan AEC Score Card, dokumen ratifikasi kesepakatan perundingan ASEAN dan mitra ASEAN, dan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN.
5. **Perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya** melalui peningkatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan Organisasi Internasional, pengembangan tata aturan eksternal yang kondusif bagi lalu lintas perdagangan RI, dan pemahaman dan pemanfaatan perundingan APEC dan Organisasi Internasional.
6. **Perundingan perdagangan Bilateral** melalui peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa di negara mitra serta kerja sama ekonomi dan investasi melalui fora bilateral, dokumen ratifikasi kesepakatan perundingan perdagangan bilateral, pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan bilateral.

Outcome yang diharapkan dari perundingan perdagangan internasional adalah: (i). Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional; (ii). Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional indonesia; dan (iii). Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA.

C. Kerangka Pengembangan Ekspor Nasional

Terkait kerangka pengembangan ekspor nasional, arah pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan ekspor nasional

adalah:

1. **Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor** melalui pendirian pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri, dan pendirian *pilot project pendirian export center*.
2. **Penyelenggaraan Atase Perdagangan** melalui layanan penelitian di bidang perdagangan, layanan data statistik perdagangan, promosi dagang, dan kegiatan pertemuan di bidang perdagangan.
3. **Pengembangan promosi dan citra** melalui promosi dagang dan misi dagang ke negara mitra dagang utama, kegiatan pencitraan, promosi produk dan jasa potensi, persiapan, pelaksanaan dan pasca, CA Expo Nanning China dan penugasan pameran terintegrasi, dan promosi dagang dan misi dagang ke kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur.
4. **Kerjasama pengembangan ekspor** melalui kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor, aktivasi kerjasama pengembangan ekspor, pengembangan kerjasama ekspor sektor jasa, monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama, dan pengembangan kemitraan ekspor ekspor pendukung *global production network*.
5. **Pengembangan produk ekspor** melalui peningkatan peran *Indonesian Design Development Center*, fasilitasi pengembangan produk ekspor, dan pengembangan produk ekspor jasa dan ekonomi kreatif.
6. **Pengembangan SDM bidang ekspor** melalui pendidikan dan pelatihan teknis, dan pelaksanaan *export coaching program*.
7. **Pengembangan pasar dan informasi ekspor** melalui penyebaran informasi dan analisa, layanan *customer service center (export helpdesk)* online/offline, penghargaan pelaku ekspor, pengembangan market place berorientasi ekspor, dan penyebaran informasi dan analisa.
8. **Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)** melalui promosi ITPC, *buyer inquiry*, dan *market intelligence dan co-working space* di pasar potensial.

Outcome yang diharapkan dari pengembangan ekspor nasional adalah meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing.

3.2.2.4. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung dalam hal pengkajian dan pengembangan perdagangan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan perdagangan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan perdagangan, dan penyusunan analisis kebijakan perdagangan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Arah pelaksanaan program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah:

1. **Pengkajian dan pengembangan perdagangan dalam negeri** melalui pengkajian, penelitian dan pengembangan perdagangan dengan fokus kajian bidang sarana dan lembaga perdagangan, bidang logistik, investasi dan fasilitasi usaha, dan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
2. **Pengkajian dan pengembangan perdagangan luar negeri** melalui pengkajian, penelitian dan pengembangan perdagangan dengan fokus kajian bidang ekspor dan impor, pengamanan dan fasilitasi perdagangan;
3. **Pengkajian dan pengembangan kerjasama perdagangan internasional** melalui pengkajian, penelitian dan pengembangan perdagangan dengan fokus kajian terkait kerjasama internasional secara multilateral, regional dan bilateral dan Kerjasama internasional dalam bidang jasa.

Outcome yang diharapkan dari Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah meningkatnya Kualitas pengkajian dan pengembangan perdagangan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Sektor Perdagangan di masa mendatang semakin berperan penting dalam menciptakan daya saing ekonomi nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Untuk itu, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya perlu dilandasi oleh kerangka regulasi agar pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut memiliki kekuatan hukum dalam mengubah perilaku masyarakat dan stakeholder bidang perdagangan.

Amanat peraturan setingkat Undang-undang yang memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain mencakup:

- a) Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 PRP tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 31) menjadi undang-undang;
- b) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- c) Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- d) Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- e) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g) Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang; dan
- h) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam perencanaan pembangunan bidang perdagangan, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting dikarenakan regulasi akan memegang peranan sebagai sarana dalam mengoperasionalkan kebijakan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, keterkaitan

antara fungsi regulasi merupakan satu kesatuan dengan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan kedepan.

Prinsip penyusunan regulasi di Kementerian Perdagangan ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kemudahan berusaha, kemudahan ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan sasaran prioritas Kementerian Perdagangan. Untuk itu selama periode perencanaan 2020-2024 terdapat beberapa bentuk rancangan peraturan yang akan digagas dan untuk disahkan yaitu: (1) terdapat 2 (dua) Undang-undang terkait perdagangan yang akan digagas untuk diperbaharui karena adanya penyesuaian relevansi dengan kondisi saat ini; (2) terdapat 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah yang diperbaharui, dan (3) terdapat 2 (dua) rancangan Peraturan Presiden, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 0-2 Kerangka Regulasi

Tingkatan Peraturan	Nomenklatur Peraturan
Undang-undang	Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah	(i) Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang Metrologi Legal; (ii) Peraturan Pemerintah amanat Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Presiden	Pemberdayaan UMKM
Peraturan Presiden	Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan
Peraturan Presiden	Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kebutuhan untuk mengeluarkan regulasi oleh Kementerian Perdagangan periode perencanaan 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung capaian nasional dan pelaksanaan program-program Kementerian Perdagangan, maka diperlukan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Organisasi yang disusun diharapkan dapat menjawab segala perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional maupun dunia terhadap perdagangan secara efisien dan efektif agar kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan dapat terwujud.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu organisasi kelembagaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam mengelola bidang perdagangan, telah diamanahkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2015. Kementerian Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk ekspor, pasar ekspor serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk ekspor, pasar ekspor serta pengembangan, pembinaan dan

pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk ekspor, pasar ekspor serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh dunsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; serta
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kelembagaan Kementerian Perdagangan telah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang terdiri dari 53 unit setingkat Eselon II. Selanjutnya, didalam Peraturan Presiden terdapat 9 (sembilan) unit Eselon I sebagai unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang serta 4 (empat) staf ahli, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
4. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
5. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;

6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
9. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
10. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
11. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
12. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
13. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Tugas Eselon I Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2016 tersebut dan berdasarkan kelompok Program Kementerian Perdagangan dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Selain Eselon I tersebut diatas, Program Dukungan Manajemen terdapat Sekretariat Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.

B. Program Perdagangan Dalam Negeri

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang,

tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

C. Program Perdagangan Luar Negeri

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor, serta pengamanan perdagangan.
2. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional.
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku ekspor.

D. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan.

E. Non-Program

1. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar.
2. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan jasa dan logistik.

- 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum dan perjanjian internasional.
- 4. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar Lembaga.

Gambar 0.2 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis dijabarkan kepada kinerja Program dan Kegiatan melalui Sasaran, Indikator Kinerja dan Target yang dituangkan selama periode 2020-2024.

4.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui Program Perdagangan Luar Negeri serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.1.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Perdagangan Luar Negeri dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis dimaksud, antara lain: 1) Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing; 2) Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor; 3) Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional; 4) Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional indonesia; 5) Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA. Sedangkan untuk indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

Tabel 0-1
Target Kinerja Program Perdagangan Luar Negeri pada Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Sasaran / Indikator		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing						
Persentase pendampingan (coaching program) yang menjadi eksportir baru (%)	peserta ekspor	13	30	30	32	32
Peningkatan Citra Produk Indonesia (Peringkat Brand	Produk Brand	15	15	15	15	14

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Finance Index)					
Peningkatan Potensi Transaksi Promosi Produk Ekspor (Barang dan Jasa) (%)	0	20	25	27	30
Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor					
Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor (peraturan)	11	11	11	11	11
Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor (%)	75	77	79	81	83
Kepatuhan pelaku usaha dalam Pelaporan melalui INATRADE (perusahaan)	4000	8000	12000	16000	20000
Meningkatnya Layanan dan Fasilitasi Perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator (peraturan)	2	3	3	2	2
Peningkatan jumlah jenis perizinan yang menggunakan Digital Signature (perizinan)	55	60	65	70	75
Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal (%)	90	90	100	100	100
Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan (%)	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan layanan advokasi hukum perdagangan internasional	85	87	90	92	95
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional					
Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)	42	43	44	45	46
Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	6.5	6	5.5	5	4.5
Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional (perjanjian)	0	3	3	3	3
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra (%)	80	80	80	80	80

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA (orang)	681	2.000	2.000	2.000	2.000

4.1.1.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Pengembangan Produk Ekspor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan produk ekspor yang tercermin melalui sasaran meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-2
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor					
Tingkat kepuasan pengguna IDDC (%)	65	70	75	80	85
Persentase Produk Hasil Pendampingan yang Mendapat Potensi Ekspor (%)	0	15	20	25	30
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk Ekspor (%)	0	10	10	10	10

B. Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada kualitas promosi dan kelembagaan ekspor dalam hal ini kinerja dari peran kelembagaan ekspor di dalam dan di luar negeri yang tercermin

melalui sasaran Meningkatnya peran dunia usaha dan kelembagaan ekspor non migas di dalam dan luar negeri dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-3
Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya peran dunia usaha dan kelembagaan ekspor non migas di dalam dan luar negeri					
Jumlah penyelenggaraan pusat promosi di dalam negeri dan luar negeri (Pusat Promosi)	1	7	7	7	7

C. Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan dan peningkatan kinerja dari Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang tercermin melalui sasaran, Meningkatnya promosi dan pasar akreditasi ITPC, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-4
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya promosi dan pasar akreditasi ITPC					
Peningkatan Potensi Transaksi Promosi (%)	10	10	10	10	10
Buyer inquiry	144	144	240	240	336

D. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan pasar dan ketersediaan informasi ekspor yang tercermin melalui sasaran Tersedianya layanan dan informasi bagi pelaku usaha ekspor, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-5
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya layanan dan informasi bagi pelaku usaha ekspor					
Tingkat kepuasan pengguna layanan Customer Service Center	70	75	80	85	90

dan Membership Service (%)					
peningkatan ekspor pelaku usaha penerima penghargaan ekspor	0	5	5	6	6
peningkatan jumlah pengguna data dan informasi pasar ekspor	5	5	5	6	6

E. Pengembangan Promosi dan Citra

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan pelaksanaan promosi dan pencitraan brand indonesia yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya citra Indonesia; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-6 Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Promosi dan Citra

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya citra Indonesia					
Peningkatan aktivasi pencitraan (%)	0	10	10	10	10
Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi					
Jumlah Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	4	8	8	8	8
peningkatan potensi transaksi misi dagang	0	10	10	10	10
peningkatan potensi transaksi pameran dagang lainnya	0	10	10	10	10

F. Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan kerja sama dalam rangka ekspor yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pengembangan ekspor, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-7 Target Kinerja Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kerja sama di bidang pengembangan ekspor					
Jumlah naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor (MoU)	1	5	5	5	6
Jumlah naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor di bidang jasa (MoU)	1	1	1	1	1
Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor (%)	5	10	10	10	10

G. Pengembangan SDM Bidang Ekspor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan kapasitas SDM di bidang ekspor yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi ekspor, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-8 Target Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Bidang Ekspor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi ekspor					
Jumlah peserta Export Coaching Program yang menjadi pelaku usaha siap ekspor (Pelaku Usaha)	15	40	40	42	42
Jumlah peserta pelatihan ekspor (Orang)	1833	3522	3612	3702	3792

H. Dukungan Bidang Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sasaran kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus; dan 2) Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi, dengan kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-9
Target Kinerja Kegiatan Dukungan Bidang Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus					
Pendelegasian fasilitas dan perizinan ekspor impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	3	0	0	0	0
Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi					
Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	1	0	0	0	0
Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan KEK	1	0	0	0	0

I. Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan ekspor untuk produk pertanian dan kehutanan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya ekspor produk pertanian

dan kehutanan yang bernilai tambah; 2) Tersedianya kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang ekspor produk pertanian dan kehutanan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-10

Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah					
Pertumbuhan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah (%)	5	5.25	5.5	5.75	6
Tersedianya kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang ekspor produk pertanian dan kehutanan					
Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan (Peraturan)	6	6	6	6	6
Jumlah penerbitan eksportir terdaftar (ET)	200	200	200	200	200
Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor (SPE)	600	700	800	900	1000
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan (Pelaku Usaha)	250	300	350	400	450

J. Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan ekspor untuk produk industri dan pertambangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah; 2) Tersedianya kebijakan, standarisasi, serta evaluasi dibidang ekspor produk industri dan pertambangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-11 Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah					
Pertumbuhan ekspor produk industri manufaktur (%)	5	5.25	5.5	5.75	6
Pertumbuhan ekspor produk pertambangan yang bernilai tambah (%)	5	5.25	5.5	5.75	6

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya kebijakan, standarisasi, serta evaluasi dibidang ekspor produk industri dan pertambangan					
Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertambangan	3	3	3	3	3
Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk industri	2	2	2	2	2
Jumlah penerbitan eksportir terdaftar (ET)	20	20	20	20	20
Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor (SPE)	600	600	600	600	600

K. Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan fasilitas perizini untuk ekspor dan impor yang tercermin melalui sasaran meningkatnya fasilitas ekspor dan impor yang cepat dan transparan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-12 Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya fasilitas ekspor dan impor yang cepat dan transparan					
Penyusunan Rumusan Kebijakan terkait Fasilitas Ekspor dan Impor	4	3	3	3	3
Jumlah eksportir yang ditetapkan sebagai eksportir bersertifikasi mandiri	1000	1200	1400	1600	1800
Peningkatan volume ekspor barang yg menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional*)	4500 USD 3.8jt	4725 USD 3.99jt	4961 USD 4.19jt	5209 USD 4.4jt	5470 USD 4.62jt
Jumlah rumusan kebijakan fasilitas perdagangan luar negeri pada kawasan ekonomi khusus dan kawasan lainnya	13	16	19	22	25
Mou imbal dagang dalam pelaksanaan ekspor	1	1	1	1	1
Peningkatan Pelayanan kepada Eksternal maupun internal Kemendag pada sistem INATRADE	100	100	100	100	100
Mendorong peningkatan implementasi fasilitas perdagangan dari notifikasi kategori B menjadi A untuk dua aspek yaitu Risk Management dan Advance Ruling pada Kementerian Perdagangan	50	100	100	100	100

Catatan : *) lihat Lampiran matriks kinerja pembangunan

L. Pengelolaan Impor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan perijinan dan kebijakan impor yang mendukung pada pertumbuhan ekspor barang non-migas dan jasa melalui sasaran Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-13 Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Impor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal					
Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor yang harmonis dengan kebijakan nasional	15	15	15	15	15
Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	8500	8500	8500	8500	8500
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor	500	500	500	500	500
Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor	7	7	7	7	7

M. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengamanan dan perlindungan akses pasar ekspor dari hambatan perdagangan yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya upaya pembelaan dalam penanganan kasus hambatan perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-14

Target Kinerja Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya upaya pembelaan dalam penanganan kasus hambatan perdagangan					
Jumlah submisi pembelaan dalam rangka pengamanan akses pasar ekspor (Submisi)	29	31	33	35	37

N. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan fasilitas perdagangan luar negeri di daerah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya upaya pembelaan dalam penanganan kasus

hambatan perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-15
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya peran daerah dalam fasilitasi ekspor dan impor					
Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Fasilitas perdagangan luar negeri daerah (Laporan)	4	4	4	4	4
Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah (Jenis)	1	1	1	1	1
Meningkatnya kualitas pelaku usaha ekspor di 34 provinsi					
Pelaku usaha di daerah yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ekspor (Pelaku Usaha)	68	68	68	68	68
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi					
Fasilitasi promosi dan diklat ekspor (UKM)	500	500	500	500	500
Tersedianya informasi produk potensial daerah (Buku)	34	34	34	34	34
Pemanfaatan FTA center (Laporan)	1	1	1	1	1

O. Layanan Advokasi Perdagangan

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-16
Target Kinerja Kegiatan Layanan Advokasi Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat					
Persentase pemanfaatan dokumen non litigasi (%)	75	75	80	85	90
Persentase penyelesaian dokumen litigasi dalam rangka sengketa perdagangan internasional (%)	100	100	100	100	100
Kepuasan stakeholders atas layanan advokasi perdagangan internasional (%)	80	80	80	80	80

P. Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penyelidikan terhadap Kasus Dumping dan Subsidi yang tercermin melalui

sasaran Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-17

Target Kinerja Kegiatan Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku					
Melakukan penyelidikan Kasus Anti Dumping dan Tindakan Imbalan (analisa data impor, asistensi, pra penyelidikan, penyelidikan, rekomendasi penyelidikan) (Kasus)	8	9	10	11	12
Melakukan analisa dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) (Laporan)	1	1	1	1	1
Rancangan kebijakan ketentuan Anti Dumping (Laporan)	1	1	1	1	1

Q. Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)

Kegiatan memiliki fokus kepada penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan (*Safeguard*) yang tercermin melalui sasaran meningkatnya kualitas penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-18

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku					
Jumlah Penanganan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguards) (Kasus)	5	7	8	9	10
Jumlah Daerah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Daerah)	10	11	11	11	11
Jumlah Laporan Hasil Analisa Terhadap Indikasi Pelonjakan Volume Impor (Laporan)	1	1	1	1	1
Jumlah asistensi (Asistensi)	5	8	9	10	11

R. Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan pemanfaatan hasil perundingan kepada *stakeholder* yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-19

Target Kinerja Kegiatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra					
Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff) (Pos Tarif)	500	500	500	500	500
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional					
Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	5	5	5	5	5
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	150	1,000	1,000	1,000	1,000
Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	601	1,000	1,000	1,000	1,000

S. Perundingan Perdagangan Jasa

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional yang berkaitan dengan jasa yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional; 2) Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional; 3) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-20 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional					
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	6	20	20	20	20

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
(Perundingan)					
Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional					
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa (Dokumen)	2	10	10	10	10
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani (Dokumen)	0	4	4	4	4
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	0	79	81	83	85

T. Perundingan Perdagangan Multilateral

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora multilateral yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral; 2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa; dan 3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-21 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Multilateral

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral					
Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)	100	100	100	100	100
Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa					
Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang (%)	80	80	80	80	80
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral					

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	0	79	81	83	85

U. Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora ASEAN dan Mitra ASEAN yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-22

Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional					
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional (Perundingan)	50	70	80	80	80
Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN (%)	5	5	5	5	5
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) (%)	75	80	85	85	85
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	77	79	81	83	85

V. Perundingan Perdagangan Bilateral

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora bilateral yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar

barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-23 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Bilateral

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional					
Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral (Perundingan)	7	7	7	7	7
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral (%)	77	79	81	83	85

W. Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora APEC dan Organisasi Internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional; 2) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dan 3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-24
Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	4	4	5	5	6
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional					

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani (%)	80	80	80	80	80
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional					
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral (%)	77	79	81	83	85

X. Penyelenggaraan Atase Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penguatan peran atase perdagangan dalam diplomasi ekonomi melalui sasaran Terselenggaranya atase perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-25 Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Atase Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya atase perdagangan					
Laporan intelijen bisnis (Laporan)	25	25	25	25	25
promosi dagang luar negeri yang diikuti (Promosi)	100	100	100	100	100
keturutsertaan dalam pertemuan antar pemerintah negara di bidang perdagangan (Pertemuan)	52	52	52	52	52

4.1.2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui: 1) Program Dalam Negeri; dan 2) Program Perdagangan Luar Negeri serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.2.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Dalam Negeri dalam mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud, adalah Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan indikator kinerja terlampir pada Tabel IV-23 Sedangkan, untuk *Outcome* (Sasaran) pada Program Perdagangan Luar Negeri yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis

dimaksud, adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan impor pangan dengan indikator kinerja terlampir pada Tabel IV-24.

Tabel 0-26
Target Kinerja Program Perdagangan Dalam Negeri Pada Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok					
Stabilitas harga bapok antar waktu (%)	6	6	5,9	5,9	5,9

Tabel 0-27
Target Kinerja Program Perdagangan Luar Negeri Pada Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor pangan					
Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional (%)	100	100	100	100	100

4.1.2.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tercermin melalui sasaran terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-28
Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting					
Stabilitas harga bapok hasil pertanian pangan antar waktu	3.0	3	2.9	2.9	2.9
Stabilitas harga bapok hortikultura antar waktu	24.0	24	23	23	23
Stabilitas harga bapok hasil industri antar waktu	5	5	4.9	4.9	4.9

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Stabilitas harga bapok hasil peternakan dan Perikanan antar waktu	6	6	5.9	5.9	5.9

B. Pengelolaan Impor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan impor yang tercermin melalui sasaran terciptanya ketersediaan pasokan bahan pangan yang cukup pada hari-hari besar keagamaan nasional melalui kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

*Tabel 0-29
Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Impor*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terciptanya ketersediaan pasokan bahan pangan yang cukup pada hari-hari besar keagamaan nasional melalui kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional					
Jumlah kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional (Kebijakan)	4	4	4	4	4

4.1.3. Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui Program Perdagangan Dalam Negeri serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.3.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Perdagangan Dalam Negeri yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud adalah meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab. Adapun indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut:

Tabel 0-30

Target Kinerja Program Perdagangan Dalam Negeri pada Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab					
Indeks Keberdayaan Konsumen	42	43	44	45	46
Indeks Tertib Ukur	55	59	64	68	72
Indeks Tertib Mutu	36	39	41	46	48
Indeks Kendali Mutu	46	49	53	57	62
Indeks Tertib Niaga	51	55	59	63	66

4.1.3.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatkan Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen; 3) Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Konsumen; 4) Meningkatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-31

Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen					
Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian (%)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen saat Pembelian (%)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen					
Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif (%)	60	60	65	65	70
Persentase Pemahaman SDM LPKSM	50	55	60	65	70

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Teredukasi Terkait Standar Perlindungan Konsumen (%)					
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen					
Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	90	91	91	92	92
Tingkat Implementasi Online Dispute Resolution (%)	20	30	40	50	90
Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif					
Persentase BPSK yang Aktif (%)	50	50	55	55	60
Persentase Pemahaman SDM BPSK Teredukasi Terkait Pelayanan BPSK (%)	80	80	80	80	80

B. Peningkatan Tertib Ukur

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan tertib ukur dari kegiatan perdagangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian; 2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolgian; 3) Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolgian; 4) Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional; 5) Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian; 6) Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-32 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian					
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum (%)	60	65	70	75	80
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolgian					
Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kemetrolgian (Indeks)	25	30	35	40	45
Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolgian					
Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU) (DTU)	1	15	10	10	10
Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional					
Persentase Ketertelusuran Standar Nasional (%)	60	65	70	75	80
Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional (%)	60	65	70	75	80
Persentase Ketertelusuran Standar Unit Metrologi Legal (UML) (%)	40	45	50	55	60
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian					

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrolagian (Negara)	0	2	2	2	2
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional					
Skor Zona Integritas (ZI)	83	83.25	83.5	83.75	84

C. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen; 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-33

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen					
Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan (%)	100	100	100	100	100
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen					
Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen					
Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK (%)	20	20	20	20	20
Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan (%)	40	43	46	48	50

D. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan layanan pengujian mutu barang bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-34
Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang					
Persentase Kepuasan Pelanggan(%)	88	88	88	88	88

E. Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penerapan standar mutu produk serta pelayanan publik terkait pengendalian mutu yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis; 2) Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian; 3) Meningkatnya efektivitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis; dan 4) Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-35 Target Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis					
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan (Pelaku Usaha)	3	3	4	4	5
Persentase Produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis (%)	70	70	71	71	71
Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian					
Persentase Pembinaan LSPro yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat Kompetensinya (%)	0	100	100	100	100
Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi (%)	94	95	95	96	96
Meningkatnya efektivitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis					
Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/dimplementasikan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS (Orang)	100	115	130	145	160
Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu					
SLA Dit. Standalitu (%)	81	82	83	84	85
Persentase Kepuasan Pelanggan (%)	88	88	88	88	88

F. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan layanan kalibrasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-36 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi					
Persentase Kepuasan Pelanggan(%)	88	88	88	88	88

G. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan layanan kalibrasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-37 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi					
Persentase Kepuasan Pelanggan (%)	88	88	88	88	88

H. Peningkatan Tertib Niaga

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengawasan kegiatan perdagangan dan penegakan hukum di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan; 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-38 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan					
Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan (%)	75	80	85	90	95

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa (%)	20	25	30	35	40
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan					
Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan (%)	75	80	85	90	95
Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan					
Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan (%)	5	30	30	30	30
Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif (%)	18	50	60	70	80

I. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penguatan peran kelembagaan perlindungan konsumen nasional (BPKN) yang tercermin melalui sasaran Meningkatkan Transaksi dan Efektivitas Perlindungan dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-39
Target Kinerja Kegiatan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Transaksi dan Efektivitas Perlindungan					
Persentase Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah yang Dimanfaatkan (%)	20	20	20	20	20
Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang Disebarluaskan (%)	100	100	100	100	100
Persentase Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan (%)	35	35	35	35	35
Persentase Keberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen (%)	25	25	25	25	25

4.1.4. Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui Program Perdagangan Dalam Negeri serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.4.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Perdagangan Dalam Negeri yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud, antara lain: 1) Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; 2) Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan. Indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

Tabel 0-40
Target Kinerja Program Perdagangan Dalam Negeri Dalam Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern (%)	-	82	83	84	85
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan					
Pertumbuhan UMKM yang memasarkan produk melalui perdagangan melalui sistem elektronik (%)	5	5	5	5	5
Peningkatan omzet pedagang pasar rakyat yang sudah di revitalisasi (%)	-	20	20	20	20

4.1.4.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-41
 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri					
Kemitraan pemasaran produk dalam negeri (%)	20	20	20	20	20
Pelaku usaha UMKM yang meningkat kapasitasnya (%)	20	20	20	20	20

B. Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pembinaan usaha bagi pelaku usaha distribusi perdagangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain : 1) Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan aparatur di bidang perdagangan; 2) Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-42
 Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan aparatur di bidang perdagangan					
Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik (Fasilitator)	130	200	200	200	200
Pertumbuhan waralaba dalam negeri (%)	5	5	5	5	5
Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan bimbingan teknis di bidang usaha perdagangan dalam negeri (orang)	2000	4000	6000	8000	10000
Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri					
Jumlah penyusunan peraturan terkait kebijakan usaha Perdagangan (Peraturan)	4	6	6	6	6
Jumlah dokumen pemenuhan komitmen melalui sistem perizinan online bidang perdagangan dalam negeri (Dokumen)	2000	4000	6000	8000	10000

C. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah yang tercermin melalui sasaran, antara lain :

1) Meningkatnya ketersediaan data dan pengembangan dan kegiatan Perdagangan dalam Negeri di daerah; 2) Meningkatnya perlindungan konsumen dan standarisasi mutu di daerah; dan 3) Meningkatnya penggunaan pasar lelang di daerah, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-43

Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan data dan pengembangan dan kegiatan Perdagangan dalam Negeri di daerah					
Jumlah data dan informasi perdagangan dalam negeri (Daerah)	34	34	34	34	34
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pasar murah (Daerah)	34	34	34	34	34
Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah (Daerah)	-	34	34	34	34
Meningkatnya perlindungan konsumen dan standarisasi mutu di daerah					
Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen di daerah (Daerah)	34	34	34	34	34
Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu di daerah (Daerah)	-	27	27	27	27
Meningkatnya penggunaan pasar lelang di daerah					
Jumlah pengguna pasar lelang di daerah yang berpartisipasi (Pelaku)	-	464	502	547	596

D. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penguatan dan pengembangan sarana perdagangan yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Sistem dan Sarana Perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-44
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Sistem dan Sarana Perdagangan					
Pembangunan sarana perdagangan yang sesuai dengan perencanaan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah pasar yang menggunakan teknologi informasi (pasar)	-	5	5	5	5
Pembangunan Gudang di Pasar Rakyat (unit)	-	3	3	3	3
Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan antar pulau yang melaporkan manifest domestik (%)	-	50	50	50	50

4.1.5. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK)

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui Program Perdagangan Dalam Negeri serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.5.1. Program Perdagangan Dalam Negeri

Outcome (Sasaran) pada Program Perdagangan Dalam Negeri yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud adalah meningkatnya implementasi pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 0-45
Target Kinerja Program Dalam Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas					
Pertumbuhan Implementasi PBK (%)	2	4	10	12	14
Pertumbuhan Implementasi SRG (%)	16	16	21	28	35

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Jumlah Pengguna Implementasi PLK (%)	6	12	16	20	25
Indeks Kepuasan Layanan Publik	75	78	80	83	85
Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (%)	75	78	80	83	85
Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi (%)	75	78	80	83	85

4.1.5.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengawasan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang PBK yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-46
Target Kinerja Kegiatan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi					
Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi (Perusahaan)	45	47	50	52	54
Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional Keuangan dan APU PPT (Perusahaan)	54	57	60	62	63
Persentase pelaku usaha yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit (%)	60	73	75	77	80

B. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang tercermin

melalui sasaran Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-47

Target Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas					
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang (Pelaku)	50	52	55	59	64
Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi (Pelaku)	200	464	502	547	596
Persentase pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK (%)	70	75	80	85	90
Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional (Lembaga)	50	52	54	58	60
Jumlah daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS) (Daerah)	6	12	17	22	27
Peningkatan Ekspor melalui instrumen SRG (%)	2	3	5	7	10

C. Peningkatan Pelayanan Hukum

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pelayanan hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang tercermin melalui Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-48 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas					
Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik (Peraturan)	7	11	12	12	12
Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang sesuai	70	94	94	94	94

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
ketentuan (Dokumen)					
Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK (Dokumen)	27	37	37	37	37
Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK (Dokumen)	10	15	15	15	15

D. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pembinaan dan pengembangan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang PBK, SRG dan PLK yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-49
Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG, dan PLK

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas					
Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan (Analisis)	5	7	7	8	8
Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK (Ijin)	550	600	650	750	800
jumlah akses platform layanan informasi harga (Akses)	10000	10000	11000	11000	12000
Persentase pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (%)	70	75	80	85	90
Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan izin sebagai wakil pialang berjangka (%)	82	84	86	88	90

4.1.6. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui: 1) Program Dukungan Manajemen; 2) Program Perdagangan Dalam Negeri; 3) Program Perdagangan Luar Negeri; dan 4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta target kinerja kegiatan dibawahnya yang berkaitan dengan kinerja reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan, yaitu:

4.1.6.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Dukungan Manajemen yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik; (2) Meningkatkan birokrasi yang transparan , akuntabel dan bersih; (3) Penguatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja; dan (4) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal, dengan indikator kinerja terlampir pada Tabel IV-46 dibawah.

Outcome (Sasaran) pada Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud, adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan perdagangan, dengan indikator kinerja terlampir pada Tabel IV-47 di bawah.

Tabel 0-50

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik					
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi	70	70	70	70	70
Persentase Pelayanan Informasi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan	95	95	95	95	95
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih					
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	A	A	A
Opini BPK Terhadap Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Keuangan					
Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91	92	92	93	93
Persentase unit kerja yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	100	100	100	100	100
Persentase satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100	100	100	100	100
Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100	100	100	100	100
Persentase kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	98	98	100	100	100
Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	1	2	2	2
Penguatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja					
Skor capaian area perubahan penataan dan penguatan organisasi	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Indeks penerapan merit sistem	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Persentase ASN Perdagangan Daerah yang kompeten	81	81	81	82	82
Persentase Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi	50	60	70	75	80
Indeks Pelayanan Kepegawaian	90	90	90	90	90
Peningkatan Perbaikan Manajemen Usaha Perdagangan Peserta Pelatihan	5	5	6	6	6
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal					
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan	30	25	20	15	10
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	85	85	85	85	85
Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	100	100	100	100	100

Tabel 0-51
 Target Kinerja Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 Dalam Mendukung Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih,
 Akuntabel, dan Profesional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengkajian dan pengembangan perdagangan					
Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan	70	70	70	70	75
Persentase hasil kajian yang dipublikasikan	60	62	64	66	70
Persentase kepuasan stakeholder terhadap kinerja BPPP	70	70	75	75	80

4.1.6.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada efektivitas pada perencanaan, penganggaran, koordinasi dan Kerjasama yang tercermin melalui sasaran meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, koordinasi dan Kerjasama kementerian perdagangan dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-52 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Kerjasama Kementerian Perdagangan					
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan	BB	BB	A	A	A
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setjen Kementerian Perdagangan	BB	A	A	A	A
Persentase Unit Kerja Yang Mengimplementasikan Kerja Sama	65	70	75	80	85

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang tercermin melalui sasaran meningkatnya efektifitas organisasi dan kinerja ASN kemendag, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-53
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas organisasi dan kinerja ASN Kemendag					
Persentase kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan prosedur	50	60	70	75	80
Persentase tindak lanjut kebijakan organisasi dan kepegawaian yang ditetapkan	75	75	75	75	75
Indeks Pelayanan Kepegawaian	90	90	90	90	90
Persentase pejabat Kemendag yang memenuhi kompetensi	60	65	70	75	80
Persentase jumlah penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	90	90	90	90	90
Persentase pegawai dengan bobot nilai 5 pada dimensi disiplin untuk Indeks Profesional ASN	80	80	80	80	80
Persentase pegawai dengan bobot nilai minimal 25 pada dimensi disiplin untuk Indeks Profesional ASN	75	80	85	88	90

C. Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan keuangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel; 2) terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran kementerian perdagangan yang sesuai peraturan; 2) Terlaksananya Pembinaan Pengelola Keuangan Kementerian Perdagangan; dan 3) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan yang Tertib dan Akuntabel dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-54 Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Akuntabel					
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan	3	3	3	3	3
Terwujudnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan yang Sesuai Peraturan					
Indikator Kinerja Pelaksanaan	90	90	90	90	90

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran Kementerian Perdagangan					
Terlaksananya Pembinaan Pengelola Keuangan Kementerian Perdagangan					
Persentase Pengelola Keuangan Bersertifikasi Kementerian Perdagangan	50	55	60	65	70
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan yang Tertib dan Akuntabel					
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan	4	4	4	4	4
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan	7	7	7	7	7

D. Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan dan pelayanan tugas Kementerian Perdagangan yang tercermin melalui sasaran efektifitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-55

Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan					
Indeks Kepuasan pemenuhan kebutuhan operasional di lingkungan Kemendag	60	65	70	75	80

E. Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan terhadap penyusunan perangkat dan pelayanan hukum bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran antara lain: 1) Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan; 2) Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan 3) Terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi unit kerja, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-56

*Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum
Bidang Perdagangan*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan					
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan	95	95	95	95	95
Jumlah jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tepenuhi angka kreditnya	2	2	2	2	2
Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
Persentase pelayanan dan bantuan hukum yang ditangani	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian legal opinion, MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
Terlaksananya penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja					
Nilai predikat WTA	75	75	75	75	75

F. Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan memiliki fokus kepada dukungan terhadap pelayanan informasi bagi *stakeholder* dan masyarakat yang tercermin melalui sasaran antara lain: 1) Meningkatnya Persepsi Positif Kementerian Perdagangan di Mata Publik; 2) Terlaksananya penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-57 Target Kinerja Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Persepsi Positif Kementerian Perdagangan di Mata Publik					
Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan	70	70	70	70	70
Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Perdagangan di Media	70	70	70	70	70
Persentase SDM Jabatan Fungsional Pustakawan dan Pranta Humas yang terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan kebutuhan	70	70	75	75	75
Terlaksananya penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja					
Nilai predikat WTA	70	70	70	70	70

G. Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan terhadap penanganan isu strategis perdagangan yang tercermin melalui sasaran antara lain: 1) Tersedianya rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan; 2) Terwujudnya kolaborasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-58

Target Kinerja Kegiatan Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan					
Jumlah rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan	6	6	6	6	6
Terwujudnya kolaborasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan					
Persentase rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang disampaikan kepada stakeholder	100	100	100	100	100
Jumlah laporan capaian Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP)	4	4	4	4	4
Persentase monitoring laporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	80	80	80	80	80
Jumlah laporan monitoring capaian kegiatan yang mendukung sasaran Kementerian Perdagangan	3	3	3	3	3

H. Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penyelenggaraan kantor dagang ekonomi indonesia di taiwan melalui sasaran antara lain: 1) Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia; 2) Meningkatnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Taiwan Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Nasional dan Kepentingan Global, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-59
Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia					
Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan KDEI (Gedung)	1	1	1	1	1
Meningkatnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Taiwan Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Nasional dan Kepentingan Global					
Penyelenggaraan Promosi Perdagangan (Promosi)	6	6	6	6	6
Jumlah Bisnis Intelligence (Laporan)	6	6	6	6	6
Penanganan Hambatan Perdagangan (Kegiatan)	1	1	1	1	1
Persentase Peningkatan Aktivitas Perdagangan Indonesia -Taiwan (%)	5	5.3	6.6	8.3	10.4
Jumlah Kerjasama Kesepakatan Industri (Kesepakatan)	3	3	3	3	3
Jumlah Forum Trade, Tourism and Investment (TTI) (Kegiatan)	7	7	8	8	9
Jumlah Kerjasama Industri tour operator dan travel agent (JOINT PROMOTION OF INDONESIA TOURISM) (MoU)	8	10	12	14	16
Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pasar Taiwan (Promosi)	12	12	12	12	12
Persentase Penanganan PMI (%)	70	70	75	75	75
Jumlah Pembinaan WNI (Kegiatan)	12	12	12	12	12
Persentase Penyelesaian Dokumen Keimigrasian (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Dokumen Kekonsuleran (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Kasus WNI (Non-PMI resmi) (%)	50	60	70	75	80
Jumlah Kerja Sama Sosial Budaya (MoU)	1	1	1	1	1

I. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada layanan dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana melalui sasaran efektifitas layanan dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana. Indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 0-60
Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana					
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Perdagangan	60	65	70	75	80

J. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pelayanan dan pengembangan sistem informasi melalui sasaran terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-61
Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi					
Tata kelola TIK yang handal dan terpadu (Kebijakan)	1	1	1	1	1
Layanan data yang berkualitas (%)	91	92	93	94	95
Sistem informasi perdagangan yang terintegrasi (Aplikasi)	5	8	11	14	17
Layanan TIK yang handal (%)	94	95	96	97	98
SDM TIK yang berkinerja sesuai kebutuhan (%)	45	55	65	70	75

K. Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) terwujudnya laporan hasil pengawasan internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja; dan 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-62

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja					
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat I	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat I	30	25	20	15	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan					
Persentase unit kerja binaan Inspektorat I yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	100	100	100	100	100
Persentase satker binaan Inspektorat I yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100	100	100	100	100
Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat I yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100	100	100	100	100

L. Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) terwujudnya laporan hasil pengawasan internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja; dan 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-63 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja					
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat II	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada	30	25	20	15	10

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Binaan Inspektorat II					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan					
Persentase unit kerja binaan Inspektorat II yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	100	100	100	100	100
Persentase satker binaan Inspektorat II yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100	100	100	100	100
Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat II yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100	100	100	100	100

M. Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) terwujudnya laporan hasil pengawasan internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja; dan 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-64 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja					
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat III	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat III	30	25	20	15	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan					
Persentase unit kerja binaan Inspektorat III yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	100	100	100	100	100
Persentase satker binaan Inspektorat III yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100	100	100	100	100

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat III yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100	100	100	100	100

N. Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV

Kegiatan memiliki fokus kepada pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) terwujudnya laporan hasil pengawasan internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja; dan 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-65 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja					
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat IV	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat IV	30	25	20	15	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan					
Persentase unit kerja binaan Inspektorat IV yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	100	100	100	100	100
Persentase satker binaan Inspektorat IV yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100	100	100	100	100
Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat IV yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100	100	100	100	100

O. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan manajemen dari kegiatan pengawasan internal aparatur kementerian perdagangan yang tercermin melalui sasaran,

antara lain: 1) Terwujudnya layanan dukungan teknis pengawasan yang efektif; dan 2) Terwujudnya dukungan layanan internal organisasi yang efektif, akuntabel, dan transparan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-66
Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya layanan dukungan teknis pengawasan yang efektif					
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	75	85	85	85	85
Persentase Layanan Reviu dokumen anggaran, RK-BMN, Laporan Kinerja dan Laporan keuangan Unit yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Persentase Sosialisasi Penegakan Integritas yang dipahami oleh minimal 75% peserta	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	100	100	100	100	100
Persentase kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	98	98	100	100	100
Terwujudnya dukungan layanan internal organisasi yang efektif, akuntabel, dan transparan.					
Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	2 1	2	3 2	4 2
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	80	81	82	83	84
Persentase SDM Itjen yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	25	25	25	25
Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal	92	92	92	92	92
Persentase Sistem Pengawasan berbasis Teknologi Informasi yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100

P. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya **Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan**

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan manajemen dari kegiatan pengkajian dan pengembangan perdagangan yang tercermin melalui sasaran, antara lain: Tersedianya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh

satuan organisasi dilingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-67

*Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan					
Persentase hasil kajian yang dipublikasikan	60	62	64	66	70
Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja BPPP	70	70	75	75	80
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPP	70	71	72	73	75

Q. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen PEN, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-68

*Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen PEN*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen PEN					
Persentase publikasi positif terkait kegiatan Kementerian Perdagangan bidang Pengembangan Ekspor Nasional (%)	80	80	80	80	80
Persentase realisasi pengelolaan keuangan sesuai dokumen perencanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (%)	90	90	90	90	90
Nilai evaluasi implementasi	80	80	80	80	80

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Nilai)					
Persentase SDM Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang memperoleh nilai SKP dalam kategori "Baik"	95	95	95	95	95

R. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-69

Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri					
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal	5	5	5	5	5
Jumlah koordinasi dan sosialisasi di bidang perdagangan luar negeri	3	3	3	3	3
Laporan kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri	2	2	2	2	2
Jumlah laporan Keuangan dan Barang Milik Negara satker di Lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri	2	2	2	2	2
Jumlah Laporan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)	7	7	7	7	7
Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri	2	2	2	2	2
Laporan kegiatan koordinasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri	6	6	6	6	6
Kegiatan dukungan penguatan kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri	1	1	1	1	1

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi anggaran Ditjen Perdagangan Luar Negeri	92	92	92	92	92
Laporan pembinaan jabatan fungsional AIPP	1	1	1	1	1
Tingkat kepatuhan/tertib administrasi (WTA)	70	70	70	70	70

S. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Kegiatan memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran kegiatan pada table dibawah ini:

Tabel 0-70

Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI					
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80	80	80	80	80
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	80	80	80	80	80
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	80	80	80	80	80

T. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal perdagangan dalam negeri dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran kegiatan pada table dibawah ini:

Tabel 0-71

Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya dukungan layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam					

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Negeri					
Jumlah rancangan peraturan di bidang Perdagangan Dalam Negeri yang di setujui	6	6	6	6	6
Persentase penyerapan anggaran sesuai dokumen perencanaan di lingkungan Ditjen PDN	90	90	90	90	90
Persentase layanan penyusunan dokumen program dan anggaran	100	100	100	100	100
Persentase positif terhadap informasi bidang PDN yang di publikasikan	70	70	70	70	70
Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA)	80	80	80	80	80

U. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Meningkatkan Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah:

Tabel 0-72

*Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi					
Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, anggaran dan Pelaporan	80	85	90	95	100
Nilai Tata kelola Pengelolaan Keuangan	75	82	85	88	90
Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran	80	82	85	87	90
Persentase Kepuasan Publik terhadap Layanan Kerjasama dan Informasi Publik	75	78	80	85	90

V. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN, dengan indikator pada tabel dibawah:

Tabel 0-73

*Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga*

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN					
Nilai Wilayah Tertib Administasi (WTA) Ditjen PKTN	80	81	82	83	84
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	90	92	94	96	98
Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	70	75	80	85	90

W. Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pengkajian dan pengembangan bidang perdagangan dalam negeri yang tercermin melalui sasaran, antara lain: Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-74

Target Kinerja Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri					
Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri	70	70	70	70	75
Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri	70	70	75	75	80

X. Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pengkajian dan pengembangan bidang perdagangan luar negeri yang tercermin melalui sasaran, antara lain: Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-75

Target Kinerja Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri					
Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri	70	70	70	70	75
Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri	70	70	75	75	80

Y. Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada dukungan pengkajian dan pengembangan bidang kerja sama perdagangan internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada table dibawah ini:

Tabel 0-76

Target Kinerja Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional					
Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang Kerjasama perdagangan internasional	70	70	70	70	75
Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional	70	70	75	75	80

4.1.7. Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, akan diukur melalui target kinerja melalui Program Dukungan Manajemen serta target kinerja kegiatan dibawahnya, yaitu:

4.1.7.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Dukungan Manajemen yang mendukung kepada keberhasilan sasaran strategis dimaksud, antara lain: Meningkatnya Profesionalisme dan Kemampuan Manajemen Usaha SDM Perdagangan. Sedangkan untuk indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

Tabel 0-77
Sasaran Program Dukungan Manajemen Dalam Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Profesionalisme dan Kemampuan Manajemen Usaha SDM Perdagangan					
Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perdagangan (Nilai)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Persentase ASN Perdagangan Daerah yang Kompeten (Persen)	81	81	81	82	82
Peningkatan Perbaikan Manajemen Usaha Peserta Pelatihan (Persen)	5	5	6	6	6
Persentase lulusan yang Bekerja di bidang kemetirologian, Instrumentasi dan Perdagangan (Persen)	50	50	55	55	65

4.1.7.2. Target Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam mencapai target kinerja program dijabarkan kepada target kinerja kegiatan, antara lain:

A. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan sdm perdagangan, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-78
Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan SDM Perdagangan					
Jumlah SDM Perdagangan yang mengikuti pelatihan	1500	1600	1700	1800	1800
Persentase kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan	40	45	45	50	50
Jumlah kerjasama pelatihan SDM Perdagangan	3	3	4	4	5
Skor capaian pelayanan penyelenggaraan pelatihan	78	80	80	82	82
Persentase keberhasilan SDM Perdagangan terhadap pelaksanaan pelatihan perdagangan	70	72	74	76	76

B. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan pengembangan sumber daya kemetrolagian yang tercermin melalui sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan sumber daya di bidang kemetrolagian, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-79
Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya di Bidang Kemetrolagian					
Persentase SDM Kemetrolagian yang meningkat kompetensinya	70	72	76	78	80
Persentase Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti	70	70	70	72	75
Persentase hasil pengembangan teknologi di bidang kemetrolagian yang sesuai target capaian	75	77	80	80	83
Tingkat pelayanan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian (skor)	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40

C. Penyelenggaraan Akademi Metrologi

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada penyelenggaraan akademi kemetrolagian yang tercermin melalui sasaran Tersedianya tenaga terampil di bidang kemetrolagian yang kompeten dan siap kerja, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-80
Target Kinerja Kegiatan Akademi Metrologi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya tenaga terampil di bidang kemetrolagian yang kompeten dan siap kerja					
Persentase lulusan yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi dan Perdagangan	50	50	55	55	65
Jumlah penelitian yang dipublikasikan di proceeding seminar nasional, seminar internasional dan/atau jurnal nasional (penelitian)	5	5	6	6	7
Jumlah kerjasama di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang ditindaklanjuti (kerjasama)	3	3	4	4	5

D. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada pengelolaan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha terkait dengan pengujian mutu barang yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pada bidang penguji mutu barang, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 0-81
Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pada bidang penguji mutu barang					
Persentase Jumlah Program Diklat yang sesuai dengan kebutuhan (%)	55	60	65	70	75
Persentase Peserta Diklat yang Lulus/Berhasil dengan Predikat Baik (%)	80	81	82	83	84
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kediklatan Bidang Pengujian Mutu Barang (%)	15	15	15	20	20
Jumlah pelaksanaan kerjasama dan promosi pengembangan Aparatur dan SDM Bidang Pengujian Mutu Barang (Kegiatan)	1	3	4	4	5
Persentase ketersediaan perangkat standar kompetensi kediklatan (%)	10	12	15	17	20

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program dan kebijakan Kementerian Perdagangan periode 2020 – 2024, maka perlu dirumuskan kebutuhan pendanaan yang tepat dan efisien yang bersumber dari dana APBN baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri. Kerangka pendanaan kedepan disusun dengan mengedepankan prinsip *money follows program* sebagai asas pendanaan kegiatan. Oleh karena itu, kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan akan berorientasi pada Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan dan agenda pembangunan nasional.

Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan anggaran APBN akan mengedepankan sebesar-besarnya kepentingan dan amanat rakyat, sebagaimana dapat tercermin dari prinsip sebagai berikut:

1. Optimal, efektif, dan efisien
2. Fokus pada pencapaian sasaran program mendukung visi-misi presiden
3. Konkret dan berorientasi *outcome*
4. Akuntabilitas pengelolaan kinerja keuangan
5. Mengacu pada Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (KPJM) pemerintah.

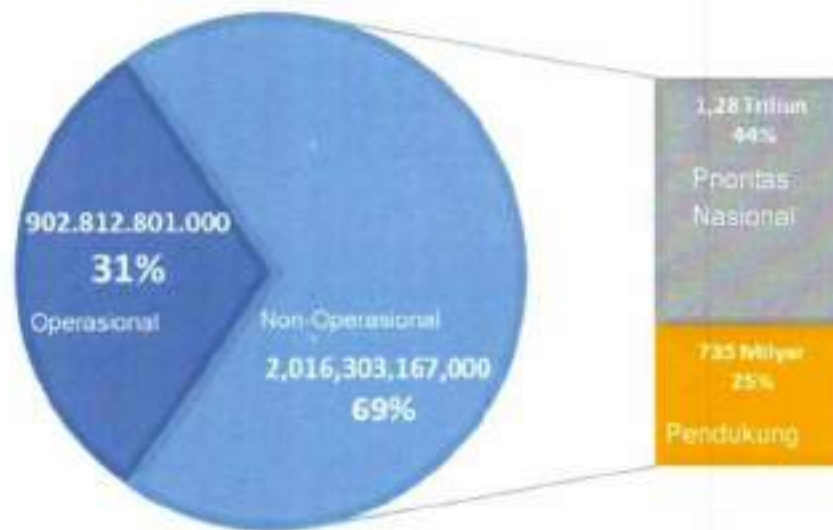
Pada tahun 2020, Anggaran Kementerian Perdagangan pasca penghematan penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp 2.919.12 Milyar. Komposisi anggaran Kementerian Perdagangan ini terdiri dari belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar Rp. 902,81 Milyar atau sebesar 30,9% dan belanja non operasional sebesar Rp. 2.016,30 Milyar atau sebesar 69,1% dari total anggaran Kementerian Perdagangan Adapun rincian belanja non operasional adalah: (i) program/kegiatan teknis Prioritas Nasional sebesar Rp 1.280,9 Milyar atau sebesar 63,5% dan (ii) program/kegiatan teknis penunjang Prioritas Nasional (non-prioritas) sebesar Rp 735,3 Milyar atau sebesar 36,4%.

Pada diagram-diagram berikut ini dapat dilihat orientasi pengelolaan anggaran oleh Kementerian Perdagangan selama periode perencanaan Tahun 2020.

Gambar 0.1 Proporsi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2020 Menurut Jenis Belanja



Gambar 0.2 Proporsi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2020 Menurut Kriteria dan Klasifikasi Pembiayaan



Sumber : RKAKL 2020, olah Biro Perencanaan

Selanjutnya, berkaitan dengan kerangka pendanaan jangka menengah Kementerian Perdagangan dapat dilihat pada lampiran kerangka pendanaan. Adapun peningkatan anggaran Kementerian Perdagangan selama kurun waktu 2020 – 2024 dapat diilustrasikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 0-81

Proyeksi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 Menurut Program Kementerian Perdagangan

(Dalam Juta Rupiah)

Program	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	1.057.604	1.029.928	1.040.109	1.050.876	1.073.581
Program Perdagangan Luar Negeri	507.403	955.212	864.290	908.641	887.553
Program Perdagangan Dalam Negeri	784.134	1.393.977	1.422.430	1.451.737	1.474.908
Program Riset dan Inovasi IPTEK	3.588	16.149	16.220	16.293	16.553
Total Anggaran	2.352.729*	3.395.266	3.343.049	3.427.547	3.452.596

Selain itu, pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan mengkoordinasikan pengalokasian Dana Transfer Khusus, yaitu mekanisme pendanaan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Terkait pendanaan kegiatan khusus fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah, Kementerian Perdagangan bertugas dan bertanggungjawab mengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang merupakan kewenangan atau tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, terkait dengan sumber dana transfer khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian Perdagangan mengelola DAK tersebut dengan mekanisme pengalokasian berdasar kepada kriteria-kriteria teknis yang diimplementasikan melalui perhitungan indeks teknis sesuai dengan arah kebijakan umum penggunaan DAK serta mempertimbangkan kebijakan umum pembangunan nasional.

BAB I PENUTUP

Renstra Kementerian Perdagangan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Renstra Kementerian Perdagangan disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV 2020-2024 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Renstra Kementerian Perdagangan dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, kemudian dijabarkan ke dalam misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan visi dan misi Presiden tersebut kemudian ditetapkan Visi dan Misi Kementerian perdagangan serta tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu: (1).Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri; (2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, Kementerian Perdagangan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; (2) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bapokting; (3) Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; (4) Meningkatnya pasar produk dalam negeri; (5) Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK; (6) Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; serta (7) Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan. Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan adanya indikator yang telah disusun. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perdagangan melaksanakan 4 (empat) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan dalam upaya

mendukung perdagangan sebagai penggerak penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Keberhasilan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan, secara keseluruhan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Artinya keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari Kementerian Perdagangan itu sendiri.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perdagangan

Tabel 0-1 Matriks Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET 2024	TOTAL ALOKASI (Juta)	LOKASI	JENIS PEMBIAYAAN
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN					
090.07	PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI					
090.07.3975.	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah			236.089,45		
090.07.3975.001	Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	Kegiatan	3	50,565.10	Provinsi	
090.07.3975.003	Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM	Provinsi	34	81,206.10	Provinsi	
090.07.3975.005	FTA Center di Daerah	Laporan	1	32,790.97	Provinsi	
090.07.3975.006	Identifikasi Potensi Ekspor	Buku	19	34,221.64	Provinsi	
090.07.3975.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	36,706.79	Provinsi	
090.09	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI					
090.09.3974.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			385.750,32		
090.09.3974.001	Fasilitas Kegiatan Pasar Murah	Daerah	34	23,006.55	Provinsi	
090.09.3974.002	Kegiatan Pangan Nusa	Daerah	34	36,987.45	Provinsi	
090.09.3974.003	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Daerah	34	95,512.13	Provinsi	
090.09.3974.004	Perlindungan Konsumen di Daerah	Daerah	34	95,172.47	Provinsi	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET 2024	TOTAL ALOKASI (Juta)	LOKASI	JENIS PEMBIAYAAN
090.09.3974.005	Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah	Daerah	27	6,207.53	Provinsi	
090.09.3974.009	Pengguna Pasar Lelang Di Daerah	Pelaku	596	40,552.00	Provinsi	
090.09.3974.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	42,184.87	Provinsi	
090.09.5090.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan			4.193.435,84		
090.09.5090.004	Sarana Perdagangan Yang Dibangun/Direvitalisasi	Unit	53	3.107.930,93	Kabupaten/Kota	
090.09.5090.005	Jumlah Gudang/Depo Non SRG yang termanfaatkan	Gudang/Depo	13	45.889,18	Kabupaten/Kota	
090.09.3716.	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			-	-	
090.09.3716.001	Pusat Produk Dalam Negeri Unggulan Daerah	Kab/Kota	1		Provinsi	
090.09.3716.002	Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Penataan Usaha Dagang Kecil Menengah	PMKM	10000		Kabupaten/Kota	
090.10.3760.	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas					
090.10.3760.006	<i>Pilot Project Gudang SRG dengan Warehouse Management System</i>	Daerah	0	2.000,00	Provinsi	

Sumber : RPJMN 2020-2024, di olah Biro Perencanaan

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Tabel 0-2 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Undang-Undang tentang Metrologi	Peranan metrologi menyentuh berbagai segi kehidupan umat manusia. Di dalam prakteknya, metrologi tidak hanya berkenaan dengan penggunaan alat ukur tetapi juga berkenaan dengan kemajuan (state of the art) alat ukur itu sendiri yang di dalam kenyataannya terus bergerak maju dengan amat cepat pada posisi yang selalu di depan kemampuan pelaku metrologi praktis. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal (UUML) berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan: adanya kesenjangan antara substansi pengaturan UUML dengan berbagai perkembangan dalam bidang pengukuran; perkembangan sosial, politik, dan hukum untuk lingkup nasional ditandai dengan penerapan asas desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23	Ditjen PKTN	- Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Badan Standardisasi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan	Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; belum harmonisnya regulasi kemetrolagian nasional dengan beberapa regulasi internasional terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, pada forum perundingan internasional, seperti World Trade Organization (WTO), Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) serta perjanjian perdagangan lainnya antara Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang; lemahnya pengawasan; kurang optimalnya peran kelembagaan metrologi baik pusat maupun daerah; lemah dalam pengaturan kerangka institusi (institutional framework); belum adanya mekanisme pendelegasian kewenangan pelayanan tera dan tera ulang kepada pihak ketiga; dan Dengan demikian perlu menyusun kembali sistem penyelenggaraan metrologi secara		Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelijen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		nasional yang selaras dengan regulasi perundangan lainnya.			
2	Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Setelah lebih dari 18 tahun sejak dinyatakan berlaku, penegakan UUPK ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam UUPK terdapat berbagai konsepsi yang belum jelas atau belum diatur yang menyebabkan perlindungan konsumen tidak optimal misalnya: pengertian 'perjanjian baku' dan 'klausula baku' yang tidak jelas dan pengaturan akibat hukum penggunaan perjanjian baku dan klausula baku yang keliru sehingga menimbulkan beragam penafsiran dalam penerapan dan penegakan UUPK; penggunaan perjanjian elektronik (e-contracts atau digital contracts) yang berkembang pesat, yang belum diatur dalam UUPK;	Ditjen PKTN	- Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi	Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) yang belum diatur secara tegas dalam UUPK. permasalahan terkait struktur tanggung jawab pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, seharusnya dipisah mengingat klasifikasi sifat barang dan jasa serta jenis tanggung jawab hukum pelaku usaha barang dan penyedia jasa yang berbeda; ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UUPK, menyebabkan konsumen yang dirugikan lebih memilih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1243 yang mengenal ganti rugi nonmateri. permasalahan terkait moda penyelesaian sengketa konsumen yaitu struktur penyelesaian sengketa konsumen yang menempatkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagai sub sistem dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan; permasalahan terkait dengan kelembagaan perlindungan konsumen misalnya: ketiadaan beberapa lembaga atau organisasi		- Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelijen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial - Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		antara lain asosiasi konsumen barang dan/atau jasa sejenis, serta ketidakjelasan pengaturan koordinasi antar berbagai instansi penegak hukum yang terlibat dalam penegakan UUPK, antara lain kementerian terkait, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menisbikan peran Kabupaten/Kota dalam urusan perlindungan konsumen, sehingga keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula diperintahkan oleh UUPK untuk didirikan di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), sekarang hanya diperkenankan di Provinsi dan Pusat; dan tugas dan wewenang berbagai badan atau lembaga dalam urusan perlindungan konsumen yang kurang optimal, antara lain Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sehingga kurang dapat berkontribusi pada upaya perlindungan konsumen. Penerapan dan penegakan UUPK harus		- Bank Indonesia - Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dilakukan secara optimal, sehingga konsumen memperoleh perlindungan yang paripurna, serta pelaku usaha dapat menjalankan usaha secara bermartabat, maka dipandang perlu dilakukan perubahan pada UUPK, terutama untuk memenuhi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), United Nations Guidelines for Consumer Protection 2016 (UNGCP 2016), mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memperbaiki kekurangan dari UUPK.			
3	Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Metrologi	Merupakan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Metrologi	Ditjen PKTN	- Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat	Tahun 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan	
				- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelijen Negara	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				- Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial	
4	Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Merupakan peelaksana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Ditjen PKTN	- Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi	Tahun 2024

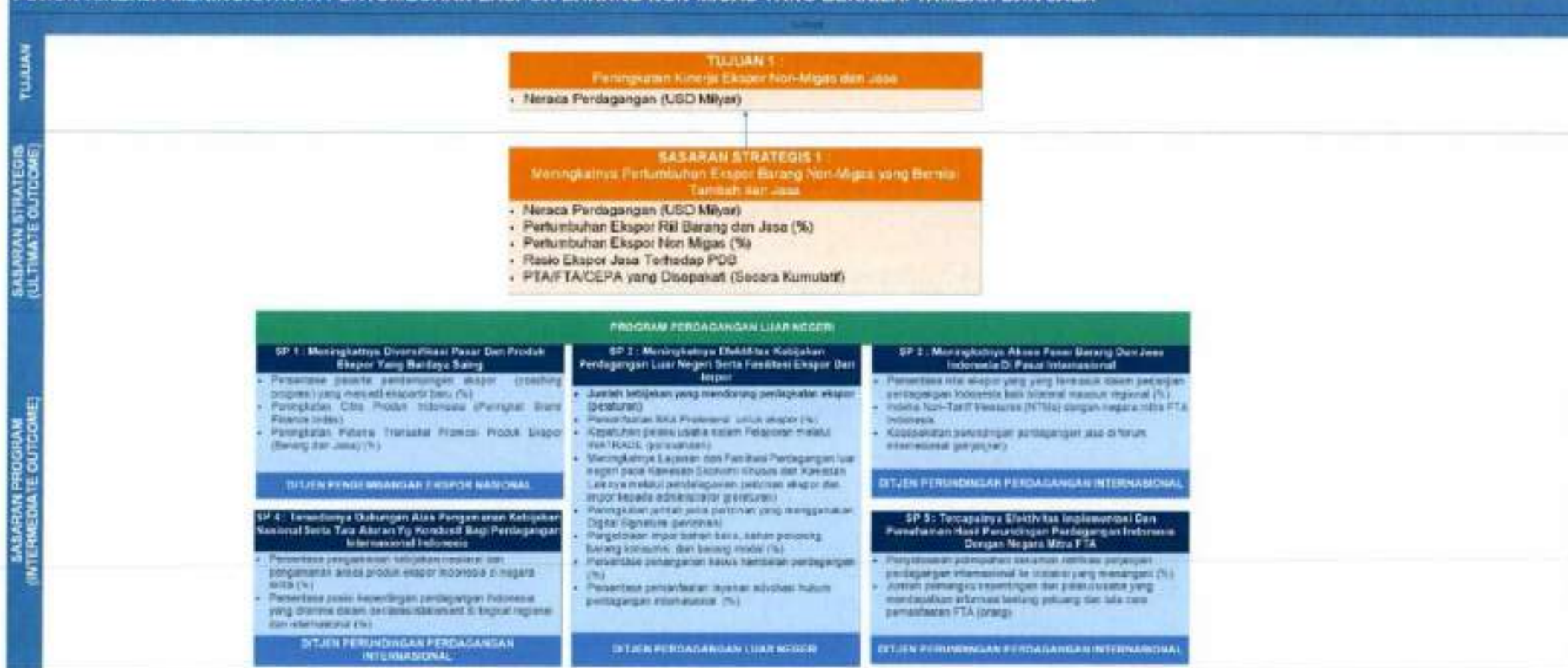
No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelejen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan UMKM	Merupakan amanat turunan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang belum selesai	Ditjen PDN	- Kementerian KUMKM - Kementerian Perindustrian - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian BUMN - Kementerian Keuangan - Bank Indonesia	
6	Peraturan Presiden tentang Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan	Merupakan amanat turunan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang belum selesai	Ditjen PDN	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kementerian Desa dan PDT - Kementerian KUKM	

Lampiran 3. Pohon Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

A. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang

POHON KINERJA MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKSPOR BARANG NON-MIGAS YANG BERNILAI TAMBAH DAN JASA



A. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang (Lanjutan)

[illegible]

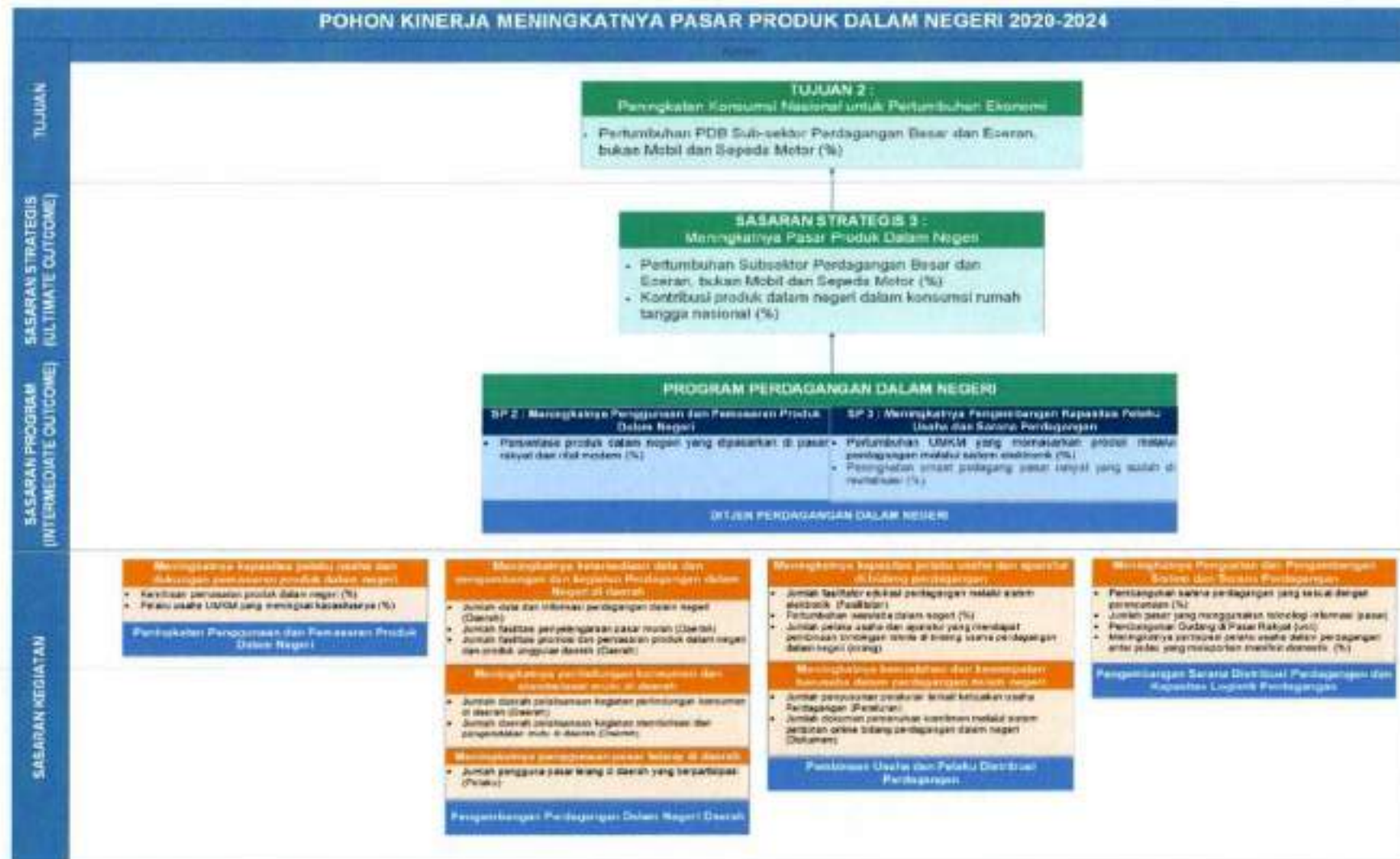
B. Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok 2020-2024

Gambar 0-1 Pohon Kinerja Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok



D. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

Gambar 0-3 Pohon Kinerja Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri



E. Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK

Gambar 0-4 Pohon Kinerja Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK



F. Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Gambar 0-5 Pohon Kinerja Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional



F. Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional (Lanjutan)

[illegible]

G. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Gambar 0-6 Pohon Kinerja Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan



LAMPIRAN 4 - MATRIKS KINERJA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
KEMENTERIAN PERDAGANGAN										
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa										
	Neraca Perdagangan Barang*	USD Miliar	0,3	1	3	7,5	15			
	Pertumbuhan Ekspor Rill Barang dan Jasa*	Persen (%)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2			
	Pertumbuhan Ekspor Non Migas *	Persen (%)	5,2	6,3	7,2	8,5	9,8			
	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB *	Persen (%)	2,8	2,8	2,8	2,9	3			
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati*	Kesepakatan	14 (kumulatif)	19 (kumulatif)	24 (kumulatif)	29 (kumulatif)	34 (kumulatif)			
Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan										
	Inflasi pangan yang bergeser*	Persen (%)	3,2 ± 1	3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	3,1			
Mewujudkan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab										
	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks	45	48	50	53	55			
Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri										
	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB	Persen (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6			
	Kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional	Persen (%)	94	94,3	94,5	94,8	95			
Mengoptimalkan Peranan PBK, SRG, dan FLK										
	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	Persen (%)	5	8	10	13	15			
	Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan	Persen (%)	5	7	9	12	14			
	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	2	3	5	7	10			
Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76	78	80	83	85			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	Unit Kerja	1	2	2	3	4			
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A			
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik			
Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan										
	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										PENUNJANG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik										
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi	Persen (%)	70	70	70	70	70			
	Persentase Pelayanan Informasi yang ditindak lanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan	Persen (%)	95	95	95	95	95			
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76	78	80	83	85			
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A			
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik			
	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	nilai	91	92	92	93	93			
	Persentase unit kerja yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Persen (%)	100	100	100	100	100			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPP minimal level 3	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Persen (%)	98	98	100	100	100			
	Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	Unit Kerja	1	1	2	2	2			
Penguatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja										
	Skor capaian area perubahan penataan dan penguatan organisasi	Nilai (Skala 1-5)	4,2	4,4	4,6	4,8	5			
	Indeks penerapan merit sistem	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik			
	Persentase ASN Perdagangan Daerah yang kompeten	Persen	81	81	81	82	82			
	Persentase Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Persen	50	60	70	75	80			
	Indeks Pelayanan Kepegawalan	Nilai	90	90	90	90	90			
	Peningkatan Perbaikan Manajemen Usaha Perdagangan Peserta Pelatihan	Persen	5	5	6	6	6			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal										
	Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK	Persen (%)	<2	<2	<2	<2	<2			
	Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan	Persen (%)	30	25	20	15	10			
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	Persen (%)	85	85	85	85	85			
	Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Meningkatnya Profesionalisme dan Kemampuan Manajemen Usaha SDM Perdagangan										
	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perdagangan	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase ASN Perdagangan Daerah yang Kompeten	Persen	81	81	81	82	82			
	Peningkatan Perbaikan Manajemen Usaha Peserta Pelatihan	Persen	5	5	6	6	6			
	Persentase lulusan yang Bekerja Dibidang kemetrolgian, Instrumentasi dan Perdagangan	Persen	50	50	55	55	65			
Peningkatan Pengelolaan Perencanaan										
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Kerjasama Kementerian Perdagangan										
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan	Predikat	BB	BB	A	A	A			
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setjen Kementerian Perdagangan	Predikat	BB	A	A	A	A			
	Persentase Unit Kerja Yang Mengimplementasikan Kerja Sama	Persen (%)	65	70	75	80	85			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perencanaan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi										
Meningkatnya efektifitas organisasi dan kinerja ASN Kemendag										
	Persentase kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan prosedur	Persen (%)	50	60	70	75	80			
	Persentase tindak lanjut kebijakan organisasi dan kepegawaian yang ditetapkan	Persen (%)	75	75	75	75	75			
	Indeks Pelayanan Kepegawaian	Nilai	90	90	90	90	90			
	Persentase pejabat Kemendag yang memenuhi kompetensi	Persen (%)	60	65	70	75	80			
	Persentase jumlah penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persen (%)	90	90	90	90	90			
	Persentase pegawai dengan bobot nilai 5 pada dimensi disiplin untuk Indeks Profesional ASN	Persen (%)	80	80	80	80	80			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pegawai dengan bobot nilai minimal 25 pada dimensi disiplin untuk Indeks Profesional ASN	Persen (%)	75	80	85	88	90			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Manajemen Organisasi		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Reformasi Birokrasi		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pengelolaan Keuangan										
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Akuntabel										
	Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan	Laporan	3	3	3	3	3			
Terwujudnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan yang Sesuai Peraturan										
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Nilai	90	90	90	90	90			
Terlaksananya Pembinaan Pengelola Keuangan Kementerian Perdagangan										
	Persentase Pengelola Keuangan Bersertifikasi Kementerian Perdagangan	Persen (%)	50	55	60	65	70			
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan yang Tertib dan Akuntabel										
	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan	Laporan	4	4	4	4	4			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan	Laporan	7	7	7	7	7			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan										
Efektifitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan										
	Indeks Kepuasan pemenuhan kebutuhan operasional di lingkungan Kemendag	Skor	60	65	70	75	80			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan										
Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan										
	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan	Persen (%)	95	95	95	95	95			
	Jumlah jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tepenuhi angka kreditnya	Orang	2	2	2	2	2			
Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum										
	Persentase pelayanan dan bantuan hukum yang ditangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase penyelesaian legal opinion, MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang diselesaikan tepat waktu	persen (%)	100	100	100	100	100			
Terlaksananya penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja										
	Nilai predikat WTA	Nilai	75	75	75	75	75			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan										
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan SDM Perdagangan										
	Jumlah SDM Perdagangan yang mengikuti pelatihan	Peserta	1500	1600	1700	1800	1800			
	Persentase kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan	Persen	40	45	45	50	50			
	Jumlah kerjasama pelatihan SDM Perdagangan	kegiatan	3	3	4	4	5			
	Skor capaian pelayanan penyelenggaraan pelatihan	Nilai	78	80	80	82	82			
	Persentase keberhasilan SDM Perdagangan terhadap pelaksanaan pelatihan perdagangan	Persen	70	72	74	76	76			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian										
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya di Bidang Kemetrolagian										
	Persentase SDM Kemetrolagian yang meningkat kompetensinya	Persen (%)	70	72	76	78	80			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	70	72	75			
	Persentase hasil pengembangan teknologi di bidang kemetrolagian yang sesuai target capaian	Persen (%)	75	77	80	80	83			
	Tingkat pelayanan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian	Skor	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40			
Output :										
Layanan Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian		Dokumen	26	16	16	16	16			
Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian		Orang	1040	1040	1040	1040	1040			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pelayanan Informasi Publik										
Meningkatnya Persepsi Positif Kementerian Perdagangan di Mata Publik										
	Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan	Persen (%)	70	70	70	70	70			
	Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Perdagangan di Media	Persen (%)	70	70	70	70	70			
	Persentase SDM Jabatan Fungsional Pustakawan dan Pranta Humas yang terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan kebutuhan	Persen (%)	70	70	75	75	75			
Terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi unit kerja										
	Nilai predikat WTA	Nilai	70	70	70	70	70			
Output :										
Layanan Internal Organisasi			0	0	0	0	0			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor										
Tersedianya rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan										
	Jumlah rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan	Rekomendas	6	6	6	6	6			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Terwujudnya kolaborasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan										
	Persentase rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang disampaikan kepada stakeholder	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Jumlah laporan capaian Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP)	Dokumen	4	4	4	4	4			
	Persentase monitoring laporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Persen (%)	80	80	80	80	80			
	Jumlah laporan monitoring capaian kegiatan yang mendukung sasaran Kementerian Perdagangan	Dokumen	3	3	3	3	3			
Output :										
Rekomendasi Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak pada			0	0	0	0	0			
Laporan Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap			0	0	0	0	0			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan										
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia										
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan KDEI	Gedung	1	1	1	1	1			
Meningkatnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Taiwan Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Nasional dan Kepentingan Global										
	Penyelenggaraan Promosi Perdagangan	kali	6	6	6	6	6			
	Jumlah Bisnis Intelligence	Laporan	6	6	6	6	6			
	Penanganan Hambatan Perdagangan	kali	1	1	1	1	1			
	Persentase Peningkatan Aktivitas Perdagangan Indonesia -Taiwan	Persen (%)	5	5,3	6,6	8,3	10,4			
	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Industri	Kesepakatan	3	3	3	3	3			
	Jumlah Forum Trade, Tourism and Investment (TTI)	Kali	7	7	8	8	9			
	Jumlah Kerjasama Industri tour operator dan travel agent (JOINT PROMOTION OF INDONESIA TOURISM)	MoU	8	10	12	14	16			
	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pasar Taiwan	Kali	12	12	12	12	12			
	Persentase Penanganan PMI	Persen (%)	70	70	75	75	75			
	Jumlah Pembinaan WNI	kali	12	12	12	12	12			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Penyelesaian Dokumen Keimigrasian	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Penyelesaian Dokumen Kekonsuleran	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Penyelesaian Kasus WNI (Non-PMI resmi)	Persen (%)	50	60	70	75	80			
	Jumlah Kerja Sama Sosial Budaya	MoU	1	1	1	1	1			
Output :										
Promosi bidang perdagangan, investasi dan pariwisata			0	0	0	0	0			
Layanan Publik			0	0	0	0	0			
Fasilitasi ekspor jasa kuliner (diplomasi gastronomi)		nilai transaksi								
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penyelenggaraan Akademi Metrologi										
Tersedianya tenaga terampil di bidang kemetrolagian yang kompeten dan siap kerja										
	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan D3 Metrologi dan Instrumentasi	Orang	165	165	165	215	265			
	Persentase lulusan yang bekerja di bidang kemetrolagian, instrumentasi, dan perdagangan	Persen (%)	50	50	55	55	65			
	Jumlah penelitian di bidang kemetrolagian, instrumentasi, dan perdagangan	Penelitian	5	5	6	6	7			
	Jumlah peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kemetrolagian, instrumentasi dan perdagangan	Peserta	200	250	300	350	400			
	Jumlah kerjasama kemetrolagian dengan Unit Metrologi Legal dan Industri	Kerjasama	3	3	4	4	5			
Output :										
Layanan Pendidikan Vokasi Kemetrolagian	Jumlah lulusan Akademi Metrologi	Orang	165	165	215	265	315	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing; KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri; ProP : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	

LAMPIRAN 4 - MATRIKS KINERJA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Penelitian di Bidang Kemetrollogian		Laporan	5	5	6	6	7			
Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat		Orang	200	200	300	350	400			
Layanan Promosi dan Kerjasama		Laporan	3	9	4	4	5			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan										
Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi										
	Tata kelola TIK yang handal dan terpadu	Kebijakan	1	1	1	1	1			
	Layanan data yang berkualitas	Persentase kepuasan pengguna layanan	91	92	93	94	95			
	Sistem informasi perdagangan yang terintegrasi	Jumlah aplikasi	5	8	11	14	17			
	Layanan TIK yang handal	Persentase kepuasan pengguna layanan	94	95	96	97	98			
	SDM TIK yang berkinerja sesuai kebutuhan	Persentase	45	55	65	70	75			
Output:										
Layanan TIK			0	0	0	0	0			
Layanan LPSE			0	0	0	0	0			
Layanan SDM TIK dan Statistik			0	0	0	0	0			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang										
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pada bidang penilai mutu barang										
	Persentase Jumlah Program Diklat yang sesuai dengan kebutuhan	Persen (%)	55	60	65	70	75			
	Persentase Peserta Diklat yang Lulus/Berhasil dengan Predikat Baik	Persen (%)	80	81	82	83	84			
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kediklatan Bidang Pengujian Mutu Barang	Persen (%)	15	15	15	20	20			
	Jumlah pelaksanaan kerjasama dan promosi pengembangan Aparatur dan SDM Bidang Pengujian Mutu Barang	Kegiatan	1	3	4	4	5			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase ketersediaan perangkat standar kompetensi kediklatan	Persen (%)	10	12	15	17	20			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan										
Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana										
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Skor	60	65	70	75	80			
Output :										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)		Layanan	1	1	1	1	0			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal										
Terwujudnya layanan dukungan teknis pengawasan yang efektif										
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	Persen (%)	75	85	85	85	85			
	Persentase Layanan: Review dokumen anggaran, RK-BMN, Laporan Kinerja dan Laporan keuangan Unit yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Sosialisasi Penegakan Integritas yang dipahami oleh minimal 75% peserta	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Persen (%)	98	98	100	100	100			
Terwujudnya dukungan layanan internal organisasi yang efektif, akuntabel, dan transparan										
	Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)"	Unit Kerja	1	2	2	3	4			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai	80	81	82	83	84			
	Persentase SDM Itjen yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen (%)	25	25	25	25	25			
	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal	Persen (%)	92	92	92	92	92			
	Persentase Sistem Pengawasan berbasis Teknologi Informasi yang dimanfaatkan	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										
Perencanaan (SBKUI)		Laporan	4	4	4	4	4			
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Audit Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I										
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja										
	Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat I	Persen (%)	<2	<2	<2	<2	<2			
	Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat I	Persen (%)	30	25	20	15	10			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan										
	Persentase unit kerja binaan Inspektorat I yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase satker binaan Inspektorat I yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat I yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										
Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat I		Laporan	5	5	5	5	5			
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II										
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat II	Persen (%)	<2	<2	<2	<2	<2			
	Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat II	Persen (%)	30	25	20	15	10			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan										
	Persentase unit kerja binaan Inspektorat II yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase satker binaan Inspektorat II yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat II yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										
Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat II		Laporan	5	5	5	5	5			
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II										
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja										
	Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat III	Persen (%)	<2	<2	<2	<2	<2			
	Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat III	Persen (%)	30	25	20	15	10			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan										
	Persentase unit kerja binaan Inspektorat III yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase satker binaan Inspektorat III yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Persen (%)	100	100	100	100	100			

LAMPIRAN 4 - MATRIKS KINERJA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat III yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										
Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat III			5	5	5	5	5			
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV										
Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan upaya korektif bagi peningkatan kinerja										
	Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK pada Unit Binaan Inspektorat IV	Persen (%)	<2	<2	<2	<2	<2			
	Persentase jumlah temuan berulang hasil Pengawasan pada Unit Binaan Inspektorat IV	Persen (%)	30	25	20	15	10			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Perdagangan										
	Persentase unit kerja binaan Inspektorat IV yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase satker binaan Inspektorat IV yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Unit Kerja binaan Inspektorat IV yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										
Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat IV			5	5	5	5	5			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan										
Tersedianya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan										
	Persentase hasil kajian yang dipublikasikan	Persen (%)	60	62	64	66	70			
	Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja BPPP	Persen (%)	70	70	75	75	80			
	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPP	Nilai AKIP	70	71	72	73	75			
Output :										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN										
Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen PEN										
	Persentase publikasi positif terkait kegiatan Kementerian Perdagangan bidang Pengembangan Ekspor Nasional (%)	Persen (%)	80	80	80	80	80			
	Persentase realisasi pengelolaan keuangan sesuai dokumen perencanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (%)	Persen (%)	90	90	90	90	90			
	Nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Nilai)	Nilai	80	80	80	80	80			
	Persentase SDM Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang memperoleh nilai SKP dalam kategori "Baik"	Persen (%)	95	95	95	95	95			
Output :										
Perencanaan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri										
Dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri										
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal	Dokumen	5	5	5	5	5			
	Jumlah koordinasi dan sosialisasi di bidang perdagangan luar negeri	Laporan	3	3	3	3	3			
	Laporan kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri	Laporan	2	2	2	2	2			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara satker di Lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri	Laporan	2	2	2	2	2			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)	Laporan	7	7	7	7	7			
	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri	Laporan	2	2	2	2	2			
	Laporan kegiatan koordinasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri	Laporan	6	6	6	6	6			
	Kegiatan dukungan penguatan kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri	kegiatan	1	1	1	1	1			
	Persentase realisasi anggaran Ditjen Perdagangan Luar Negeri	persentase	92	92	92	92	92			
	Laporan pembinaan jabatan fungsional AIPP	Laporan	1	1	1	1	1			
	Tingkat kepatuhan/tertib administrasi (WTA)	Nilai	70	70	70	70	70			
Output :										
Penguatan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		Kegiatan	20	13	13	13	13			
Pencelakan Dokumen Ekspor-Impor		Formulir	1892000	3000000	3000000	3000000	3000000			
Pengelolaan Surat Keterangan Asal		Laporan	7	7	7	7	7			
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			Responsive Gender didukung Komponen/Su bkomponen : Pelatihan Pengembangan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional										
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI										
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	80	80	80	80			
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	90	90	90	90			
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	80	80	80	80			
	Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	Nilai	80	80	80	80	80			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Output :										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri										
Terlaksananya dukungan layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri										
	Jumlah rancangan peraturan di bidang Perdagangan Dalam Negeri yang di setuju	Rancangan	6	6	6	6	6			
	Persentase penyerapan anggaran sesuai dokumen perencanaan di lingkungan Ditjen PDN	Persen (%)	90	90	90	90	90			
	Persentase layanan penyusunan dokumen program dan anggaran	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase positif terhadap informasi bidang PDN yang di publikasikan	Persen (%)	70	70	70	70	70			
	Nilai Wilayah Tertib Administrasi	Nilai	80	80	80	80	80			
Output :										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi										
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi										
	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, anggaran dan Pelaporan	Persentase	80	85	90	95	100			
	Nilai Tata kelola Pengelolaan Keuangan	Nilai	75	82	85	88	90			
	Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran	Persentase	80	82	85	87	90			
	Persentase Kepuasan Publik terhadap Layanan Kerjasama dan Informasi Publik	Persentase	75	78	80	85	90			
Output :										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga										
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Ditjen PKTN	Satuan	80	81	82	83	84			
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	Satuan	90	92	94	96	98			
	Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	Persen	70	75	80	85	90			
Output :										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
PROGRAM RISET, ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN INOVASI										PENUNJANG
Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan perdagangan										
	Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan	Persen (%)	70	70	70	70	75			
	Persentase hasil kajian yang dipublikasikan	Persen (%)	60	62	64	66	70			
	Persentase kepuasan stakeholder terhadap kinerja BPPP	Persen (%)	70	70	75	75	80			
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri										
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri										
	Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri	Persen (%)	70	70	70	70	75			
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri	Persen (%)	70	70	75	75	80			
Output :										
Layanan Penelitian dan Pengembangan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri										
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri										
	Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri	Persen (%)	70	70	70	70	75			

LAMPIRAN 4 - MATRIKS KINERJA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri	Persen (%)	70	70	75	75	80			
Output :										
Layanan Penelitian dan Pengembangan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional										
Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional										
	Persentase rekomendasi pengkajian dan pengembangan yang menghasilkan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional	Persen (%)	70	70	70	70	75			
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional	Persen (%)	70	70	75	75	80			
Output :										
Layanan Penelitian dan Pengembangan		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI										
Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing										
	Persentase peserta pendampingan ekspor (coaching program) yang menjadi eksportir baru (%)	Persen (%)	13	30	30	32	32			
	Peningkatan Citra Produk Indonesia (Peringkat Brand Finance Index)	Peringkat	15	15	15	15	14			
	Peningkatan Potensi Transaksi Promosi Produk Ekspor (Barang dan Jasa) (%)	Persen (%)	0	20	25	27	30			
Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor										
	Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor	Jumlah Peraturan	11	11	11	11	11			
	Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor	Persen (%)	75	77	79	81	83			
	Kepatuhan pelaku usaha dalam Pelaporan melalui INATRADE	Jumlah Perusahaan	4000	8000	12000	16000	20000			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Meningkatnya Layanan dan Fasilitas Perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	Peraturan	2	3	3	2	2			
	Peningkatan jumlah jenis perizinan yang menggunakan Digital Signature	Jumlah Jenis Perizinan	55	60	65	70	75			
	Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal	Persen (%)	90	90	100	100	100			
	Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase pemanfaatan layanan advokasi hukum perdagangan internasional	Persen (%)	85	87	90	92	95			
Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor pangan										
	Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional										
	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	Persen (%)	42	43	44	45	46			
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	6,5	6	5,5	5	4,5			
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	0	3	3	3	3			
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia										
	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen (%)	80	80	80	80	80			
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Orang	681	2.000	2.000	2.000	2.000			
Pengembangan Produk Ekspor										
Meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor										
	Tingkat kepuasan pengguna IDDC (%)	Persen (%)	65	70	75	80	85			
	Persentase Produk Hasil Pendampingan yang Mendapat Potensi Ekspor (%)	Persen (%)	0	15	20	25	30			
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk Ekspor (%)	Persen (%)	0	10	10	10	10			
Output :										
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	Produk	40	80	90	100	110	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	Produk	1	60	70	80	90	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	Produk	10	30	35	40	45	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor										
Meningkatnya peran dunia usaha dan kelembagaan ekspor non migas di dalam dan luar negeri										
	Jumlah penyelenggaraan pusat promosi di dalam negeri dan luar negeri	Pusat Promosi	1	7	7	7	7			
<u>Output :</u>										
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri	Pusat Promosi	2	7	7	7	7		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pilot Project Pendirian Export Center	Jumlah Export Center di Daerah	Export Center		1	2	3	4	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaiat Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	
Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor										
Tersedianya layanan dan informasi bagi pelaku usaha ekspor										
	Tingkat kepuasan pengguna layanan Customer Service Center dan Membership Service (%)	Persen (%)	70	75	80	85	90			
	peningkatan ekspor pelaku usaha penerima penghargaan ekspor	Persen (%)	0	5	5	6	6			
	peningkatan jumlah pengguna data dan informasi pasar ekspor	Persen (%)	5	5	5	6	6			
Output :										
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama	Negara	2	10	15	20	25		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Offline	Jumlah export helpdesk	Kegiatan	1	1	1	1	1	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Penghargaan Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi penghargaan dan fasilitas	Pelaku Usaha	1	50	50	50	50	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
pengembangan market place berorientasi ekspor	Jumlah Layanan Market Place	Layanan	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Negara	2	7	10	15	20		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	8			
Layanan Dukungan Manajemen Sektoral		Layanan	1	1	1	1	1			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Promosi dan Citra										
Meningkatnya citra Indonesia										
Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi	Peningkatan aktivasi pencitraan	Persen (%)	0	10	10	10	10			
	Jumlah Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	kegiatan	4	8	8	8	8			
	peningkatan potensi transaksi misi dagang	Persen (%)	0	10	10	10	10			
	peningkatan potensi transaksi pameran dagang lainnya	Persen (%)	0	10	10	10	10			
Output :										
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama	Promosi	7	15	20	25	30	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Kegiatan Pencitraan	Jumlah kegiatan pencitraan	Kegiatan	4	11	11	11	11	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Promosi Produk dan jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Jumlah Promosi Produk dan jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Promosi	1	6	6	6	6	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Kegiatan, World Dubai Expo 2020	Jumlah pelaksanaan WED 2020	Kegiatan	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	
CA Expo Nanjing China dan Perugasan Pameran Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi	Promosi	7	7	8	8	8	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Promosi	4	10	15	20	25	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Kerja Sama Pengembangan Ekspor										
Meningkatnya kerja sama di bidang pengembangan ekspor										
	Jumlah naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor	MoU	1	5	5	5	6			
	Jumlah naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor dihidang.iaa	MoU	1	1	1	1	1			
	Peningkatan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Kerjasama Rencanabinaan Ekspor	-persen	5	10	10	10	10			
Output :										
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	MoU	1	5	5	5	5	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor	Pelaku Usaha	100	770	790	810	830	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa	Rekomendasi	1	2	2	3	3	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama	Kegiatan	1	6	6	6	6	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Pengembangan Kemitraan Ekspor Ekspor Pendukung Global Production Network									PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global; ProP : Peningkatan Investasi (inbound & outbound) industri GPN berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	0			
Pengembangan SDM Bidang Ekspor										
Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi ekspor										
	Jumlah peserta Export Coaching Program yang menjadi pelaku Usaha	Pelaku Usaha	15	40	40	42	42			
	Jumlah peserta pelatihan ekspor	Orang	1833	3522	3612	3702	3792			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor	Angkatan	62	124	129	134	139	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Export Coaching Program	Jumlah peserta export coaching program	Peserta	100	150	175	200	225	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Dukungan Bidang Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)										
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus										
	Pendelegasian fasilitas dan perizinan ekspor impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	KEK	3	0	0	0	0			
Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi										
	Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Laporan	1	0	0	0	0			
	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan KEK	Rancangan Peraturan Menteri	1	0	0	0	0			
Output :										
	Identifikasi Pendelegasian Fasilitasi dan Perizinan Ekspor Impor di KEK	Laporan	5	0	0	0	0			
	Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan di KEK	KEK	3	0	0	0	0			
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan										
Meningkatnya ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah										
	Pertumbuhan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah	Persen (%)	5	5,25	5,5	5,75	6			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tersedianya kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan										
	Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan	Peraturan	6	6	6	6	6			
	Jumlah penerbitan eksportir terdaftar (ET)	ET	200	200	200	200	200			
	Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor (SPE)	SPE	600	700	800	900	1000			
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan	Jumlah	250	300	350	400	450			
Output :										
Kebijakan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		Permendag	6	6	6	6	6		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Layanan Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		Dokumen	1420	1420	1420	1420	1420			
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan	Kegiatan	7	7	7	7	7	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		Paket	7	0	0	0	0		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan										
Meningkatnya ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah										
	Pertumbuhan ekspor produk industri manufaktur	Persen (%)	5	5,25	5,5	5,75	6			
	Pertumbuhan ekspor produk pertambangan yang bernilai tambah	Persen (%)	5	5,25	5,5	5,75	6			
Tersedianya kebijakan, standarisasi, serta evaluasi di bidang ekspor produk industri dan pertambangan										
	Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertambangan	Peraturan	3	3	3	3	3			
	Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk industri	Peraturan	2	2	2	2	2			
	Jumlah penerbitan eksportir terdaftar (FTI)	ET	20	20	20	20	20			
	Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor (SPE)	SPE	600	600	600	600	600			
Output :										
Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri	Pemendag	15	2	2	2	2	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	Responsive Gender didukung Komponen/Subkomponen : Bimbingan Teknis Kebijakan Ekspor Produk Aneka (khususnya Perhiasan)
Forum Kerjasama dan Koordinasi di Bidang Ekspor Produk Industri dan		Laporan	4	0	0	0	0			
Profil Komoditi Produk Industri dan Pertambangan		Laporan	12	12	12	12	12			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Facilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk industri dan pertambangan	Fasilitasi	7	7	7	7	7	Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Layanan Dukungan Manajemen Setor		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor										
Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor yang cepat dan transparan										
	Penyusunan Rumusan Kebijakan terkait Fasilitasi Ekspor dan Impor	Jumlah Rumusan	4	3	3	3	3			
	Jumlah eksportir yang ditetapkan sebagai eksportir bersertifikasi	Jumlah eksportir	1000	1200	1400	1600	1800			
	Peningkatan volume ekspor barang yg menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional	Jumlah kegiatan ekspor dan impor barang tertentu yg menggunakan	4500	4725	4961	5209	5470			
		Nilai jasa asuransi (premi marine cargo	USD 3.8jt	USD 3.99jt	USD 4.19jt	USD 4.4jt	USD 4.62jt			
	Jumlah rumusan kebijakan fasilitasi perdagangan luar negeri	Jumlah Permendag	13	16	19	22	25			
	Mou imbal dagang dalam pelaksanaan ekspor	Jumlah kesepakatan	1	1	1	1	1			
	Peningkatan Pelayanan kepada Eksternal maupun internal Kemendag pada sistem INATRADE	Persentase Kepuasan Eksternal dan Internal	100	100	100	100	100			
	Mendorong peningkatan implementasi fasilitasi perdagangan dari notifikasi kategori B menjadi A untuk dua komoditas Bisk. Makanan	Persen	50	100	100	100	100			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan fasilitas perdagangan di wilayah perbatasan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor	Jumlah Rekomendasi kumulatif	3	5	9	12	15			
Output:										
Kebijakan Fasilitas Ekspor dan Impor		Peraturan	2	2	2	2	2		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	
Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor Melalui Intrade	Jumlah layanan fasilitas ekspor dan impor melalui INATRADE	Layanan	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia	Jumlah Skema Fasilitas Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitas Perdagangan Lainnya	Skema	1	1	1	1	1	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan Penerapan Sertifikasi Mandiri		SKA	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	Jumlah negara dalam skema pemanfaatan/fasilitas peningkatan akses pasar melalui skema imbal dagang	Negara	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Facilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)				7+13	18+13	18+13	18+13	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	Mendukung Perbatasan
Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor melalui Fasilitas Pembiayaan Perdagangan	Jumlah Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor melalui Fasilitas Pembiayaan Perdagangan	Laporan	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Fasilitas Ekspor	Responsive Gender didukung Komponen/Subkomponen : Bimbingan Teknis Fasilitas Pembiayaan Ekspor (khususnya terkait e-Trade Financing)
Dukungan Terhadap Implementasi Fasilitas Perdagangan (KNFP)	Jumlah layanan KNFP	Layanan	1	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik		
Facilitasi Perdagangan pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Lainnya		Kawasan	0	3	3	3	3			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	0	1	1	1	1			
Pengelolaan Impor										
Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal										
	Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor yang harmonis dengan	Peraturan	15	15	15	15	15			
	Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	SPI	8500	8500	8500	8500	8500			
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang impor	Orang	500	500	500	500	500			
	Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan	Laporan	7	7	7	7	7			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Terciptanya ketersediaan pasokan bahan pangan yang cukup pada hari-hari besar keagamaan nasional melalui kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional										
	Jumlah kebijakan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan	Peraturan	4	4	4	4	4			
<u>Output :</u>										
Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong	Permendag	6	8	7	6	5	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global; ProP : Peningkatan Investasi (inbound & outbound) Industri GPN berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	
Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Pokok	Permendag	4	4	4	4	4		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan; KP : Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; ProP : Stabilisasi Harga Pangan	
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border	Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border	Kegiatan	0	1	1	1	1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Pengelolaan Impor; ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pelaksanaan Kebijakan Impor di Post Border		Laporan	2	2	2	2	2		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Pengelolaan Impor; ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	
Kebijakan Impor Dalam Rangka Pengelolaan Impor Barang Konsumsi		Permendag	2	2	2	2	2		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Pengelolaan Impor; ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar										
Meningkatnya upaya pembelaan dalam penanganan kasus hambatan perdagangan	jumlah submisi pembelaan dalam ranaka pengamanan akses pasar	Submisi	29	31	33	35	37			
<i>Output :</i>										
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar	Submisi	29	31	33	35	37	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	Responsive Gender didukung Komponen/Su bkomponen : Bimbingan Teknis Penanganan Hambatan Perdagangan
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah										
Meningkatnya peran daerah dalam fasilitasi ekspor dan impor										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Fasilitas perdagangan luar negeri daerah	Laporan	4	4	4	4	4			
	Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah	Jenis	1	1	1	1	1			
Meningkatnya kualitas pelaku usaha ekspor di 34 provinsi										
	Pelaku usaha di daerah yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ekspor	Pelaku Usaha	68	68	68	68	68			
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi										
	Fasilitasi promosi dan diklat	UKM	500	500	500	500	500			
	Tersedianya informasi produk potensial daerah	Buku	34	34	34	34	34			
	Pemanfaatan FTA center	Laporan	1	1	1	1	1			
Output :										
Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat	Kegiatan UKM	1 0	3 550	3 600	3 650	3 700		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
FTA Center di Daerah	Jumlah FTA Center di Daerah	FTA	1	1	0	0	0	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Identifikasi Potensi Ekspor		Buku	0	19	19	19	19			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi										
Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Melakukan penyelidikan Kasus Anti Dumping dan Tindakan Imbalan (analisa data impor, asistensi, pra penyelidikan, penyelidikan, rekomendasi penyelidikan)	Kasus	8	9	10	11	12			
	Melakukan analisa dampak penerapan Bea Masuk Anti	Laporan	1	1	1	1	1			
	Rancangan kebijakan ketentuan Anti Dumping	Laporan	1	1	1	1	1			
Output :										
Penanganan Penyelidikan Tindakan Anti Dumping dan Tindakan Imbalan			0	0	0	0	0		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)										
Meningkatnya Kualitas Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku										
	Jumlah Penanganan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguards)	Penanganan /Kasus	5	7	8	9	10			
	Jumlah Daerah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Tindakan Pengamanan Perdagangan	Daerah	10	11	11	11	11			
	Jumlah Laporan Hasil Analisa Terhadap Indikasi Pelonjakan Volume Impor	Laporan	1	1	1	1	1			
	Jumlah asistensi	Asistensi	5	8	9	10	11			
Output :										
Penanganan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)			5	7	8	9	10			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penyelenggaraan Atase Perdagangan										
Terselenggaranya atase perdagangan										
	Laporan intelijen bisnis	Laporan	25	25	25	25	25			
	promosi dagang luar negeri yang diikuti	promosi	100	100	100	100	100			
	keturutsertaan dalam pertemuan antar pemerintah negara di bidang perdagangan	pertemuan	52	52	52	52	52			
Output :										
Layanan Penelitian di Bidang Perdagangan		Layanan	25	25	25	25	25			
Layanan Data Statistik Perdagangan		Layanan	0	0	0	0	0			
Promosi Dagang		promosi	100	100	100	100	100			
Pertemuan di Bidang Perdagangan		pertemuan	52	52	52	52	52			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)										
Meningkatnya promosi dan pasar akreditasi ITPC										
	Peningkatan Potensi Transaksi	%	10	10	10	10	10			
	Buyer inquiry	Inquiry	144	144	240	240	336			
Output :										
Promosi ITPC			0	0	0	0	0		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Buyer Inquiry	Jumlah buyer inquiry	Inquiry	9	12	15	18	21	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaiannya, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Market Intelligence dan Co-Working Space di Pasar Potensial	Jumlah Market Intelligence dan Co-Working Space	Martel dan Co-Working Space	21 Martel dan 5 Co-Working Space	22 Martel dan 6 Co-Working Space	23 Martel dan 7 Co-Working Space	24 Martel dan 8 Co-Working Space	25 Martel dan 9 Co-Working Space	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaiannya, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor; ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Dukungan Manajemen Saker		Layanan	1	1	1	1	0			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Advokasi Perdagangan										
Terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat										
	Persentase pemanfaatan dokumen non litigasi	Persen (%)	75	75	80	85	90			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase penyelesaian dokumen litigasi dalam rangka sengketa perdagangan	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Kepuasan stakeholders atas layanan advokasi perdagangan	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Output :										
Layanan Advokasi Non Litigasi Dalam Rangka Negosiasi Perjanjian Perdagangan Internasional		Laporan	1	1	1	1	1			
Layanan Advokasi Non Litigasi dan Litigasi Dalam Rangka Perancangan Sengketa Perdagangan Internasional		Laporan	2	2	2	2	2			
Layanan Advokasi Non Litigasi Dalam Rangka Implementasi Dan Dokumentasi Hukum Perdagangan Internasional		Laporan	1	1	1	1	1			
Layanan Pemutakhiran Basis Data Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	-	-	-	-	-			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	2	3	4	1			
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional										
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra										
	Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos tarif	500	500	500	500	500			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional										
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	5	5	5	5	5			
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku usaha	150	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku usaha	601	1.000	1.000	1.000	1.000			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra	Dokumen	34	90	92	94	88	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Penguatan Peran Diplomasi Perundingan Perdagangan Internasional		Dokumen	1	2	2	2	2			
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah	Laporan	1	2	2	2	2	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional	Dokumen	0	2	2	2	2	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	Ratifikasi	5	7	7	7	7	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	Laporan	2	15	17	19	21	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
FTA Center	Jumlah Layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center)	Pelayanan	601	910	910	910	903	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
FTA Support Center	Jumlah jenis layanan FTA Support Center (Konsultasi dan Edukasi, Policy improvement dan Negotiation Support, dan FTA Research) (Sebelum beralih ke export center)	Pelayanan	0	3	3	3	3	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	
Perundingan Perdagangan Jasa										
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional										
	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	6	20	20	20	20			
Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional										
	Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	2	10	10	10	10			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	Dokumen	0	4	4	4	4			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen (%)	0	79	81	83	85			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra	Dokumen	15	42	44	46	48	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Peningkatan Peran Perundingan Bidang Jasa	Jumlah dukungan kegiatan peningkatan peran peningkatan Peran Perundingan Bidang Jasa	Dokumen	1	3	3	3	3	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa	Jumlah naskah akademik dan penjelasan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati untuk dilimpahkan dalam proses ratifikasi	Dokumen	0	4	4	4	4	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Jasa		Dokumen	0	1	1	1	1			
Perundingan Perdagangan Multilateral										
Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral										
	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa										
	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	0	79	81	83	85			
<i>Output :</i>										
Peningkatan Akses Pasar Barang di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di Fora Multilateral	Dokumen	20	31	33	35	29	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Laporan	3	5	5	5	5	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan penyebaran informasi aturan dan kesepakatan perdagangan internasional kepada para pemangku kepentingan	Dokumen	0	3	3	3	3			
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN										
Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional										
	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Perundingan	50	70	80	80	80			
	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	Persen (%)	5	5	5	5	5			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										
	Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	Persen (%)	75	80	85	85	85			
	Penyelesaian pelampahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	77	79	81	83	85			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Akses Pasar Barang di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Dokumen	50	115	120	125	110	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah penanganan NTMs di Negara Mitra ASEAN	Dokumen	0	1	1	1	1			
Pemenuhan AEC Score Card		Laporan	1	2	2	2	2			
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN		Laporan	3	3	3	3	3			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Laporan	2	8	8	8	8	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Perundingan Perdagangan Bilateral										
Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil										
	Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	Perundingan	7	7	7	7	7			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	Persen (%)	77	79	81	83	85			
Output :										
Peningkatan Akses Pasar Barang dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di Fora Bilateral	Dokumen	62	100	110	120	90	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan Perdagangan Bilateral		Dokumen	5	5	5	5	5			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Bilateral		Laporan	3	3	3	3	3			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional										
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional										
	Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Kegiatan	4	4	5	5	6			
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia										
	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional										
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan APEC dan Organisasi Internasional, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen (%)	77	79	81	83	85			
Output :										
Peningkatan Akses Pasar Barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di forum APEC dan organisasi internasional	Dokumen	41	81	86	91	96	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakalan Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; Prop : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Laporan	2	8	8	8	8		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional		Laporan	2	3	3	3	3			
PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI										DAGRI
Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok										
	Stabilitas harga bapak antar waktu	Persen (%)	6	6	5,9	5,9	5,9			
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
	Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern	Persen (%)		82	83	84	85			
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan										
	Pertumbuhan UMKM yang memasarkan produk melalui perdagangan melalui sistem elektronik	Persen (%)	5	5	5	5	5			
	Peningkatan omzet pedagang pasar rakyat yang sudah di revitalisasi	Persen (%)	-	20	20	20	20			
Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas										
	Pertumbuhan Implementasi PBK	Persentase	2	4	10	12	14			
	Pertumbuhan Implementasi SRG	Persentase	7	16	21	28	35			
	Pertumbuhan Implementasi PLK	Persentase	6	12	16	20	25			
	Indeks Kepuasan Layanan Publik	Nilai	75	78	80	83	85			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase	75	78	80	83	85			
	Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	Persentase	75	78	80	83	85			
Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab										
	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	42	43	44	45	46			
	Indeks Tertib Ukur	Indeks	55	59	64	68	72			
	Indeks Tertib Mutu	Indeks	36	39	41	46	48			
	Indeks Kendali Mutu	Indeks	46	49	53	57	62			
	Indeks Tertib Niaga	Indeks	51	55	59	63	66			
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri										
	Kemitraan pemasaran produk dalam negeri	Persen (%)	20	20	20	20	20			
	Pelaku usaha UMKM yang meningkat kapasitasnya	Persen (%)	20	20	20	20	20			
Output :										
Pusat Produk Dalam Negeri Unggulan Daerah	Jumlah daerah yang terbangun pusat produk dalam negeri unggulan	Kab/Kota	-	1	1	1	1			
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah PMKM yang menerima bantuan peningkatan kewirausahaan dan pemasaran serta bantuan sarana usaha perdagangan	PMKM	3000	10000	10520	10780	10780	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado Ukupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi; KP : Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha; ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Peserta	2000	3000	3150	3225	3225	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakalan Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi		

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat Nusantara	PMKM	10	400	420	430	430		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi; KP : Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha; ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting										
Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting										
	Stabilitas harga bapak hasil pertanian pangan antar waktu	Persen (%)	3,0	3	2,9	2,9	2,9			
	Stabilitas harga bapak hortikultura antar waktu	Persen (%)	24,0	24	23	23	23			
	Stabilitas harga bapak hasil industri antar waktu	Persen (%)	5	5	4,9	4,9	4,9			
	Stabilitas harga bapak hasil peternakan dan Perikanan antar waktu	Persen (%)	6	6	5,9	5,9	5,9			
	Stabilitas harga barang penting antar waktu	Persen (%)	3	3	3	2,9	2,9			
Output :										
Rancangan Kebijakan Pedoman Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah rancangan kebijakan pedoman barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rancangan	4	4	4	4	4		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pengendalian Inflasi	
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat	Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat	Data dan Informasi	12	12	12	12	12		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pengendalian Inflasi	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	Jumlah daerah pelaksanaan upaya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN	Kab/Kota	82	82	82	82	82		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pengendalian Inflasi	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Sarker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan										
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan aparaturnya di bidang perdagangan										
	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik	Fasilitator	130	200	200	200	200			
	Pertumbuhan waralaba dalam negeri	Persen (%)	5	5	5	5	5			
	Jumlah pelaku usaha dan aparaturnya yang mendapat pembinaan bimbingan teknis di bidang usaha perdagangan dalam negeri	Orang	2000	4000	6000	8000	10000			
Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri										
	Jumlah penyusunan peraturan terkait kebijakan usaha Perdagangan	Peraturan	4	6	6	6	6			
	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen melalui sistem perizinan online bidang perdagangan dalam negeri	Dokumen	2000	4000	6000	8000	10000			
	Penyelesaian pemenuhan komitmen bidang perdagangan dalam negeri sesuai dengan SLA (Service Level Agreement)	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan	Jumlah rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan	Rancangan	4	6	6	6	6		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik	rancangan	1	1	1	1	1		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; ProP : Penguatan Industri Fintech, e-commerce, on-demand Service, dan Internet Of Things	
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional	rancangan	3	5	5	5	5		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	
Tesaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	Fasilitator	130	200	200	200	200		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; ProP : Penguatan Industri Fintech, e-commerce, on-demand Service, dan Internet Of Things	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan	Pelaku Usaha/Aparatur	1000	2000	2000	2000	2000		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Rill, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Sather		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah										
Meningkatnya ketersediaan data dan pengembangan dan kegiatan Perdagangan dalam Negeri di daerah										
	Jumlah data dan informasi perdagangan dalam negeri	Daerah	34	34	34	34	34			
	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pasar murah	Daerah	34	34	34	34	34			
	Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah	Daerah	-	34	34	34	34			
Meningkatnya perlindungan konsumen dan standarisasi mutu di daerah										
	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen di daerah	Daerah	34	34	34	34	34			
	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu di daerah	Daerah	-	27	27	27	27			
Meningkatnya penggunaan pasar lelang di daerah										
	Jumlah pengguna pasar lelang di daerah yang berpartisipasi	Pelaku		464	502	547	596			
Output:										
Facilitasi Kegiatan Pasar Murah	Jumlah daerah pelaksanaan fasilitasi kegiatan pasar murah	Daerah	34	34	34	34	34			
Kegiatan Pangan Nusa	Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pangan nusa	Daerah	-	34	34	34	34			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah daerah yang menyampaikan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta informasi perdagangan dalam negeri	Daerah	34	34	34	34	34			
Perlindungan Konsumen di Daerah	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen di daerah	Daerah	34	34	34	34	34			
Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu di daerah	Daerah	-	27	27	27	27			
Pengguna Pasar Lelang Di Daerah	Jumlah pengguna pasar lelang di daerah yang berpartisipasi	Pelaku	-	464	502	547	596			
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah layanan	Layanan	1	1	1	1	1			
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan										
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Sistem dan Sarana Perdagangan										
	Pembangunan sarana perdagangan yang sesuai dengan perencanaan	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Jumlah pasar yang menggunakan teknologi informasi	Pasar	-	5	5	5	5			
	Pembangunan Gudang di Pasar Rakyat	Unit	-	3	3	3	3			
	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan antar pulau yang melaporkan manifest domestik	Persen (%)	-	50	50	50	50			
Output :										
Rancangan Kebijakan Terkait Penataan Sistem Logistik Nasional	Jumlah rancangan kebijakan terkait penataan sistem logistik nasional	Rancangan	5	5	5	5	5		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Informasi sarana distribusi dan logistik di Bidang Perdagangan	Jumlah informasi sarana distribusi dan logistik di bidang perdagangan	Daerah	34	34	34	34	34		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	Penyedia Jasa	800	800	800	800	800			
Sarana Perdagangan Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	Unit	49	50	52	53	53	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke; Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Jumlah Gudang/Depo Non SRG yang dimanfaatkan	Jumlah gudang/depo non SRG yang dimanfaatkan	Gudang/Depo	7	10	11	12	13		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	Jumlah implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	Pasar	-	5	5	5	5		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penataan Perdagangan Antar Provinsi	Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi	Kegiatan	1	1	1	1	1		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang	Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan Laporan Stok Barang di Gudang	Kegiatan	-	1	1	1	1		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pengendalian Inflasi	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi										
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi										
	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	Perusahaan	45	47	50	52	54			
	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional Keuangan dan APU PPT	Perusahaan	54	57	60	62	63			
	Persentase pelaku usaha yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Persentase	60	73	75	77	80			
Output :										
	Pelaku usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	Perusahaan	32	47	50	52	54			
	Pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Perusahaan	54	57	60	62	63			
	Pelaku Usaha PBK yang diaudit	Perusahaan	23	28	29	29	30			
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas										
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas										
	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku	50	52	55	59	64			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	Pelaku	200	464	502	547	596			
	Persentase pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	Persentase	70	75	80	85	90			
	Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional	Lembaga	50	52	54	58	60			
	Jumlah daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)	Daerah	6	12	17	22	27			
	Peningkatan Ekspor melalui instrumen SRG	Persentase	2	3	5	7	10			
Output :										
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku	50	52	55	59	64		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang	Pelaku	200	464	502	547	596		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi; KP : Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	
Peserta Bimbingan Teknis di Bidang SRG dan PLK		Orang	370	400	430	460	500			
Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku		Lembaga	50	52	54	58	60			
Persetujuan Lembaga SRG dan PLK		Persetujuan	18	25	25	25	25			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	Daerah	6	12	17	22	27		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Peningkatan Pelayanan Hukum										
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas										
	Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	Peraturan	7	11	12	12	12			
	Rekomendasi Tindakan/Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang sesuai ketentuan	Dokumen	70	94	94	94	94			
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen	27	37	37	37	37			
	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen	10	15	15	15	15			
Output :										
Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan PBK, SRG, dan PLK		Peraturan	7	11	12	12	12			
Pengenaan sanksi administrasi dan rekomendasi tindakan/Proses penyidikan atas pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Sistem Resi Gudang		Dokumen	70	94	94	94	94			
Pemberian Konsultasi, Asistensi, dan pemberian keterangan sebagai saksi/ahli hukum tentang Peraturan di bidang PBK dan SRG		Dokumen	27	37	37	37	37			
Berperkara di badan peradilan dan/atau penyelesaian perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)		Dokumen	10	15	15	15	15			
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas										
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas										
	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang	Analisis	5	7	7	8	8			
	Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	550	600	650	750	800			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	jumlah akses platform layanan informasi harga	Akses	10000	10000	11000	11000	12000			
	Persentase pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	Persen (%)	70	75	80	85	90			
	Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan izin sebagai wakil pialang berjangka	Persen (%)	82	84	86	88	90			
Output :										
Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang	jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	Analisis	5	7	7	7	7		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi; KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	
Perizinan Pelaku Usaha PBK		Izin	550	600	650	750	800			
Cakupan Komoditi dalam Sistem Informasi Harga		Komoditi	14	15	15	16	17			
Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK		Orang	150	200	200	200	200			
Penguatan Kompetensi Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi		Orang	350	500	500	500	500			
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen										
Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen										
	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian	Persen	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5			
	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen saat Pembelian	Persen	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen										
	Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	Persen	60	60	65	65	70			
	Persentase Pemahaman SDM LPKSM Teredukasi Terkait Standar Perlindungan Konsumen	Persen	50	55	60	65	70			
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen										
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Persen	90	91	91	92	92			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Tingkat Implementasi Online Dispute Resolution	Persen	20	30	40	50	90			
Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif										
	Persentase BPSK yang Aktif	Persen	50	50	55	55	60			
	Persentase Pemahaman SDM BPSK Teredukasi Terkait Pelayanan BPSK	Persen	80	80	80	80	80			
Output :										
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan	Rancangan	4	4	4	4	5			
Edukasi Konsumen	Jumlah konsumen teredukasi	Orang	4525	7425	6500	6500	6500			
	Jumlah media informasi	media	4	4	4	4	4			
	Jumlah viewers konten edukasi	orang	2000	2500	3000	3500	4000			
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha teredukasi	Orang	100	900	550	550	600			
Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah media layanan pengaduan konsumen	media	5	5	5	5	5			
	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	97	97	97	97	97			
Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah SDM LPK yang dibina	Orang	33	120	100	100	120		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Ritel, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	target berubah karena adanya output baru
Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Konsumen		Partisipasi	1	4	4	4	4			
	Jumlah Posisi Runding di Bidang Perlindungan Konsumen	Partisipasi	1	4	4	4	4			
	Jumlah Komitmen Kerjasama Internasional yang	komitmen	2	2	3	3	4			
Pembinaan SDM BPSK										
	Jumlah SDM BPSK yang Dibina	orang	0	368	250	250	250			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Tertib Ukur										
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrologian	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum	Persen	60	65	70	75	80			
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrologian	Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kemetrologian	Persen	25	30	35	40	45			
Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrologian	Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	Daerah	1	15	10	10	10			
Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	Persentase Ketertelusuran Standar Nasional	Persen	60	65	70	75	80			
	Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional	Persen	60	65	70	75	80			
	Persentase Ketertelusuran Standar Unit Metrologi Legal (UML)	Persen	40	45	50	55	60			
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrologian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrologian	Negara	0	2	2	2	2			
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Skor Zona Integritas (ZI)	skor ZI	83	83,25	83,5	83,75	84			
Output :										
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi	Rancangan	8	8	8	8	8			
Pengawasan Kemetrologian	Jumlah UTP yang diawasi	Unit	9000	100000	110000	120000	130000		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Rill, Dan Industrialisasi; KP : Pengembangan Industri Halal; ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	
	Jumlah BDKT yang diawasi	Unit	6000	25000	26000	27000	28000			
Penegakan Hukum Kemetrologian	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan di Bidang Kemetrologian	Kasus	5	5	6	6	8			
Edukasi Kemetrologian	Jumlah masyarakat yang paham tentang Metrologi	orang	1000	1500	2000	2500	3000			
	Jumlah pelaku usaha yang dibina	pelaku usaha	50	100	200	200	200			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penilaian dan Surveillance UML	Jumlah UML yang memperoleh SKKPTTU	unit	60	50	40	30	29			
	Jumlah UML yang sesuai ketentuan	unit	200	250	300	350	400			
Layanan Verifikasi Standar Ukuran	Jumlah alat standar yang diverifikasi	Alat Standar	4000	7400	7400	7600	7800			
	Pemenuhan SLA	persen	30	30	30	30	30			
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82,2	82,4	82,6	82,8			
Layanan Verifikasi Standar Ukuran (SNSU)	Jumlah alat standar yang diverifikasi	unit	120	300	300	300	300			
Layanan Perizinan Izin Tipe	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin	1000	1500	1500	1500	1500			
	Pemenuhan SLA	persen	3	3	3	3	3			
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82,2	82,4	82,6	82,8			
Layanan Pengujian UTTP dan Tera Tera Ulang UTTP penanganan khusus	Jumlah UTTP yang diuji	UTTP	40000	41000	42000	43000	44000		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	Pemenuhan SLA	persen	90	90	90	90	90			
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82	82	83	83			
Pengembangan Kompetensi SDM Kemetrolgian	Persentase SDM yang lulus uji kompetensi	Orang	200	200	200	200	200		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	Jumlah pejabat fungsional Kemetrolgian yang diberikan	orang	400	400	400	400	400			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	Jumlah Instalasi Laboratorium Pengujian UTTP	unit	2	3	3	3	3			
	Jumlah SUML yang diadakan	unit	5	5	5	5	5			
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolagian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrolagian	negara	0	2	2	2	2			
Partisipasi Aktif pada Forum Metrologi Internasional	Jumlah penerapan rekomendasi internasional	Rekomendasi	1	2	2	2	2			
Kerjasama Kemetrolagian (KSST)	Jumlah peserta tech assistance yang memahami metrologi	orang	0	40	40	40	40			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa										
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen										
	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100			
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen										
	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan	Persen	100	100	100	100	100			
Meningkatnya Kualitas SOM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen										
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SOM PPBJ dan PPNS-PK	Persen	20	20	20	20	20			
	Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan	Persen	40	43	46	48	50			
Output :										
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		Rancangan	1	8	8	8	8			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah Pengawasan Barang Beredar Terhadap Ketentuan SNI, MKG, dan Label	Produk	136	700	700	730	750		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	Jumlah Pengawasan Jasa	Pelaku Usaha	21	70	75	80	85		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	Jumlah PPNS yang dibina	Orang	60	205	205	210	210		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang melakukan pengawasan	Orang	44	235	270	305	335			
Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	Jumlah penegakan hukum bidang perlindungan konsumen	Kasus	1	6	6	7	7			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	0	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang										
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang										
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88			
Output :										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Contoh yang diujikan	Contoh	4500	4600	4700	4800	4900		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian mutu barang	Service Level Agreement	persen	81	81,5	81,5	82	82		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	Parameter Baru BPMB	Parameter	3	3	4	4	4			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satter		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Standardisasi dan Pengendalian Mutu										
Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis										
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan	Pelaku Usaha	3	3	4	4	5			
	Persentase Produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis	Persen	70	70	71	71	71			
Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian										
	Persentase Pembinaan LSPro yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100			
	Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat Kompetensinya	Persen	0	100	100	100	100			
	Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	Persen	94	95	95	96	96			
Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100			
	Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS	Orang	100	115	130	145	160			
Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu										
	SLA Dit. Standalitu	persen	81	82	83	84	85			
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88			
Output :										
Rancangan Kebijakan dan NSPK di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu		Rancangan	4	2	2	2	2			
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Nomor Pendaftaran	7500	7750	8000	8250	8500	Industri 4.0 di 5 SubSektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
	SLA Dit. Standalitu	persen	81	82	83	84	85			
Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk yang dipantau	produk	6	7	8	9	10	Industri 4.0 di 5 SubSektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi		
Pendampingan dan atau monitoring penerapan standar /persyaratan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pendampingan dan atau monitoring	pelaku usaha	3	3	4	4	5			
Edukasi Pemangku KepentinganTerkait Pengendalian Mutu	Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu	persen	81	82	83	84	85			
Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian	Jumlah LPK yang berpartisipasi dalam Uji Profisiensi	Lab	40	40	40	40	40			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Jumlah Pejabat Fungsional Yang Diberikan Pembinaan	Orang	150	200	200	200	200		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Penyediaan Informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis	Jumlah informasi terkait mutu/persyaratan teknis	Mitra	10	11	12	13	14	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
Kerjasama Internasional di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Jumlah posisi kerjasama terkait mutu	Partisipasi	9	9	9	9	9			
Sarana Laboratorium Pengujian		Unit	0	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi										
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88			
Output : Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan BK	Sertifikat	7100	7200	7300	7400	7500		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	SLA Balai Kalibrasi	persen	81	81,5	81,5	82	82			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	Parameter Baru BK	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi										
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88			
Output :										
Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan BS	Sertifikat	169	179	189	199	209	Industri 4.0 di 5 SubSektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	
	SLA Balai Sertifikasi	persen	81	81,5	81,5	82	82			
Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	Ruang Lingkup Baru BS	Ruang Lingkup	3	3	3	3	3			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Peningkatan Tertib Niaga										
Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persen	75	80	85	90	95			
	Persentase Dugaan Pelanggaran (Slap Inspeksi) yang Diperiksa	Persen	20	25	30	35	40			
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan										

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Persen	75	80	85	90	95			
Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan										
	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	Persen	5	30	30	30	30			
	Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif	Persen	18	50	60	70	80			
Output :										
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Rancangan	4	8	8	8	8			
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang dibina	Orang	25	150	150	150	150		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
	Jumlah PPNS-DAG dan PPTN yang melakukan pengawasan	Orang	50	256	270	302	326			
Layanan Pendaftaran Barang K3L	Jumlah Ruang Lingkup Pendaftaran K3L	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2			
	Service Level Agreement	Persen	75	80	85	90	95			
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	75	160	170	180	190		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi; KP : Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan; ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Kegiatan Perdagangan										
	Jumlah pelaku usaha teredukasi	Pelaku Usaha	N/A	400	400	400	400			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tindak Lanjut Pengawasan Perdagangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan	Kasus	2	5	5	5	5			
Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	Berita Acara	850	3162	3162	3162	3162	Industri 4.0 di 5 SubSektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bermilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Pengelolaan Impor; ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional										
Meningkatnya Transaksi dan Efektivitas Perlindungan										
	Persentase Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah yang Dimanfaatkan	Persen (%)	20	20	20	20	20			
	Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang Disebarluaskan	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan	Persen (%)	35	35	35	35	35			
	Persentase Keberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persen (%)	25	25	25	25	25			
Output :										
Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen		Rekomendasi	20	20	20	20	20			
Informasi Dibidang Perlindungan Konsumen		Informasi	100	100	100	100	100			
Layanan pengaduan konsumen		Pengaduan	750	750	750	750	750			
Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan		Lembaga	100	100	100	100	100			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			

Lampiran 5. Matriks Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Tabel 0-3 Matriks Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
090-KEMENTERIAN PERDAGANGAN (EXERCISE KEMENDAG)	3.862.140	2.352.729	3.395.266	3.343.049	3.427.547	3.452.596	
Program Dukungan Manajemen	1.350.302	1.057.604	1.029.928	1.040.109	1.050.876	1.073.581	
3702-Peningkatan Pengelolaan Perencanaan	29.583	15.110	29.787	29.997	30.213	30.695	Biro Perencanaan
3703-Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	18.200	9.010	18.352	18.508	18.669	18.967	Biro Organisasi dan Kepegawaian
3704-Peningkatan Pengelolaan Keuangan	95.500	92.479	96.368	97.263	98.186	99.753	Biro Keuangan
3705-Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan	74.000	77.013	74.138	74.281	74.428	75.616	Biro Umum
3706-Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan	13.700	4.733	13.762	13.825	13.890	14.112	Biro Hukum
3707-Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	48.000	27.151	49.000	50.000	51.000	52.000	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
3708-Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian	31.800	22.070	32.151	32.513	32.886	33.411	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian
3709-Pelayanan Informasi Publik	20.000	11.808	20.192	20.389	20.592	20.921	Biro Hubungan

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
							Masyarakat
3710-Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor	6.000	3.470	6.022	6.044	6.067	6.164	Pusat Penanganan Isu Strategis
3713-Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan	84.210	82.710	84.270	84.332	84.396	85.743	Kantor Dagang Ekonomi Indonesia
3723-Penyelenggaraan Akademi Metrologi	8.800	6.937	8.968	9.141	9.319	9.468	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian
5048-Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan	67.805	60.961	69.543	71.333	73.178	74.346	Pusat Data dan Sistem Informasi
5112-Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang	7.600	4.459	7.681	7.764	7.849	7.974	Balai Diklat Penguji Mutu Barang
3718-Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	339.596	219.095	9.747	10.203	10.972	16.893	Biro Umum
3719-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	93.399	83.401	94.244	95.114	96.011	97.543	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
3729-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	98.855	81.021	99.510	100.186	100.882	102.492	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3739-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.058	53.507	56.628	57.215	57.821	58.744	Sekretariat Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional
3746-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	42.466	33.465	42.795	43.133	43.482	44.176	Sekretariat Inspektorat Jenderal
3752-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN	65.061	53.084	65.798	66.557	67.339	68.414	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
3758-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	48.926	39.787	49.367	49.822	50.291	51.094	Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
3763-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	36.087	29.467	36.406	36.734	37.073	37.665	Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
3977-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	52.327	40.537	52.857	53.402	53.965	54.826	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
							Tertib Niaga
3747-Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I	3.178	1.560	3.182	3.185	3.189	3.240	Inspektorat I
3748-Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II	3.041	1.556	3.045	3.049	3.054	3.103	Inspektorat II
3749-Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III	2.967	1.570	2.969	2.970	2.972	3.019	Inspektorat III
3750-Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV	3.143	1.643	3.146	3.149	3.152	3.202	Inspektorat IV
Program Perdagangan Dalam Negeri	1.366.354	784.134	1.393.977	1.422.430	1.451.737	1.474.908	
3716-Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	187.469	65.402	192.331	197.340	202.499	205.731	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3720-Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.947	31.798	50.515	51.100	51.703	52.528	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3722-Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan	25.036	16.595	25.173	25.315	25.461	25.867	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
3974-Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	67.000	22.948	67.506	68.026	68.562	69.656	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
5090-Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	682.906	425.259	701.047	719.732	738.978	750.773	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
3759-Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	5.200	2.684	5.226	5.252	5.279	5.363	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
3760-Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas	15.450	8.825	15.558	15.670	15.784	16.036	Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
3761-Peningkatan Pelayanan Hukum	5.500	3.060	5.522	5.545	5.569	5.658	Biro Peraturan Perundang

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3762-Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	9.000	4.720	9.054	9.109	9.166	9.312	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
3724-Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	25.937	12.937	26.340	26.754	27.181	27.615	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
3726-Peningkatan Tertib Ukur	118.093	82.803	119.373	120.693	122.052	124.000	Direktorat Metrologi
3727-Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	16.431	7.573	16.598	16.769	16.946	17.216	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3732-Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	17.134	8.794	17.458	17.792	18.136	18.425	Balai Pengujian Mutu Barang
3733-Standardisasi dan Pengendalian Mutu	60.175	47.985	60.762	61.367	61.991	62.980	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3734-Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	8.161	4.430	8.274	8.391	8.511	8.647	Balai Kalibrasi
3735-Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	4.285	3.992	4.291	4.296	4.302	4.371	Balai Sertifikasi
3992-Peningkatan Tertib Niaga	43.630	16.430	43.836	44.049	44.267	44.974	Direktorat Tertib Niaga

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3725-Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional	25.000	17.899	25.113	25.230	25.350	25.755	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Program Perdagangan Luar Negeri	1.129.403	507.403	955.212	864.290	908.641	887.553	
3730-Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	12.234	7.273	12.332	12.434	12.538	12.738	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3731-Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	6.500	3.907	6.534	6.569	6.606	6.711	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
3736-Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	14.141	8.841	14.202	14.266	14.331	14.560	Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor
3737-Pengelolaan Impor	8.944	6.142	8.976	9.009	9.043	9.187	Direktorat Impor
3745-Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	11.206	6.718	11.246	11.288	11.330	11.511	Direktorat Pengamanan Perdagangan
3975-Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	36.606	11.774	36.873	37.149	37.432	38.029	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3711-Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi	10.000	6.307	10.032	10.065	10.099	10.260	Komite Anti

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3712-Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)	8.500	6.058	8.539	8.579	8.620	8.758	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
3714-Penyelenggaraan Atase Perdagangan	85.000	65.257	85.721	86.463	87.227	88.619	Atase Perdagangan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
3777-Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	230.000	208.468	232.006	234.073	236.202	239.972	Biro Advokasi Perdagangan
3973-Layanan Advokasi Perdagangan	14.200	8.080	14.232	14.265	14.299	14.527	Sekretariat Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional
3738-Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	66.388	29.596	66.751	67.124	102.509	68.587	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa
3740-Perundingan Perdagangan Jasa	17.382	5.407	17.625	17.874	18.132	18.421	Direktorat Perundingan Multilateral
3741-Perundingan Perdagangan Multilateral	9.120	3.507	9.147	9.174	9.203	9.350	Direktorat Perundingan Asean
3742-Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	11.890	4.583	11.907	11.926	11.945	12.136	Direktorat Perundingan Bilateral
3743-Perundingan Perdagangan Bilateral	13.630	4.831	13.669	13.708	13.749	13.968	

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
3744-Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	8.701	3.350	10.713	10.726	10.740	10.879	Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional
3717-Pengembangan Produk Ekspor	19.000	7.876	19.189	19.384	19.585	19.898	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
3751-Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	6.706	455	6.768	6.832	6.898	7.008	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
3753-Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	12.850	3.928	12.988	13.130	13.277	13.489	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
3754-Pengembangan Promosi dan Citra	493.201	84.868	312.294	216.511	220.855	224.380	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
3755-Kerja Sama Pengembangan Ekspor	6.821	2.454	6.856	6.892	6.929	7.040	Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor
3756-Pengembangan SDM Bidang Ekspor	26.383	17.723	26.612	26.849	27.092	27.524	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
							Indonesia
Program Riset, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi	16.081	3.588	16.149	16.220	16.293	16.553	
3764-Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	5.327	998	5.343	5.360	5.378	5.464	Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri
3765-Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	4.952	1.165	4.978	5.005	5.033	5.113	Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri
3766-Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional	5.802	1.425	5.828	5.855	5.882	5.976	Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional

Keterangan :

* Sumber Data dari KPJM SatuDJA Kementerian Keuangan

** Asumsi Perhitungan berdasarkan selisih dari tahun 2023 terhadap 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI